TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

KAJIAN KESIAPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM

MILIK
PERPUSTAKAAN
ITN MALANG

Disusun Oleh :

ARDIYANTO MAKSIMILIANUS GA'I
06.24.041

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2011

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

KAJIAN KINSIPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM

MILIK
PERPUSTAKAAN
ITN MALANG

Disusun Oleh :

ARDIYANTO MARSIMILANUS GAI
06.24.041

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG
2011

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR
(SKRIPSI)

KAJIAN KESIAPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM

Disusun oleh
Nama : ARDIYANTO MAKSIMILIANUS GA'I
NIM. : 06.24.041

Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jenjang Strata Satu (S1)
Di
Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Nasional Malang

Dinyatakan Lulus Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Teknik
Pada Hari : , Februari 2011

Anggota Penguji :

Penguji 1	Penguji II	Penguji III
(Agung Wijajaksono, ST.MT)	(Ir. Hutomo Moestadjab)	(Teguh Kuncoro, ST)

Menyetujui,

Pembimbing 1	Pembimbing II
(Ir. Wahyu Hidayat, MM, MBA)	(Endratno Budi Santosa, ST)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang	Ketua Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITN Malang
(Ir. A. Agus Santosa, MT)	(Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT)

A Study of Maumere Capability as Autonomous Municipality

ABSTRACTION

Many reasons had been delivered for split policy implementation on a regon. Started from economic equity excuse, too large area geographically, the deference of identity basic, and the failure of communal conflict management. Basically, split policy is purposed to stimulate growth in every local development aspects dan to decrease the disparity between core and hinterland. In progress, it's clearer that most of the split reasons is a political will of some politic party and local elite for sake of people wealth and public service improvement. This caused many of splitted region are poorer than before and weighing on central government. Therefore, the aim of split to be autonomy isn't reached. The political will from Sikka government, especially the Maumere municipality aspirant, and people longing, by consider various opinion about region autonomy before will be the background of an academic study.

Weightiness analysis is used upon evaluative analysis by quantitative approach, population analysis, economic and finance capability analysis, and public service index which is obtained by comparing same factors and indicators between the aspirant and main region or the other region in same province or the other autonomous in Indonesia. Analytical Hierarchy Process is used to weighing each variables by asking opinon of the competent expert about the order of the variables.

Thereupon, it reveals the capability level of Maumere to be autonomous which is "Kurang Mampu".

Keywords: Region split, Autonomy municipality, Capability

"Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom"

ABSTRAKSI

Beragam alasan yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pemekaran suatu daerah. Dimulai dari alasan pemerataan ekonomi, kondisi geografis yang terlalu luas, perbedaan basis identitas, dan kegagalan pengelolaan konflik komunal Pada dasarnya kebijakan pemekaran daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan di semua aspek pembangunan daerah, dan mencegah disparitas daerah inti dan pinggiran. Dalam perkembangannya, semakin terlihat bahwa sebagian besar alasan pemekaran daerah bertujuan politis untuk beberapa partai politik dan elite lokal dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Akhirnya banyak daerah pemekaran yang menjadi miskin dan membebani pemerintah pusat sehingga tujuan pemekaran agar suatu daerah menjadi daerah otonom tidak tercapai. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah Kabupaten Sikka khususnya calon Kota Maumere, serta keinginan masyarakat, dengan menilik berbagai pertimbangan sesuai dengan uraian kami di tentang otonomi daerah di atas, yang mendasari dan melatarbelakangi dilakukan sebuah kajian akademis.

Dengan analisis evaluatif dangan pendekatan kuantitatif, dengan analisis kependudukan, analisis kemampuan ekonomi dan keuangan, serta indeks pelayanan publik, yang membandingkan faktor dan indikator yang sama antara calon daerah otonom dengan daerah induknya, atau daerah-daerah lain dalam satu provinsi atau dengan daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia maka dilakukan pembobotan. Untuk pembobotan masing-masing variabel digunakan metode *Analytical Hierarchy Proccess* (AHP) di mana akan diminta pendapat para ahli yang berkompeten di bidang pengembangan wilayah dan pemekaran terkait urutan bobot masing-masing variabel.

Setelah dilakukan pembobotan dan scoring terhadap nilai setiap indikator, maka diketahui tingkat kesiapan calon Kota Maumere untuk menjadi kota otonom, dengan hasil "Kurang mampu" untuk menjadi kota otonom.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Kota Otonom, Kesiapan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan penyertaanNya, sehingga tugas akhir dengan judul " Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom" dapat terselesaikan. Laporan tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang dalam menyelesaikan program S-1.

Latar belakang tugas akhir ini didasari oleh berbagai persoalan menyangkut otonomi daerah atau pun pemekaran wilayah, antara lain:

1. Desentralisasi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Fenomena otonomi daerah, atau pembentukan daerah otonom baru yang terjadi di Indonesia
3. Keinginan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk membentuk sebuah Kota Otonom Maumere
4. Perlunya dilakukan sebuah kajian akademis yang tidak mengandung unsur politis.

Dengan terselesaikannya penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Agustina Nurul Hidayati, MT., yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan awal dalam penyusunan proposal ini
2. Bapak Ir. Wahyu Hidayat, MM, MBA., selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan arahan, masukan dan dorongan serta petunjuk dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Endratno Budi S, ST., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan arahan, masukan dan dorongan serta petunjuk dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Ir. Ibnu Sasongko, MT, selaku Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Malang.
5. Bapak Agung Witjaksono, ST, MT., selaku dosen wali yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam penyeselaian tugas akhir ini.

6. Orang tua, dan keluarga yang telah memberkan dukungan materi maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga penulisan tugas akhir ini.
7. Teman-Teman Planoholic Angkatan 2006, yang telah banyak mendukung dalam proses pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir ini.
8. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Sikka, Bapak A. A. G. Conterius, S. Sos, yang selalu membantu, baik dalam bentuk motivasi, dukungan, serta bantuan dalam memperoleh data di Kabupaten Sikka.
9. Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah, DPPKAD, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, BPS, Bakesbangpol dan linmas, Dinas PU, dan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, atas segala bantuan dan dukungannya..
10. Semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan, yang baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya kepada saya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, studi ini masih jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi tambahan pengalaman dalam menulis karya ilmiah di waktu yang akan datang. Akhir kata semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah.

Malang Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Abstraksi i

Kata Pengantar ii

Daftar isi v

Daftar Peta viii

Daftar Bagan viii

Daftar Tabel ix

Daftar Grafik xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan dan Sasaran 8
1.3.1. Tujuan 8
1.3.2. Sasaran 8
1.4. Ruang Lingkup 8
1.4.1. Ruang Lingkup Lokasi 8
1.4.2. Ruang Lingkup Materi 12
1.5. Tinjauan Pustaka Pemekaran Wilayah 12
1.6. Landasan Teori 30
1.6.1. Teori Pembangunan Ekonomi 31
1.6.2. Pemerintahan Daerah 34
1.6.3. Otonomi Daerah 35
1.6.3.1. Arti Otonomi Daerah 35
1.6.3.2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah 37
1.6.3.3. Keberhasilan Otonomi Daerah 38
1.6.3.4. Keuangan Daerah 40
1.6.4. Konsep Pengembangan Wilayah 42
1.6.5. Konsep Pemekaran Wilayah 44
1.6.6. Teori Kota 44
``1.7. Rumusan Variabel 45

1.8. Metodologi Penelitian 49
1.8.1. Metode Pengumpulan Data 49
1.8.1.1. Survey Primer 50
1.8.1.2. Survey Sekunder 50
1.8.2. Metode Analisis Data 50
1.8.2.1. Teknik Analisis Data 50
1.8.2.1. Teknik Skoring dan Pembobotan 55
1.9. Kerangka Pemikiran 61
1.10. Sistematika Pembahasan 61

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH
2.1. Kependudukan 64
2.2. Perekonomian 68
2.2.1. Pendapatan Per Kapita 68
2.2.2. PDRB per kapita 70
2.2.3. PDRB Non Migas 72
2.2.4. Angka Kemiskinan 73
2.3. Keuangan Daerah 74
2.4 Pelayanan Publik 76
2.4.1. Bidang Pendidikan 76
2.4.2. Bidang Kesehatan 82
2.4.3. Bidang Infrastruktur 86

BAB III ANALISIS KESIAPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM
3.1. Analisis Kependudukan 94
3.1.1. Kepadatan Penduduk 94
3.1.2. Pertumbuhan Penduduk 94
3.2. Analisis Kemampuan Ekonomi 103
3.2.1. Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson) ... 104
3.2.2. Analisis Kinerja Ekonomi Daerah 107
3.3. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah 111
3.3.1. Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 112
3.3.2. Mengukur tingkat pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 114
3.3.3. Mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF) 116
3.3.4. Ratio Dana Alokasi Umum Terhadap APBD 118
3.3.5. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) 120
3.3.6. Ratio Ketergantungan 121
3.4. Analisis Tingkat Pelayanan Publik 123
3.4.1. Tingkat Pelayanan Bidang Pendidikan 124
3.4.1.1. Jumlah Siswa Per Sekolah 125
3.4.1.2. Jumlah Siswa Per Guru 129
3.4.2. Pelayanan Bidang Kesehatan 134
3.4.2.1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan 135

3.4.2.2. Ketersediaan Tenaga Kesehatan 136
3.4.3. Kualitas Infrastruktur (PRQI) 139
3.4.4. Indeks Pelayanan Publik 141
3.5. Analisis Penentuan Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom 143
3.5.1. Nilai Vektor Prioritas (VP) 144
3.5.2. Bobot Akhir Faktor Penentu 145
3.5.3. Skor dari setiap indikator Kesiapan 147
3.5.4. Hasil Penilaian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom 151

BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan 153
4.1.1. Kependudukan 153
4.1.2. Kemampuan Ekonomi 154
4.1.3. Kemampuan Keuangan Daerah 155
4.1.4. Tingkat Pelayanan Publik 157
4.1.5. Tingkat Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom 159
4.2. Saran 159
4.2.1. Bagi Pemerintah 159
4.2.2. Bagi Masyarakat 160
4.2.3. Bagi Akademisi 160

DAFTAR PUSTAKA xiii
LAMPIRAN - LAMPIRAN xvi

DAFTAR PETA

Halaman

Peta 1.1. Peta Calon Kota Maumere 10
Peta 1.2. Peta Orientasi Lokasi (Kabupaten Sikka)..... 11

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1.Struktur Hierarki AHP 60
Bagan1.2. Kerangka Pikir "Kajian Kesiapan Mamere Menjadi Kota Otonom.. 63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Rumusan Variabel 47
Tabel 1.2. Skala Banding Berpasangan (AHP) 58
Tabel 1.3. Nilai Kesiapan Daerah Otonom Baru 61
Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Sebelum Pembentukan Kota Maumere 64
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Calon Kota Maumere 66
Tabel 2.3. Tabel Perbandingan Jumlah Penduduk Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 66
Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 – 2009 67
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kota-Kota Otonom Baru Sejenis di Indonesia. 69
Tabel 2.6. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran 70
Tabel 2.7. Pendapatan Per Kapita Calon Kota Maumere 71
Tabel 2.8. PDRB Per kapita Kecamatan di Kabupaten Sikka Sebelum Pembentukan Kota Maumere 71
Tabel 2.9. PDRB Per kapita Kecamatan dalam Calon Kota Maumere 73
Tabel 2.10. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka 73
Tabel 2.11. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Maumere 74
Tabel 2.12. Angka Kemiskinan Sikka 75
Tabel 2.13. Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran 77
Tabel 2.14. Keuangan Daerah calon Kota Maumere 77
Tabel 2.15. Jumlah Sekolah di Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran 79
Tabel 2.16. Jumlah Sekolah di Calon Kota Maumere 80
Tabel 2.17. Jumlah Siswa di Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran 82
Tabel 2.18. Jumlah Siswa di Calon Kota Maumere 83
Tabel 2.19. Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Sikka 84
Tabel 2.20. Jumlah Tenaga Pendidik Calon Kota Maumere 85
Tabel 2.21. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sikka 86
Tabel 2.22. Jumlah Fasilitas Kesehatan Calon Kota Maumere 87
Tabel 2.23. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sikka 88
Tabel 2.24. Jumlah Tenaga Kesehatan Calon Kota Maumere 90
Tabel 2.25. Prosentasi Jalan Dengan Kualitas Baik Terhadap Keseluruhan Jalan di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sikka 91
Tabel 2.26. Prosentasi Jalan Dengan Kualitas Baik Terhadap Keseluruhan Jalan di Setiap Kecamatan 92
Tabel 3.1. Tabel Tingkat Kepadatan Penduduk Calon Kota Maumere 95
Tabel 3.2. Tabel Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi NTT Tahun 2009 97

Tabel 3.3. Tabel Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Maumere dan Kota Otonom Baru di Indonesia 98
Tabel 3.4. Pertumbuhan Penduduk di Calon Kota Maumere 101
Tabel 3.5. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten / Kota Provinsi NTT 101
Tabel 3.6. Tingkat Ketimpangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sikka.. 105
Tabel 3.7. Tabel Tingkat Ketimpangan Wilayah Kecamatan di Calon Kota Maumere 106
Tabel 3.8. Indeks Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2008-2009 109
Tabel 3.9. Indeks Kemampuan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2008-2009 .. 110
Tabel 3.10. Kategori Keuangan Daerah 112
Tabel 3.11. Tingkat Pertumbuhan PAD Calon Kota Maumere 113
Tabel 3.12. Tingkat Pertumbuhan APBD calon Kota Maumere 115
Tabel 3.13. Derajat Otonomi Fiskal Calon Kota Maumere 117
Tabel 3.14. Ratio Dana Alokasi Umum (RDAU) Terhadap APBD Calon Kota Maumere Tahun 2005-2009 118
Tabel 3.15. Indek Kamampuan Rutin Calon Kota Maumere 120
Tabel 3.16. Ratio Ketergantungan Calon Kota Maumere 122
Tabel 3.17. Ratio Siswa Per Sekolah Dasar di Kabupaten Sikka Tahun Tahun Ajaran 2009/2010 125
Tabel 3.18. Perbandingan Antara Ratio Siswa Per Sekolah Dasar Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 126
Tabel 3.19 . Ratio Siswa Per Sekolah Menengah di Kabupaten Sikka Tahun Ajaran 2009/2010 127
Tabel 3.20. Perbandingan Siswa Sekolah Menengah Dengan Jumlah Sekolah di Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 129
Tabel 3.21. Ratio Siswa Per Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sikka Tahun Ajaran 2009/2010 130
Tabel 3.22. Perbandingan Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Guru Calon Kota Maumere dengan Kabupaten Sikka 131
Tabel 3.23. Ratio Siswa Per Guru Sekolah Menengah di Kabupaten Sikka Tahun Anjaran 2009/2010 132
Tabel 3.24. Perbandingan Ratio Jumlah Siswa Sekolah Menengah Terhadap Guru antara Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 133
Tabel 3.25. Ratio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka 2009 135
Tabel 3.26. Ratio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 136
Tabel 3.27. Ratio Tenaga Kesehatan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka 137
Tabel 3.28. Perbandingan Ratio Fasilitas Kesehatan Antara Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 138
Tabel 3.29. Kualitas Infrastruktur Kabupaten Sikka Tahun 2009 139
Tabel 3.30. Perbandingan Rata–Rata Prosentasi Jalan dengan Kondisi Baik Terhadap Total Keseluruan Jalan 140

Tabel 3.31. Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Sikka Tahun 2009 141
Tabel 3.32. Nilai Vektor Priorotas Indikator dan Sub Indikator 144
Tabel 3.33. Pembobotan Faktor Penentu 145
Tabel 3.34. Skoring Faktor Penentu 147
Tabel 3.35. Hasil Penilaian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom 151
Tabel 3.36. Kategori Kemampuan Pemekaran 152
Tabel 4.1. Kesiapan Faktor Kependudukan 154
Tabel 4.2. Kesiapan Faktor Kemampuan Ekonomi 155
Tabel 4.3. Kesiapan Faktor Keuangan Daerah 157
Tabel 4.4. Kesiapan Tingkat Pelayanan Publik 158
Tabel 4.5. Nilai Kesiapan Daerah Otonom Baru 159

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 2.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 67
Grafik 2.2. Jumlah dan Persebaran Sekolah Calon Kota Maumere 81
Grafik 2.3. Jumlah Siswa di Calon Kota Maumere 83
Grafik 2.4. Jumlah Tenaga Pendidik Calon Kota Maumere 85
Grafik 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Calon Kota Maumere 88
Grafik 2.6. Jumlah Tenaga Kesehatan Calon Kota Maumere 90
Grafik 2.7. Kualitas Infrastruktur 93
Grafik 3.1. Kepadatan Penduduk Calon Kota Maumere 96
Grafik 3.2. Perbandingan Kepadatan Penduduk Calon Kota Maumere dengan Kota-Kota Otonomi Baru 99
Grafik 3.3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTT 103
Grafik 3.4. Tingkat Pertumbuhan PAD calon Kota Maumere 113
Grafik 3.5. Tingkat Pertumbuhan APBD Calon Kota Maumere 115
Grafik 3.6. Derajat Otonomi Fiskal Calon Kota Maumere 117
Grafik 3.7. Ratio DAU Terhadap APBD Calon Kota Maumere 119
Grafik 3.8. Indeks Kemampuan Rutin Calon Kota Maumere 121
Grafik 3.9. Ratio Ketergantungan Calon Kota Maumere 122
Grafik 3.10. Perbandingan Ratio Siswa Per Sekolah Dasar Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 127
Grafik 3.11. Perbandingan Ratio Siswa Per Sekolah Menengah Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 129
Grafik 3.12. Grafik Perbandingan Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Guru Antara Calon Kota Maumere Dengan Kabupaten Sikka 132
Grafik 3.13. Grafik Perbandingan Ratio Siswa Sekolah Menengah Per Guru Antara Calon Kota Maumere Dengan Kabupaten Sikka 134
Grafik 3.14. Perbandingan Ratio Fasilitas Kesehatan Antara Calon Kota Maumere Dengan Kabupaten Sikka 138
Grafik 3.15. Perbandingan Rata- Rata Kualitas Jalan di Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka 140
Grafik 3.16. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sikka 142

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal adanya sistem sentralistik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Asas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga terdapat pemerintah daerah dan daerah otonom atau wilayah yang bersifat administratif. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil makmur baik materiil maupun spirituil.

Setelah diberlakukannya Undang Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah, pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Fenomena pemekaran daerah dimulai sejak 1 Januari 2001, yang merupakan babak baru bagi pemerintah daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan "bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa daerah otonom, selanjutnya disebut sebagai daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Selanjutnya pasal 2 ayat (3) samapai dengan ayat (7) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah", dengan kata lain hakekat mendasar otonomi daerah sebagai mana

dimaksudkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dapat diterjemahkan bahwa Setiap daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan daerahnya dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki.

Prinsip-prinsip otonomi daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu [1]:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi keanekaragaman daerah
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya, berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan tugas pembantuan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Pada tahun 2004, pemerintahan provinsi telah bertambah dari 26 menjadi 33 (26,9 %), sedangkan pemerintah kabupaten/kota meningkat 45,2%, dari 303 menjadi 440. Angka-angka tersebut nampaknya akan meningkat terus di tahun-tahun mendatang. Pada saat laporan ini dibuat di awal 2007, usulan pembentukan 114 kabupaten/kota serta 21 propinsi baru telah berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Fenomena tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan di antara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk

[1] Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sekretarian Negara Republik Indonesia 2004.

mendukung sikap masing-masing pihak. Pemekaran telah membuka peluang terjadinya *bureaucratic and political rent-seeking*, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan "aspirasinya" mendorong terjadinya pemekaran.

Beragam alasan yang disampaikan terkait pelaksanaan kebijakan pemekaran suatu daerah. Dimulai dari alasan pemerataan ekonomi, kondisi geografis yang terlalu luas, perbedaan basis identitas, dan kegagalan pengelolaan konflik komunal. Pada dasarnya kebijakan pemekaran daerah bertujuan untuk merangsang pertumbuhan di semua aspek pembangunan daerah, dan mencegah disparitas daerah inti dan pinggiran. Dalam perkembangannya, semakin terlihat bahwa sebagian besar alasan pemekaran daerah bertujuan politis untuk beberapa partai politik dan elite lokal dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Akhirnya banyak daerah pemekaran yang menjadi miskin dan membebani pemerintah pusat sehingga tujuan pemekaran agar suatu daerah menjadi daerah otonom tidak tercapai. Data penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa 85% daerah kabupaten/kota dan provinsi hasil pemekaran di Indonesia gagal. Dari 173 daerah kabupaten/kota dan provinsi yang dimekarkan didapati data bahwa 76 diantaranya bermasalah yang berarti sekitar 85% persen hasil pemekaran gagal[2].

---

[2] Tribun Kaltim Online, 26 Desember 2007, dalam Zuhro-Peneliti LIPI. http://www.acehinstitute.org/id/index.php?view=article&catid=22%3Ademokratisasi-dan-transparansi&id=87%3Amemekarkan-aceh-sebuah-solusikah&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=34. *17 Juni 2010*

Dengan euforia otonomi daerah itu, beberapa daerah (provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan/desa) mengajukan tuntutan untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran provinsi, menjadi provinsi baru, berpisah dari induknya. Di Indonesia tercatat sejak tahun 1999 adalah (1) Maluku Utara, (2) Banten, (3) Kepulauan Bangka Belitung, (4) Gorontalo, (5) Irian Jaya Barat, (6) Kepulauan Riau, (7) Sulawesi Barat. Akibat dari pemekaran provinsi dan berbagai tuntutan lain dari daerah tertentu tidak dapat pula dihindari tuntutan pemekaran pada daerah tingkat daerah yang lebih rendah, yaitu kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan/desa[3].

Membaca fenomena ini maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. PP No. 129 Tahun 2000 yang selanjutnya direvisi menjadi PP No. 78 Tahun 2007, merupakan rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menyikapi keinginan masyarakat daerah untuk pembentukan daerah otonom baru, baik yang berupa pembentukan daerah maupun peningkatan status daerah.

Dalam rangka pemekaran wilayah tentunya perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti fungsi wilayah, kriteria fisik/lingkungan, ekonomi, dan social. Pertimbangan tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi disparitas pada wilayah yang dimekarkan, maupun wilayah hasil pemekaran. Adapun manfaat dasar pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :[4]

1. Pertimbangan fungsi wilayah digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara pusat – pusat pelayanan yang ada dan distribusi penduduk di dalam masing – masing kecamatan pada wilayah administrasi kabupaten/kota.
2. Pertimbangan kriteria fisik/lingkungan diperlukan untuk menilai potensi lahan dan ketersediaan sumbar daya lahan dalam kaitannya terhadap pembagian wilayah pemekaran yang bertujuan agar masing-masing wilayah hasil pemekaran dapat tumbuh dan berkembang.
3. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk mengetahui potensi ekonomi masing-masing wilayah pemekaran. Wilayah induk maupun wilayah-wilayah hasil pemekaran diharapkan mampu berperan sebagai pusat penggerak

[3] Dr. H.M, Said Saile, M.Si "Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia",Penerbit Restu Agung, Jakarta, 2008. Hal 3.

[4] Khairullah, Malik Cahyadin "Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia, Studi kasus : Kabupaten Lahat", Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Hal 261-262

pertumbuhan ekonomi bagi daerah di sekitarnya, guna meningkatkan kegiatan ekonomi baru, dan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat untuk memperbaiki kesejahteraannya.

4. Kriteria pertimbangan sosial diperlukan untuk mengetahui rentang kendali antar kecamatan, interaksi, dan aktivitas masyarakat. Bertujuan agar kecamatan yang jauh dari jangkauan fasilitas pelayanan dan pusat pemerintahan dapat diatasi dengan adanya wilayah administratif baru.

Dalam konteks pembentukan daerah otonom baru, keinginan dan kemauan masyarakat dari beberapa kecamatan dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota, yang mengusulkan untuk membentuk daerah otonom baru di antaranya didasari oleh beberapa faktor, antara lain *pertama* : pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. *Kedua* : tuntutan masyarakat yang sangat kuat di tingkat bawah (grassroot) untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah dengan cara memperpendek rentang kendali dan birokrasi yang harus dilalui dalam memperoleh pelayanan publik. *Ketiga* : keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Keempat : keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendapatkan kewenangan yang lebih besar dalam penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pengelolaannya secara transparan dan akuntable untuk meningkatkan pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melihat berbagai perkembangan kepemerintahan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki pulau yang cukup banyak, tentunya membutuhkan berbagai sumber daya yang banyak pula. Kalau dilihat dari letak Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka terdapat 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terletak di Pulau Timor, sedangkan 16 (enam belas) Kabupaten lainnya berada di luar Pulau Timor termasuk Kabupaten Sikka.

Kabupaten Sikka sebagai salah satu Kabupaten yang secara faktual mempunyai peran penting dalam perkembangan dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah-daerah di Pulau Flores, mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan, pertumbuhan dan pertambahan penduduk dan peningkatan infrastruktur daerah semakin pesat seiring dengan arus perkembangan. Maumere sebagai ibukota kabupaten yang mana menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Sikka dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap daerah-daerah/kabupaten lain di Pulau Flores Khususnya di mana Maumere memiliki pelabuhan laut yang besar dengan skala pelayanan mencakup seluruh daerah di Pulau Flores, dan bandara udara dengan intensitas penerbangan tertinggi di seluruh Bandar udara yang ada di Pulau Flores, hal ini dan beberapa alasan lain, seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan penduduk memposisikan Maumere sebagai ibu kota kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan cukup tinggi.

Secara administratif, Kabupaten Sikka berbatasan langsung dengan Kabupaten Ende, dan Kabupaten Flores Timur, dan dihubungkan oleh transportasi jaringan Jalan Arteri Primer yang berhubungan antara Kota Ende (Ibukota Kabupaten Ende), Kota Larantuka (Ibukota Kabupaten Flores Timur), Kota Bajawa (Ibukota Kabupaten Ngada) dan Kota Ruteng (Ibukota Kabupaten Manggarai). Di samping itu, Calon Kota Maumere juga merupakan Calon Kota yang membawahi 7 (tujuh) pulau di sekitar Calon Kota Maumere yang dibatasi oleh laut. Ketujuh pulau tersebut adalah Pulau Besar, Pulau Babibater, Pulau Kondo, Pulau Pariumaan, Pulau Pangabatang dan Pulau Koja.

Dengan melihat letak secara geografis tersebut di atas, maka suatu cara untuk mendekatkan berbagai pelayanan pemerintah adalah melalui pemekaran Kabupaten Sikka menjadi 2 (dua) daerah otonom yaitu Kabupaten Sikka (Kabupaten Induk) dan Kota Maumere.

Kabupaten Sikka sebagai salah satu Kabupaten yang secara faktual mempunyai peran penting dalam perkembangan dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah-daerah di Pulau Flores, mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan, pertumbuhan dan

pertambahan penduduk dan peningkatan infrastruktur daerah semakin pesat seiring dengan arus perkembangan. Maumere sabagai ibukota kabupaten yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Sikka dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap daerah-daerah/kabupaten lain di Pulau Flores, khususnya di mana Maumere memiliki pelabuhan laut yang besar dengan skala pelayanan mencakup seluruh daerah di Pulau Flores, dan bandara udara dengan intensitas penerbangan tertinggi di seluruh Bandar udara yang ada di Pulau Flores, hal ini dan beberapa alasan lain, seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan penduduk memposisikan Maumere sebagai ibu kota kabupaten yang mempunyai tingkat perkembangan cukup tinggi.

Beberapa perihal di atas dan adanya kemauan politik dari pemerintah daerah, serta keinginan masyarakat, dengan menilik berbagai pertimbangan sesuai dengan uraian kami di tentang otonomi daerah di atas, yang mendasari dan melatarbelakangi dilakukan sebuah kajian akademis dan yuridis untuk menilai kesiapan Maumere menjadi sebuah kota otonom yang terlepas dari Kabupaten induk, Kabupaten Sikka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang terkait dengan "Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom" sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kemampuan kependudukan, ekonomi, keuangan daerah, dan tingkat pelayanan publik di Calon Kota Maumere dalam penyelenggaraan otonomi daerah?
2. Bagaimana klasifikasi tingkat kesiapan Maumere menjadi kota otonom?

1.3. Tujuan dan Sasaran

Dalam sub bab ini akan dijabarkan tentang tujuan dari penelitian ini serta sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1.3.1. Tujuan

Dengan bertitik tolak pada perumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesiapan maumere menjadi kota otonom.

1.3.2. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah :

1. Terukurnya nilai kemampuan kependudukan, ekonomi, kemampuan keuangan dan tingkat pelayanan publik di kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah calon Kota Maumere dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Terukurnya nilai kesiapan Maumere menjadi kota otonom.

1.4. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini terdapat dua lingkup penelitian yang akan dibahas yaitu ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup lokasi digunakan untuk membatasi ruang kerja dalam suatu lokasi, sehinggga pekerjaannya lebih difokuskan pada lingkup-lingkup tertentu dan tidak keluar dari alur pekerjaan dan ruang lingkup materi merupakan teori yang digunakan untuk mencapai sasaran dalam suatu perencanaan.

1.4.1. Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi kajian dalam penelitian ini adalah lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, yang direncanakan masuk dalam calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Maumere yang direncanakan terdiri dari 5 kecamatan antara lain :

1. Kecamatan Alok
2. Kecamatan Alok Barat
3. Kecamatan Alok Timur
4. Kecamatan Nelle, dan
5. Kecamatan Kangae

Dan kabupaten induk yaitu Kabupaten Sikka dengan batas wilayah Kabupaten Sikka adalah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Sawu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ende
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Sikka terdiri dari 21 kecamatan termasuk 5 kecamatan yang masuk dalam wilayah calon Kota Otonom Maumere

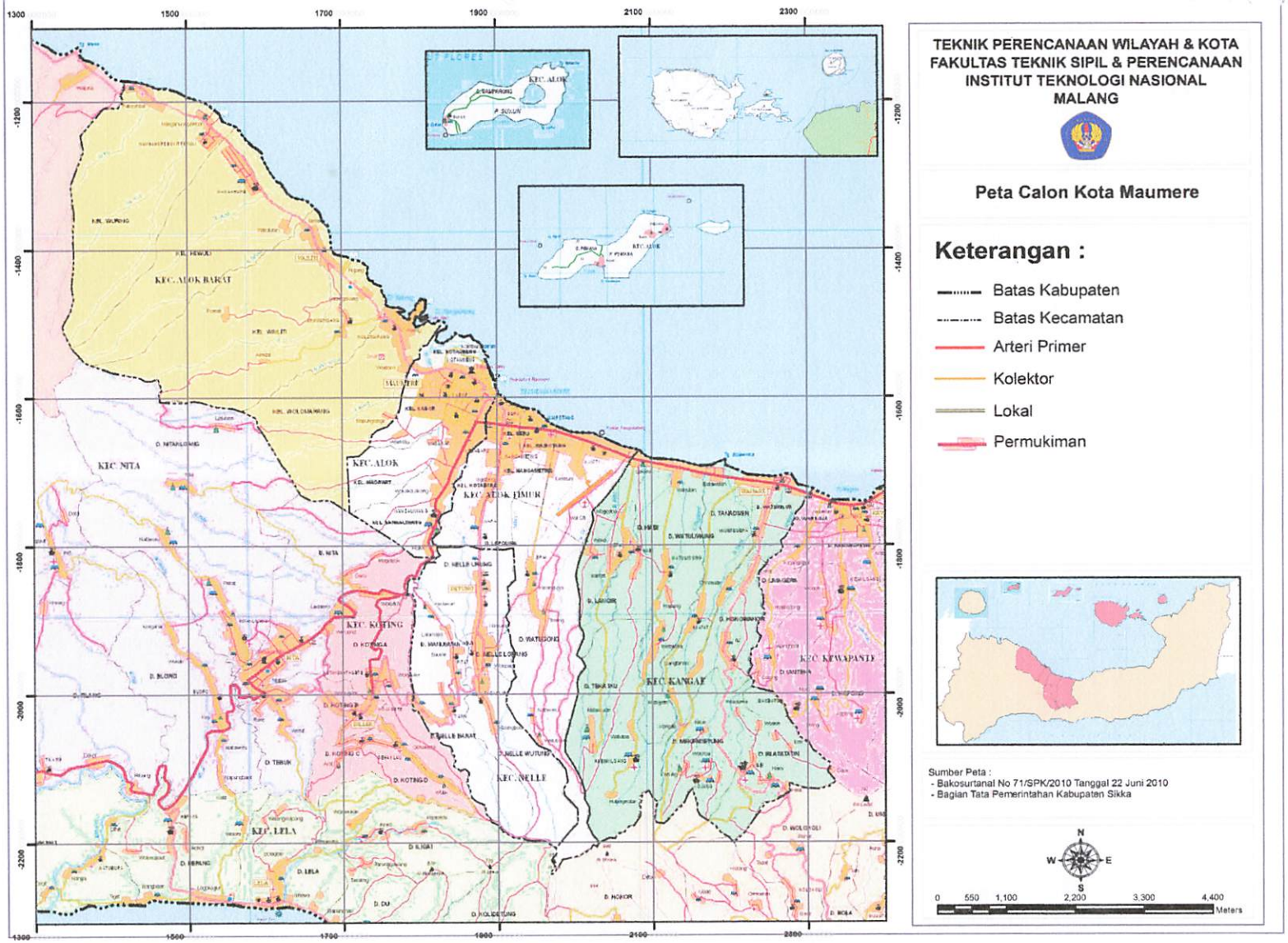

Peta 1.1. Peta Calon Kota Maumere

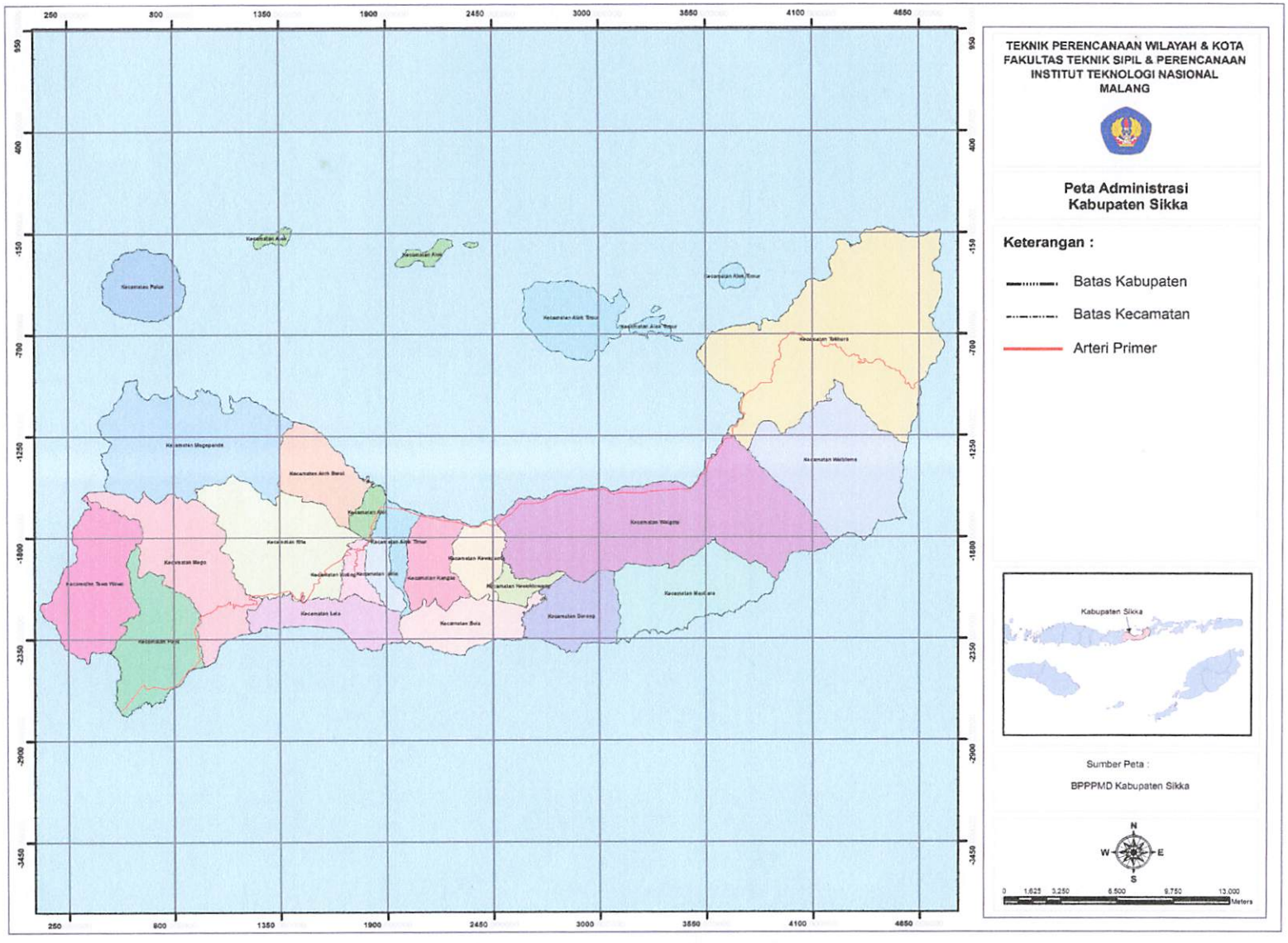

Peta 1.2. Peta Orientasi Lokasi (Kabupaten Sikka)

1.4.2. Ruang Lingkup Materi

Dalam penelitian ini materi yang akan dikaji adalah desentralisasi atau otonomi daerah dan beberapa faktor,serta indikator penilaian kesiapan pembentukan daerah otonom baru, yang dirasa mempunyai peran yang sangat signifikan dalam menunjang otonomi daerah yaitu :

1. Kependudukan
2. Perekonomian Daerah
3. Potensi daerah (Pelayanan Publik)
4. Kemampuan keuangan daerah

1.5. Tinjauan Pustaka Pemekaran Wilayah

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang peraturan perundang – undangan dan teori-teori yang mendukung dalam "Kajian Kesiapan Pembentukan Kota Maumere ", sebagai obyek penelitian. Tinjauan pustaka ini berisikan tentang konsep, defenisi, karakteristik, variabel dan tolok ukur dari kesiapan pembentukan sebuah kota administratif

Sesuai dengan tema yang diambil yaitu "Kajian Kesiapan Pembentukan Kota Maumere", maka pada sub bab ini dirasa perlu untuk dirumuskan beberapa hal yang berkaitan dengan pemekaran wilayah khususnya pembentukan kota sebagai perwujudan dari otonomi daerah. Antara lain, definisi pemekaran wilayah, syarat-syarat, bentuk serta konsep pemekaran wilayah, dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan kota otonom.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakat itulah yang dinamakan dengan desentralisasi atau otonomi daerah.

Pemekaran wilayah merupakan pembentukan wilayah baru dari suatu wilayah administratif, sebagai suatu proses penyelenggaraan desentralisasi dan

atau otonomi daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mewujudkan keinginan masyarakat dan pemerintah daerah itu sendiri untuk mengelolah potensi daerah, efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Pemekaran wilayah berupa pembentukan daerah otonom baru, yang mana menurut peraturan pemerintah no. 78 tahun 2007 bab II, pembentukan daerah dapat berupa daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, yang mana pada ayat ke (2) pembentukan daerah kabupaten/kota merupakan pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih.

Kata desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu obat mujarab dan malah mengandung suatu nilai *dogmatis* dalam memecahkan masalah-masalah hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dianggap sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintahan mengandung makna demokratisasi pemerintahan.

Desentralisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membagi kekuasaan *(division of power)*. Pembagian kekuasaan secara teoritis dapat dilakukan melalui dua cara yaitu : *capital division of power* dan *area division of power. Capital division of power,* merupakan pembagian kekuasaan sesuai dengan ajaran *trias politica* dari Montesque, yaitu membagi kekuasaan untuk melaksanakan undang – undang *(eksekutif)*, kekuasaan untuk membuat undang – undang *(legislatif),* dan kekuasaan kehakiman *(judikatif)*. Sedangkan areal *division of power* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : *desentralisasi* dan *dekosentrasi. Desentralisasi* merupakan penyerahan kekuasaan secara legal (yang dilandasi hukum) untuk melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi tersisa kepada otoritas lokal yang secara formal diakui oleh konstitusi (Maddick, 1963 dalam Democrazy, Decentralitation, and Development, Bombay: Asian Publishing House). Sedangkan *dekosentrasi* merupakan pendelegasian kekuasaan untuk

melaksanakan fungsi – fungsi tertentu kepada staf pemerintah pusat yang berada di luar kantor pusat (Maddick, 1963)[5].

Desentralisasi melahirkan penguatan baik dalam bidang finansial maupun legal (dalam arti mengatur dirinya sendiri, mengambil keputusan) dari unit – unit pemerintahan daerah. Dengan desentralisasi maka aktivitas – aktivitas yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara substansial diserahkan kepada unit-unit pemerintah daerah, dan dengan demikian berada di luar kontrol pemerintah pusat. Karakteristik utama dari desentralisasi adalah [6]: *Pertama*, adanya unit – unit pemerintahan lokal yang otonom, independen, dan secara jelas dipersepsikan sebagai tingkat pemerintahan yang terpisah dengan mana otoritas yang diberikan kepadanya dengan hanya sedikit atau malah tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat. *Kedua*, pemerintah lokal yang memiliki batas-batas geografis yang jelas dalam mana mereka melaksanakan otoritas dan memberikan pelayanan publiik. *Ketiga*, pemerintah lokal yang memiliki status sebagai koeporat, dan memiliki kekuasaan untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya.

Dengan demikian desentralisasi melahirkan daerah otonomi. Daerah otonomi itu sendiri memiliki beberapa ciri, di antaranya adalah berada di luar hirarki organisasi pemerintah pusat, bebas bertindak, tidak berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat, mengandung integritas sistem, memiliki batas-batas tertentu (*boundaries*), serta memiliki identitas.

Dari tujuan administratif, menurut Maddick (1963)[7] rasional keberadaan pemerintah daerah adalah untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam aktivitas-aktivitas perencanaan, pengambilan keputusan, pengadaan pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan melalui desentralisasi. Tidak ada pemerintah pusat dari suatu negara yang besar yang dapat secara efektif menentukan apa yang harus dilakukan dalam semua aspek kebijakan publik. Demikian pula tidak ada pemerintah pusat yang dapat secara efektif mengimplementasikan kebijakan dan

---

[5] Maddick, H.,(1963),Democrazy, Decentralitation, and Development, Bombay: Asian Publishing House.
[6] Ibid
[7] Ibid.

program-programnya ke seluruh daerah secara efisien[8]. Karena itu diperlukan unit-unit pemerintahan di tingkat lokal yang kemudian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu baik atas dasar prinsip devolusi (di Indonesia dikenal dengan prinsip desentralisasi) maupun atas dasar prinsip dekonsentrasi.

Dua jenis pilihan tersebut (*desentralisasi* dan *dekonsentrasi*) tersebut akan memiliki implikasi yang sangat berbeda satu sama lain dalam penerapannya. Meskipun ada kecenderungan pemerintah berbagai Negara di dunia untuk mengkombinasi kedua pilihan tersebut secara seimbang, namun tetap saja terdapat kecenderungan bahwa prinsip yang satu selalu lebih besar dari prinsip yang lain. Pendulum desentralisasi atau dekonsentrasi akan selalu bergerak kedua sisi tergantung dari kebijakan politik dari elit pemerintah suatu Negara. Namun demikian secara empiris terlihat bahwa Negara dengan tingkat ekonomi dan politik yang relatif mapan cenderung untuk lebih menerapkan prinsip desentralisasi daripada dekonsentrasi (Suwandi & Ikhsan, 1998 dalam Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan).

Secara umum terdapat berbagai alasan mengapa desentralisasi merupakan suatu pilihan dalam sistem pemerintahan negara-negara di dunia. *Pertama,* adanya anggapan bahwa desentralisasi pemerintahan mencerminkan pengelolaan aspek-aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari secara lebih demokratis. Melalui desentralisasi pemerintahan, rakyat daerah diberi kesempatan yang lebih besar untuk menentukan keinginannya, karena mereka memang dianggap lebih mengetahui apa yang mereka inginkan dan keadaan daerahnya sendiri. Dengan demikian merekalah yang dianggap paling pantas untuk menentukan kebijaksanaan pembangunan daerahnya. Pada negara berkembang, pemerintah daerah dianggap mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat daerah dalam proses pembangunan. *Kedua*, karena adanya berbagai alasan teknis yang dapat dilihat dari berbagai segi seperti segi ekonomis, geografis, etnis, budaya, dan sejarah. Panjangnya jalur birokrasi yang harus

[8] Bowman, M and Hampton, W.,(1983). Lokal Democraties : A Study in comparative Lokal Government, Melbourne: Longman.

ditempuh, mulai dari perencanaan pembangunan, maupun pelaksanaan, membuat system pemerintahan yang terdesentralisasi dinilai jauh lebih efisien. Hal ini karena dengan desentralisasi dapat dilakukan pemotongan sejumlah jalur birokrasi yang panjang dan tidak perlu. Dengan demikian desentralisasi dapat mengurangi adanya *overload* (kelebihan beban) dan *congestion* (pemusatan) administrasi dan komunikasi di tingkat pusat.[9]

Berbagai studi telah dilakukan mengenai desentralisasi, studi Bank Dunia terhadap 45 negara di dunia ketiga pada decade 1960-an (dalam Rondinelli, 1983; Sidik 1994, Sidik 2000) menunjukan bahwa tingkat desentralisasi berhubungan dengan berbagai faktor seperti : a*) umur negara*, semakin tua dan semakin mapan pula suatu negara; b) besarnya *Produk Nasional Kotor (PNB)*, semakin besar Produk Nasional Kotor suatu Negara, semakin tinggi tingkat desentralisasinya; c) *media massa,* semakin tersebar luas media massa di suatu negara, semakin tinggi tingkat desentralisasi negara tersebut; d) *tingkat industrialisasi,* negara-negara dengan tingkat industrialisasi yang relative tinggi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi pula; dan e) *jumlah pemerintah daerah*, Negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi pula. Hasil studi yang menunjukan hubungan positif kelima faktor di atas dengan desentralisasi memperlihatkan bahwa faktor perkembangan sosial ekonomi negara mempengaruhi tingkat desentralisasi.

Pelaksanaan desentralisasi dipengaruhi oleh berbagai hal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi adalah : *pertama,* derajat komitmen politik serta dukungan administratif yang diberikan terutama oleh pemerintah pusat, dan oleh elite serta masyarakat daerah itu sendiri. *Kedua,* adanya sikap dan perilaku serta kondisi cultural yang mendukung atau mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah. *Ketiga,* adanya suatu rancangan organisasi yang dapat mendukung program-program desentralisasi. Dan *keempat,* tersedianya sumber keuangan, tenaga kerja, serta infrastruktur yang memadai bagi penyelenggaraan program-program desentralisasi.

---

[9] Bowman, M and Hampton, W.,(1983). Lokal Democraties : A Study in comparative Lokal Government, Melbourne: Longman.

Paradigma otonomi daerah muncul seiring dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah dimana menjatuhkan era sentralitas. Secara sederhana otonomi daerah didefinisikan sebagai *a freedom which is assumed by a local government in both making and implementating its own decisions* (Manwwod P 1987 dalam "Dilema Otonomi Daerah" Sudantoko 2003). Dalam konteks Indonesia didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagai penyempurnaan atas dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999, maka disusunlah UU baru demi melengkapi UU yang telah ada terkait Pemerintahan Daerah yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 dan yang lebih dikenal dengan UU otonomi. Otonomi dalam UU 32 Tahun 2004 menggambarkan tenang kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan[10].

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004).

Otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Otonomi daerah sebagai salah satu paradigma pembangunan sarat dengan permasalahan dalam setiap pelaksanaannya.[11] Namun ditengah permasalahan yang timbul, otonomi dirasa memberikan pemikiran positif dalam konteks pengembangan wilayah. Terdapat beberapa dampak positif pemberlakukan otonomi yaitu [12]:

---

[10] H. Djoko Sudantoko, "Dilema Otonomi Daerah", Penerbit : Andi, Yokyakarta, 2003

[11] Prof, Drs, H. A. W . Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.

[12] H. Djoko Sudantoko, "Dilema Otonomi Daerah", Penerbit : Andi, Yokyakarta, 2003

1. Otonomi memungkinkan terlaksananya *bottom up planning* secara signifikan.
2. Otonomi daerah mengikis rantai birokrasi yang dirasakan menghambat pelayanan kepada masyarakat.
3. Otonomi juga akan dapat meberdayakan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembangunan sehingga pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan di daerahnya.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Prof, Drs, H. A. W . Widjaja berpendapat bahwa tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah [13]:

1. Menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menumbuhkan kemandirian daerahdan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Penerapan otonomi membuat pemerintah daerah sangat aktif dalam menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Semakin besar kemampuan daerah membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, maka daerah tersebut mempunyai kapasitas yang makin besar dalam mengembangkan program-program pembangunan rakyat diwilayahnya. Diharapkan otonomi daerah menjadi langkah demi mewujudkan kemandirian wilayah berbasis pemberdayaan lokal.

Dalam undang-undang 22/1999 pemberi kewenangan otonomi daerah kepada daerah Kabupaten, dan daerah Kota, didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan betanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.

---

[13] Prof, Drs, H. A. W . Widjaja, Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daeah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadian, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia[14].

Secara teoritis, pemberian otonomi kepada daerah dilatarbelakangi oleh tujuan politik, maupun administratif yang ingin dicapai oleh pemerintah suatu Negara. Tujuan politik dari pemberian otonomi daerah adalah untuk menciptakan kesadaran masyarakat sipil (civil consciousness) dan kedewasaan politik (political maturity) masyarakat melalui pemerintah daerah[15]. Penyebaran kedewasaan politik dapat dilakukan melalui partisipasi masyarakat dan melalui pemerintahan yang responsif yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal ke dalam kebijakan yang diambil dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Senada dengan itu, Lughlin (1981) mengemukakan bahwa system pemerintahan daerah diperlukan untuk mengakomodasi pluralisme dalam suatu Negara modern yang demokratis. Smith (1985) juga mengemukakan bahwa keberadaan pemerintah daerah diperlukan untuk mencegah munculnya kecenderungan centrifugal yang terjadi karena adanya perbedaan etnis, agama, dan unsu-unsur primordial lainnya di daerah-daerah.

Indikator Pemberian Otonomi Daerah adalah merupakan variabel-variabel pokok, penunjang dan khusus seperti berikut[16] :

A. Variabel pokok terdiri dari :
   1. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Keuangan

---

[14] Deddy Supriady Bratakusuma, Ph.D dan Dadang Solihin, MA "Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. Hal 4.

[15] Maddick, H.,(1963), Democrazy, Decentralitation, and Development, Bombay: Asian Publishing House

[16] HAW. Widjaja, Prof. Drs. "Titik Berat Otonomi TK II. Rajawali Pers, 2003. Hal 39

2. Kamampuan Aparatur
3. Kemampuan Partisipasi
4. Kemampuan Ekonomi
5. Kemampuan Demografi
6. Kemampuan Organisasi dan Administrasi

B. Variabel penunjang yang terdiri dari :
1. Faktor Geografis
2. Faktor Sosial Budaya

C. Variabel khusus yang terdiri dari
1. Sosial Politik
2. Pertahanan dan Keamanan
3. Penghayatan Keagamaan

Variabel-variabel tersebut diukur melalui berbagai indikator. Melalui pengukuran ini akan diketahui kemampuan untuk berotonomi masing-masing daerah tingkat II di seluruh Indonesia.

Pengkajian atau analisis berbagai aspek dalam pembentukan daerah otonom baru yang bersifat otonom (yang berasal dari pemekaran) didasarkan pada kebijakan pemerintah yang tertuang baik pada UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Sesuai dengan syarat teknis, dalam pasal 3 PP No. 78 tahun 2007 mengemukakan bahwa daerah dibentuk berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kemampuan ekonomi
2. Potensi daerah
3. Sosial budaya
4. Sosial politik
5. Kependudukan
6. Luas daerah
7. Pertahanan
8. Keamanan
9. Kemampuan keuangan
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat
11. Rentang kendali bagi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : [17]

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

[17] Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007, BAPPENAS bekarja sama dengan United Nation Development Programme (UNDP)

2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban;
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dua hal penting berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah: *pertama*, bagaimana pemerintah melakukannya, dan *kedua*, bagaimana dampaknya di masyarakat dan daerah itu sendiri setelah pemekaran tersebut berjalan selama lima tahun. Untuk pendekatan pertama maka aspek yang dikaji adalah sejauhmana 'input' yang dimiliki oleh pemerintah daerah pemekaran dapat digunakan semaksimal mungkin dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator evaluasi pada tahap input pemerintah daerah ini ialah keuangan pemerintah daerah dan aparatur pemerintah daerah. Kedua sumberdaya tersebut sangat dominan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui enam cara di atas akan sulit direalisasikan tanpa adanya keuangan dan aparatur yang melaksanakannya.

Sedangkan pendekatan kedua ialah melihat kondisi yang diterima oleh daerah dan masyarakat secara langsung, baik melalui adanya dampak langsung pemekaran daerah maupun adanya perubahan sistem pemerintah daerah. Oleh karena itu evaluasi 'output' akan difokuskan kepada aspek kepentingan utama masyarakat dalam mempertahankan hidupnya, yakni dari sisi ekonomi. Apabila kondisi ekonomi masyarakat yang terjadi pada masa pemekaran semakin membaik maka secara tidak langsung berpengaruh kepada akses masyarakat terhadap pelayanan publik, baik pendidikan maupun kesehatan. Di sisi lain, pelayanan publik juga mencerminkan sejauhmana kemampuan pemerintah daerah meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kondisi secara umum daerah itu sendiri.

Dengan dasar pemikiran di atas, maka dirumuskan kerangka konseptual evaluasi pemekaran daerah yang difokuskan pada empat aspek utama, yakni (a) kependudukan (b) perekonomian daerah, (c) keuangan daerah, serta (d) pelayanan

publik. Meskipun banyak aspek lain yang penting untuk dievaluasi namun karena keempatnya sangat strategis dalam penentuan arah kebijakan pada fase 5 tahun setelah pemekaran maka pembatasan fokus evaluasi ini penting untuk dilakukan. Keempat fokus evaluasi ersebut saling terkait satu sama lain. Secara teoritis, pemekaran daerah mendorong lahirnya pemerintahan baru. Untuk menggerakkannya, dibutuhkan penduduk sebagai obyek pembangunan dan pelaksana pembangunan, Dalam tugas menjalankan fungsi kepemerintahan, aparatur berwenang untuk mengelola keuangan yang ada agar dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pelayanan publik serta mendorong perekonomian daerah. Hal ini harus dilakukan baik melalui belanja aparatur maupun belanja modal. Pada akhirnya hal ini akan kembali kepada siklus keuangan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi maupun kembali ke masyarakat melalui pelayanan publik yang diterimanya.

A. Faktor Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain : jumlah, komposisi, tingkat kepadatan, dan laju pertumbuhan penduduk. Penduduk merupakan faktor utama yang menentukan ukuran pemerintah daerah. Keadaan geografis suatu wilayah akan menetukan karakteristik masyarakat, mata pencaharian maupun budayanya. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peluasan permukiman yang berimplikasi pada aspek ekonomi, politik, administrasi, maupun cakupan wilayah kerja pemerintah daerah.

Sebuah daerah dapat memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi kota apabila terpenuhi indikator kependudukan yang terbagi dalam sub indikator dengan tolok ukur sebagi berikut :

a. Jumlah penduduk di atas rata-rata atau sama dengan (≥r positif) jumlah penduduk kecamatan di kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya atau jumlah penduduk kota-kota pembanding (PP No.78 Tahun 2007).

b. Kepadatan penduduk di atas rata-rata (≥r positif) kepadatan penduduk kecamatan di kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya, atau kepadatan penduduk kota-kota pembanding (PP No.78 Tahun 2007)
c. Kepadatan penduduk per kilo meter persegi sebanyak 5000 orang untuk sebuah kota (BPS), dan atau ≥ 50 jiwa/ha (Hasil penelitian Universitas Padjajaran (2000)).

B. Faktor Kemampuan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisis kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), baik atas dasar harga berlaku, maupun dasar harga konstan (Tarigan, 2004; Sugiana,2001). Dari PDRB tersebut dapat dianalisis potensi perekonomian suatu wilayah.

Indikator PDRB digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah (baik pemerintah maupun masyarakatnya) dalam menggali dan memanfaatkan seluruh sumber daya atau faktor produksi *(input)* yang ada di daerah menjadi *output* (produk-produk barang dan jasa). Besaran PDRB suatu daerah juga menggambarkan daya saing suatu daerah terhadap daerah lainnya. Angka PDRB juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktvitas perekonomian yang terjadi pada suatu daerah pada periode tertentu telah menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat (Susanti dkk, 1995). Indikasi tersebut tersirat dari pertumbuhan out put karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa *(output)* yang pada gilirannya nanti akan menghasilkan aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian adanya pertumbuhan output diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat selaku pemilik faktor-faktor produksi tersebut. Suatu perekonomian dinamakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor – faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada sebelumnya. Lebih jauh, untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka

pertumbuhan ekonomi harus dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Sedangkan PDRB non migas per kapita adalah nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Adapun pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan dari suatu periode/tahun terhadap periode/tahun sebelumnya.

Sementara itu, kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antar wilayah (daerah) dapat dianalisis dengan menggunakan metode Indeks Williamson (IW). Untuk menghitung indeks kesenjangan ekonomi antar wilayah didasarkan atas PDRB per kapita, atas dasar harga konstan pada kurun waktu tertentu. PDRB atas dasar harga konstan dijadikan variabel perhitungan karena menunjukan nilai riil. Kriteria pengukuran kesenjangan ekonomi antar daerah berdasarkan metode IW adalah antara nol dan satu. Jika nilai IW mendekati nol berarti terjadi pemerataan antar daerah (kecamatan). Hasilnya jika nilai IW mendekati satu menunjukan bahwa terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan.

Fokus kinerja ekonomi untuk mengukur mengukur sejauh mana kinerja ekonomi daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah atau pembentukan daerahotonom baru. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah:

1. Pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI)
   Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.
2. PDRB per kapita (WELFI)
   Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
3. Rasio PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi (ESERI)
   Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Semakin besar perannya dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.

4. Angka kemiskinan (POVEI)

   Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yandiukur menggunakan head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk.

   Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten/kota otonomi di tahun t.

C. Faktor Kinerja Pelayanan Publik

Pembentukan suatu daerah otonom salah satunya perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi berupa sarana dan prasarana fisik, maupun potensi yang berupa kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan potensi-potensi tersebut saat ini *(existing condition)* dapat dianggap sebagai modal dasar bagi daerah yang akan dibentuk.

Potensi daerah dapat dibedakan menjadi potensi yang bersifat alamiah, dan potensi yang bersifat buatan. Potensi alamiah terdiri potensi sumber daya alam (SDA), dan potensi sumber daya manusia (SDM). Potensi sumber daya alam meliputi seluruh bumi, air, dan seluruh kekayaan alam lainnya beserta apa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan potensi sumber daya manusia meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, baik aspek fisik maupun non fisik. Sementara potensi sumber daya buatan meliputi seluruh hasil usaha dan kemampuan manusia baik berupa teknologi, sarana dan prasarana, produk maupun yang berupa institusi atau organisasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Atas dasar itu identifikasi potensi daerah memiliki cakupan yang sangat luas, meliputi potensi tanah beserta seluruh kandungan isinya termasuk letaknya, kesuburannya, serta bahan-bahan tambang dan mineral yang terdapat di dalam dan di atasnya, potensi sumber daya manusia yang mencakup seluruh aspek yang menetukan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik dari segi fisik, maupun non fisik, serta potensi sumber daya buatan yang berupa berbagai sarana dan prasarana, teknologi, dan organisasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Faktor potensi daerah berpengaruh pada kinerja pelayanan publik, dimana akan difokuskan kepada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Namun harus diingat bahwa dalawaktu yang relatif singkat (5 tahun setelah pemekaran) bisa jadi perubahan berarti dalam keluaran (outcome) kinerja pelayanan publik ini belum akan terlihat. Karena itu indikator kinerja pelayanan publik yang dirumuskan di studi ini akan lebih menitikberatkan kepada sisi input pelayanan publik itu sendiri. Indikator yang akan digunakan ialah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam pelayanan publik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 disebutkan permasalahan bidang pendidikan di Indonesia antara lain adalah fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi yang belum tersedia secara merata, serta ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemekaran daerah memungkinkan pemerintah memperbaiki pemerataan fasilitas pendidikan baik tingkat dasar maupun lanjutan serta memperbaiki ketersediaan tenaga pendidik yang memadai melalui peran pemerintah daerah. Dengan rentang kendali yang lebih pendek dan alokasi fiskal yang lebih merata seyogyanya menjadi modal dasar peningkatan pelayanan bidang pendidikan di setiap daerah, khususnya daerah pemekaran. Secara umum dapat dikatakan bahwa daerah otonom baru (DBO) memiliki daya tampung sekolah yang lebih rendah dibandingkan kelompok sampel

lainnya. Hal ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan SLTP maupun untuk jenjang pendidikan SLTA. Terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara daya tampung sekolah di DOB dan daerah lainnya.

Indikator ini sejatinya mengandung dua makna yang krusial. Pertama adalah ketersediaan sekolah dan kedua adalah partisipasi masyarakat. Jika rendahnya indikator ini lebih disebabkan oleh pertambahan sekolah yang tidak dapat mengimbangi pertambahan siswa, maka permasalahannya adalah ketersediaan sekolah yang kurang memadai. Dengan kata lain, diperlukan lebih banyak lagi sekolah. Namun jika rendahnya indikator ini lebih disebabkan oleh rendahnya pertambahan penduduk usia sekolah dasar yang bersekolah dibandingkan dengan pertambahan sekolah, maka permasalahannya adalah partisipasi atau kesadaran masyarakat. Walaupun diperlukan kajian yang lebih lanjut, namun yang jelas bahwa di daerah pemekaran indikator ini belum pada tingkat yang optimal.

Ketersediaan tenaga pendidik merupakan elemen penting keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Rasio jumlah siswa per guru memiliki pengaruh terhadap efektifitas proses belajar mengajar di sekolah dan lebih jauh lagi terhadap upaya meningkat kualitas sumber daya manusia di daerah. Perkembangan indikator ini.

2. Kesehatan

Di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan diukur dengan jumlah fasilitas kesehatan tiap 10.000 orang penduduk. Ukuran jumlah penduduk yang digunakan untuk lebih mengarahkan ketersediaan fasilitas kesehatan pada tingkat kecamatan. pemekaran daerah seharusnya secara nyata mendorong pemerataan pelayanan kesehatan terutama di bidang sarana fisik. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN) di mana disebutkan bahwa kebijkan bidang kesehatan diarahkan salah satunya untuk meningkatkan dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa selain kuantitas fasilitas kesehatan, masalah

kualitas fasilitas kesehatan juga ditekankan untuk dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang kesehatan.

Dalam konteks desentralisasi bidang kesehatan, pemerintah daerah memainkan peranan tersendiri. Pemerintah daerah berperan dalam menentukan dan mengarahkan peningkatan jumlah dan pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan di daerahnya, terutama di daerah-daerah tertinggal. Beberapa daerah pemekaran yang ada merupakan daerah tertinggal yang di dalamnya memiliki wilayah kecamatan yang masih minim oleh pelayanan kesehatan.

3. Kualitas Infrastruktur

Selain pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang krusial dalam pembangunan daerah. Infrastruktur tidak saja memainkan peranan dalam kegiatan ekonomi tetapi juga kegiatan lainnya yang turut menunjang pembangunan, baik kegiatan pemerintah yang bersifat adminsitratif, kegiatan pelayanan publik yang bersifat publik serta menjadi satu instrumen untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya. Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik terhadap total panjang ruas jalan.

4. Indeks Kinerja Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan satu hal yang erat kaitannya dengan pemekaran daerah. Diharapkan dengan pemekaran daerah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan publik termasuk bidang kesehatan dan pendidikan. Dari sini jelas bahwa pembangunan fasilitas publik di satu sisi seyogyanya dibarengi oleh peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan itu sendiri sehingga dapat secara optimal dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

D. Faktor kemampuan keuangan

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 1998: 124). Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga adalah kemampuan self-supporting dalam bidang keuangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Insukindro dkk. (1994: 1) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah daerah. Pada prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah daerah.

Parameter keuangan daerah yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. DOF (Derajat Otonomi Fiskal)

   DOF adalah Besar kecilnya kemampuan keuangan suatu daerah dalam memberikan suatu kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah.

2. RDAU (Rasio Dana Alokasi Umum)

RDAU adalah Tingkat penyaluran dana yang harus di alokasikan pemerintah pusat kepada suatu daerah guna menunjukan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintah.

3. Indek Kemampuan Rutin (IKR)

   IKR adalah Suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan dalam potensi suatu daerah dalam membiayai belanja rutin.

4. Rasio Ketergantungan

   Rasio ketergantungan adalah Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana bantuan dari pemeritah pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber dana potensi lokal yang terkandung di dalamnya.

Rumus perhitungan untuk parameter-parameter di atas berdasarkan pada Manual Administrasi Keuangan Daerah dari Departemen Dalam Negeri tahun 1991.

Jadi pemekaran wilayah merupakan kesiapan suatu daerah untuk menyelenggarakan desentralisasi atau otonomi daerah melalui pembentukan derah administrative baru yang mempuang kemampuan dalam bidak kependudukan, bidang ekonomi, keuangan, dan memiliki potensi daerah yang berimbas pada kualitas pelayanan publik.

1.6. Landasan Teori

Dalam sub bab ini akan dijabarkan teori – teori yang berkaitan pembangunan dan pengembangan wilayah, pemerintah daerah, otonomi daerah atau desentralisasi, dan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemekaran wilayah.

1.6.1. Teori Pembangunan Ekonomi[18]

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata yang ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Namun lebih dari itu, pembangunan memiliki perspektif yang luas, seperti dimensi sosial yang justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, pembangunan juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomiaaan ke arah yang lebih baik.

Model pertumbuhan lancar telah mendominasi perkembangan teori pembangunan yang dikemukakan Adam Smith, Karl Marx dan Rostow. Dasar pemikiran dari model ini adalah evolusi proses pembangunan yang dialami oleh suatu negara selalu melalui tahap-tahap tertentu. Tahapan tersebut merupakan proses urutan, artinya mutlak harus dilalui oleh suatu negara yang sedang membangun, satu-persatu secara berurutan menuju tingkat yang semakin tinggi

Pelaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan ekonomi, sosial, politik yang lebih baik dimasa mendatang. Oleh karena itu dalam melakukan perencanaan pembangunan harus bertitik tolak pada permasalahan pembangunan baik yang mendukung lajunya pembangunan maupun yang menghambat pembangunan sehingga dapat disusun suatu strategi pembangunan nasional atau pembangunan daerah.

Strategi pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah oleh karena itu diterapkan otonomi daerah (Amin Pujiati; 2008)[19].

---

[18] Emelia Berti, Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 Di kabupaten lampung timur, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yokyakarta, 2006.

[19] Y.M. Marbun. Ketimpangan dan Otonomi Daerah. Universitas Sumatra Utara. 2010

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan (Amin Pujiati; 2008).[20]

Seberapa yang diterima oleh tiap daerah sebenarnya sangat berkaitan dengan masalah merata atau tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Oleh karenanya pemerataan pendapatan adalah masalah yang penting dalam pembangunan. Tambunan (2001) menyatakan bahwa pada dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an Indonesia menikmati laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi dengan tingkat kesenjangan yang semakin besar. Begitu juga halnya dengan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara pada tahun 1985 hingga tahun 2004 relatif tinggi tetapi pertumbuhan tersebut diiringi dengan ketimpangan antar wilayah yang semakin besar. Model pembangunan ekonomi di Sumatera Utara bukan mengacu pada pemerataan pembangunan yang semakin baik (Sirojuzilam,2007).

1.6.2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan teori Rostow di atas, pada saat ini negara Indonesia termasuk dalam tahap tinggal landas. Untuk mencapai tahapan selanjutnya, maka salah satu langkah yang diambil adalah dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Berikut ini akan dijelaskan lebih jauh mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu:

---

[20] Ibid

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah guna pelaksanaan asas desentralisasi menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun segi pembiayaan dan perangkat.

b. Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Dalam asas dekonsentrasi, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepada daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat. Kebijaksanaan atas pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.

c. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban memberikan laporan dari hasil pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Untuk menetapkan bidang yang menjadi urusan dan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka dapat diterapkan sistem pembagian antara lain [21] :

a. Sistem Residu

Secara umum tugas-tugas yang menjadi wewenang pemerintah pusat ditentukan terlebih dahulu, sedangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.

b. Sistem Material

Tugas-tugas pemerintah daerah ditetapkan satu per satu secara limitatif atau terinci, dan di luar dari tugas yang telah ditentukan merupakan urusan pemerintah pusat.

c. Sistem Formal

Urusan yang termasuk dalam rumah tangga daerah tidak secara apriori ditetapkan di dalam perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya. Tetapi tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

d. Sistem Otonomi Riil

Penyerahan urusan, tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

---

[21] Emelia Berti, Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 Di kabupaten lampung timur, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yokyakarta, 2006

e. Prinsip Otonomi Nyata, Dinamis dan Bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan salah satu variasi dari sistem otonomi riil dimana penyerahan urusan-urusan kepada daerah dilakukan secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

1.6.3. Otonomi Daerah

1.6.3.1. Arti Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu outus yang berarti sendiri dan nomos berarti undang-undang. Menurut perkembangan sejarah pemerintahan di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundang-undangan juga mengandung arti pemerintahan atau perundang-undangan sendiri (Pamudji, 1982: 45).[22]

Sesuai dengan Pasal 1 butir (h) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri atau aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan bagi pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan itu, maka kepada daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Menurut Tim Fisipol Universitas Gadjah Mada (1991: 17)[23], terdapat empat unsur otonomi daerah, yaitu:

a. Memiliki perangkat pemerintah sendiri yang ditandai dengan adanya Kepala Daerah, DPRD, dan Pegawai daerah;

---

[22] Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003), Jend.(HOR) SB. Yudhoyono, MA. Prosumen (PKPEK) dengan FORKOMA-MAP, UGM, 2002

[23] Emelia Berti, Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 Di kabupaten lampung timur, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yokyakarta, 2006

b. Memiliki urusan rumah tangga sendiri yang ditandai dengan adanya dinas-dinas daerah;
c. Memiliki sumber keuangan sendiri yang ditandai dengan adanya pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah dan pendapatan dinas-dinas daerah;
d. Memiliki wewenang untuk melaksanakan inisiatif sendiri (di luar dari instruksi dari pemerintahan pusat atau atasan) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Seluruh kekhasanah politik dan pemerintahan di Indonesia, termasuk manajemem pemerintahan daerah, membicarakan mengenai otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal yang harus menitik beratkan adanya kewenangan. Dengan kewenangan yang dimiliki, akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.

Meskipun tidak dapat ditolak bahwa penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah diperlukan adanya keuangan yang cukup memadai. Hal ini dapat terjadi suatu polemik "apa artinya kewenangan apabila tidak ada uang atau sebaliknya apa artinya memiliki uang kalau tidak memiliki kewenangan".

Kewenangan menjadi central issues dalam pelaksanaan otonomi karena untuk mengembalikan kekuasaan dari tangan penguasa kepada kedaulatan rakyat. Di samping itu, untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Selama beberapa tahun yang lalu, kewenangan belum pernah dirasakan dan dipegang oleh daerah, sehingga tidaklah mengherankan apabila di era reformasi sering terjadi adanya euphoria yang berlebihan ataupun juga *defence mechanism* yang terlalu ketat padahal kewenangan belum secara nyata dilimpahkan.

1.6.3.2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Agar dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menitik beratkan pada Daerah Tingkat II sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan

Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai prinsip sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah.
b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan untuk propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada bagi wilayah administrasi.
f. Pelaksanaanh otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
g. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa peranan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah cukup besar. Terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat,

akan tetapi masih tetap dalam kerangka memperkokoh negara kesatuan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami oleh setiap aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan pemerintah pusat sebagai perumus kebijaksanaan.

1.6.3.3. Keberhasilan Otonomi Daerah

Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199)[24] menegaskan beberapa ukuran sebagai berikut :

a. Kemampuan Struktural Organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah dan ragam unit cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

b. Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah

Aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diinginkan.

c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah daerah harus mampu mendorong masyarakat agar memiliki kemauan untuk berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

d. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah daerah harus mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara keseluruhan sebagai wujud pelaksanaan, pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-

---

[24] Emelia Berti, Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000-2004 Di kabupaten lampung timur, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Yokyakarta, 2006

sumber dana antara lain berasal dari PAD atau sebagian dari subsidi pemerintah pusat.

Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta faktor organisasi dan manajerial. *Pertama,* manusia adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan, serta sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. *Kedua,* keuangan yang merupakan bahasan pada lingkup penulisan ini sebagai faktor penting dalam melihat derajat kemandirian suatu daerah otonom untuk dapat mengukur, mengurus dan membiayai urusan rumah tangganya. *Ketiga,* peralatan adalah setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk memperlancar kegiatan pemerintah daerah. *Keempat,* untuk melaksanakan otonomi daerah dengan baik maka diperlukan organisasi dan pola manajemen yang baik.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan daerah yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah mengutip pendapat Manulang (1995: 23) [25], yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan

[25] Ibid

rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai alat utama pada pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah daerah yang baik untuk melaksanakan otonomi daerah, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula.

Faktor peralatan yang cukup dan memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor, transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan yang baik, mamesah (1995 : 34) mengatakan bahwa baik atau tidaknya manajemen pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer daerah.

1.6.3.4. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan

daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab.

Keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku[26].

Pemerintah daerah sebagai sebuah institusi publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana atau modal untuk dapat membiayai pengeluaran pemerintah tersebut *(goverment expenditure)* terhadap barang-barang publik *(public goods)* dan jasa pelayanan. Tugas ini berkaitan erat dengan kebijakan anggaran pemerintah yang meliputi penerimaan dan pengeluaran.

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, di samping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

---

[26] Prof. Dr. Mardiasmo, MBA. Ak, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Penerbit : Andi, Yokyakarta. 2002

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa posisi calon kota Maumere menempati urutan ke dua (2) dari 21 kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan tingkat kepadatan penduduk berada di atas tingkat kepadatan provinsi dengan perbandingan 450 : 95. Hal ini menunjukan bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat kepadatan yang memadai jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk kota/kabupaten lain dalam satu provinsi.

Selain melakukan komparasi antara kepadatan penduduk calon daerah otonom dengan kota/kabupaten dalam satu provinsi, kita pun dapat melakukan perbandingan antara calon daerah otonom dengan daerah otonom baru (DOB) sejenis. Untuk calon Kota Maumere, kita dapat melakukan perbandingan dengan melihat tingkat kepadatan penduduk kota otonom baru lain yang sejenis, yang bukan merupakan ibu kota provinsi. Maka di sini kami mencoba membandingkan Kota Maumere dengan tiga (3) kota sejenis yaitu :

1. Kota Bima
2. Kota Palopo, dan
3. Kota Tual

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Tabel Perbandingan Kepadatan Penduduk Kota Maumere dan Kota Otonom Baru di Indonesia

No.	Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1	Kota Bima	117,935	222.25	530.6
2	Kota Palopo	133,990	247.52	541.3
3	Kota Tual	102,557	378.1	271.2
4	Rata - rata	118,161	283	448
5	Calon Kota Maumere	100313	222.81	450.2

Sumber : Hasil Analisis

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara kepadatan penduduk di calon Kota Maumere dengan kota-kota otonom baru yang terbentuk di Indonesia dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Tabel 3.2. Tabel Tingkat Kepadatan Penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1	Kota Kupang	299518	26.18	11441
2	Calon Kota Maumere	100313	222.81	450
3	Belu	465933	2445.6	191
4	Sumba Barat Daya	266408	1480.46	180
5	Flores Timur	238166	1813.2	131
6	Manggarai	274984	2096.44	131
7	Sikka *(Tanpa Kota)*	194645	1509.09	129
8	Ende	238295	2046.5	116
9	Timor Tengah Selatan	419984	3947	106
10	Manggarai Timur	244798	2642.93	93
11	Rote Ndao	115874	1280.46	90
12	Nagekeo	126761	1416.96	89
13	Manggarai Barat	211614	2397.03	88
14	Lembata	108152	1266	85
15	Ngada	135294	1645.88	82
16	Timor Tengah Utara	214842	2669.7	80
17	Kupang	394173	5895.3	67
18	Alor	181913	2864.6	64
19	Sumba Barat	108644	2183.18	50
20	Sumba Timur	233568	7000.5	33
21	Sumba Tengah	61370	1868.74	33
22	**Provinsi NTT**	**4635249**	**48718.56**	**95**

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

: Kepadatan pendudukan di atas kepadatan Provinsi NTT

: Kepadatan Provinsi NTT

kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.1. Grafik Kepadatan Penduduk Calon Kota Maumere

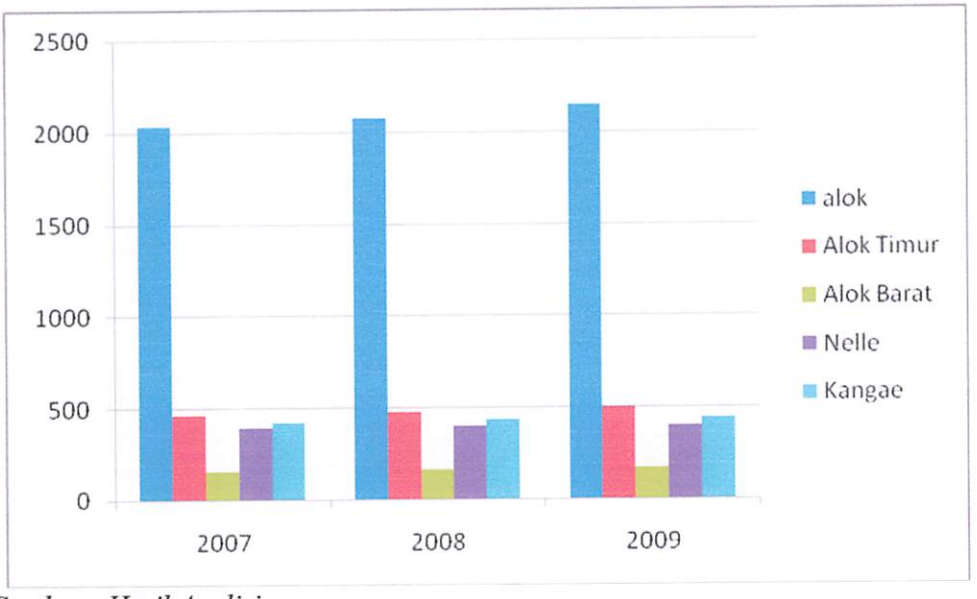

Sumber : Hasil Analisis

Grafik di atas dapat kita lihat laju pertambahan penduduk di setiap kecamatan dalam wilayah calon Kota Maumere, mengalami peningkatan yang berpengaruh pada peningkatan tingkat kepadatan penduduk secara keseluruan di calon daerah otonom tersebut.

Setelah dilakukan analisis kepadatan penduduk di calon Kota Maumere, kita dapat melakukan perbandingan kepadatan penduduk calon daerah otonom tersebut, dengan kepadatan penduduk di kabupaten/kota dalam satu provinsi untuk tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada hasil perhitungan berikut ini.

penduduk inilah yang sering kita jumpai dan hanya disebut kepadatan penduduk saja.

Rumusnya :

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (Km}^2\text{)}}$$

Berikut ini merupakan hasil perhitungan tingkat kepadatan penduduk di calon Kota Maumere.

Tabel 3.1. Tabel Tingkat Kepadatan Penduduk Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk		
		2007	2008	2009
1	Alok	2033	2072	2146
2	Alok Timur	460	470	495
3	Alok Barat	155	161	165
4	Nelle	389	397	400
5	Kangae	420	429	437
6	**Calon Kota Maumere**	**425**	**436**	**450**

Sumber : Hasil analisis

Dari tabel tingkat kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan calon Kota Maumere, dapat kita lihat bahwa rata-rata tingkat kepadatan hunian penduduk setiap satu kilometer persegi untuk calon Kota Maumere dari tahun 2007 sebesar 425 Km^2, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2008 mengalami peningkatan lagi menjadi 436 Km^2, dan pada tahun 2009, kembali mengalami peningkatan kepadatan yaitu menjadi 450 Km^2, dengan variasi kepadatan per kecamatan dimana terjadi peningkatan seiring dengan pertambahan penduduk. Dari analisis sesuai data dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terjadi peningkatan tingkat kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere. Untuk lebih jelasnya, tingkat kepadatan penduduk di

BAB III
ANALISIS KESIAPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM

Dalam bab ini akan dilakukan analisis dan penjabaran dari hasil analisis setiap indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengukur dan menilai tingkat kesiapan dari Kabupaten Sikka dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dan Meumere sebagai kota otonom yang mandiri.

3.1 Analisis Kependudukan

Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan, karena penduduk sebagai subyek maupun obyek dalam pembangunan. Disamping itu penduduk juga merupakan motor penggerak dan dapat mempercepat pembangunan di segala bidang.

Dalam analisis kependudukan untuk mengetahui tingkat kemampuan di bidang sumber daya manusia, khususunya kependudukan maka akan dilakukan analisis kependudukan yaitu analisis kuantitatif dimana akan dilakukan perhitungan terhadap kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk di calon daerah otonomi baru yaitu calon Kota Maumere, kabupaten induk (Kabupaten Sikka), dan analisis komparatif yaitu melihat perbandingan kondisi kependudukan di calon daerah otonom dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi maupun kota-kota otonom baru yang sejenis yang dapat dipergunakan sebagai perbandingan.

3.1.1 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menjadi salah satu prasarat dalam penilaian kelayakan pemekaran daerah karena tingkat kepadatan berpengaruh pada tingkat ketersediaan lahan yang efektif dengan pertambahan penduduk. Kepadatan penduduk menurut *Wekipedia* dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas area dimana mereka tinggal atau dengan kata lain kepadatan penduduk merupakan ratio jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.

Kepadatan penduduk Aritmatik yaitu jumlah rata-rata penduduk yang menempati wilayah seluas satu kilometer persegi (1 Km^2). Angka kepadatan

Grafik 2.7.Kualitas Infrastruktur

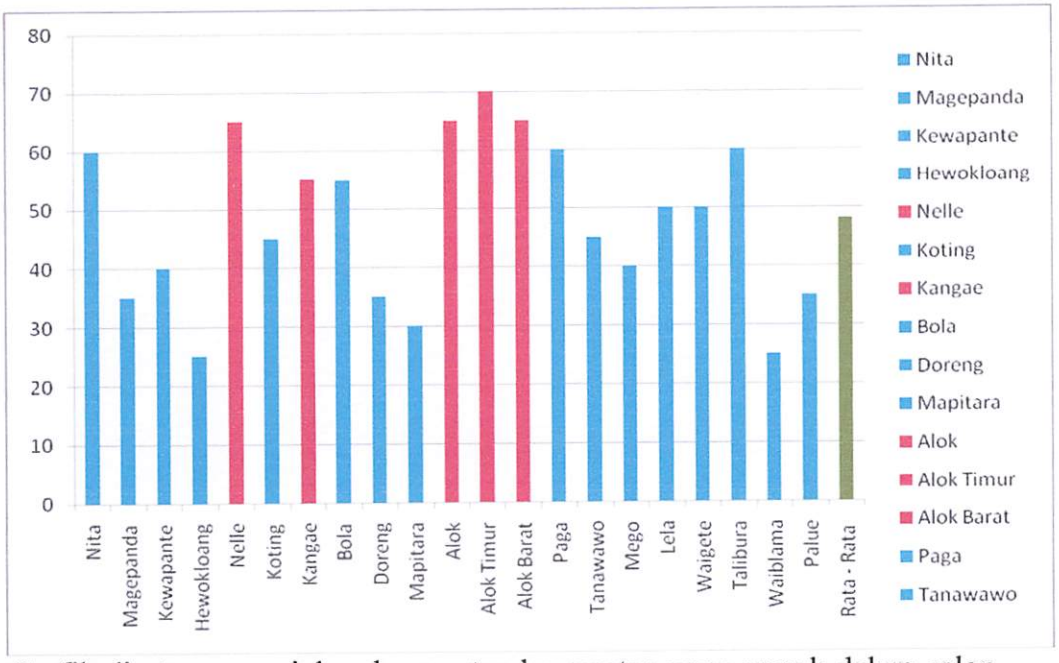

Grafik di atas menunjukan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere, berada di atas rata-rata dan di atas 50 %.

No.	Kecamatan	Prosentasi (%) Panjang Jalan
17	Lela	50
18	Waigete	50
19	Talibura	60
20	Waiblama	25
21	Palue	35
22	Rata - Rata	48

Sumber : Dinas PU Kabupaten Sikka 2010

Dari tabel di atas dapat kita ketahui kualitas infrastruktur jalan di calon Kota Maumere. Untuk lebih jelanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26. Prosentasi Jalan Dengan Kualitas Baik Terhadap Keseluruhan Jalan di SetiapKecamatan di Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Prosentasi (%) Panjang Jalan
1	Alok	65
2	Alok Timur	70
3	Alok Barat	65
4	Nelle	65
5	Kangae	55
6	**Calon Kota Maumere**	**64**

Sumber : Dinas PU Kabupaten Sikka 2010

Gambaran prosentasi panjang jalan dengan kualitas baik, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

2.4.3. Bidang Infrastruktur

Ketersediaan pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan daerah. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrumen untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya. Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan. Jalan memang merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur.

Tabel 2.25. Prosentasi Jalan Dengan Kualitas Baik Terhadap Keseluruhan Jalan di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Prosentasi (%) Panjang Jalan
1	Nita	60
2	Magepanda	35
3	Kewapante	40
4	Hewokloang	25
5	Nelle	65
6	Koting	45
7	Kangae	55
8	Bola	55
9	Doreng	35
10	Mapitara	30
11	Alok	65
12	Alok Timur	70
13	Alok Barat	65
14	Paga	60
15	Tanawawo	45
16	Mego	40

Tabel 2.24. Jumlah Tenaga Kesehatan Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		2009			
		Dokter	Perawat	Bidan	Paramedis Lainnya
1	Alok	12	73	49	35
2	Alok Timur	2	15	32	10
3	Alok Barat	-	-	-	-
4	Nelle	1	5	17	5
5	Kangae	2	1	27	8
6	**Kota Maumere**	**17**	**94**	**125**	**58**

Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 2010

Gambaran persebaran dan jumlah tenaga kesehatan di calon Kota Maumere dapat digambarkan seperti pada garafik di berikut ini

Grafik 2.6. Jumlah Tenaga Kesehatan Calon Kota Maumere

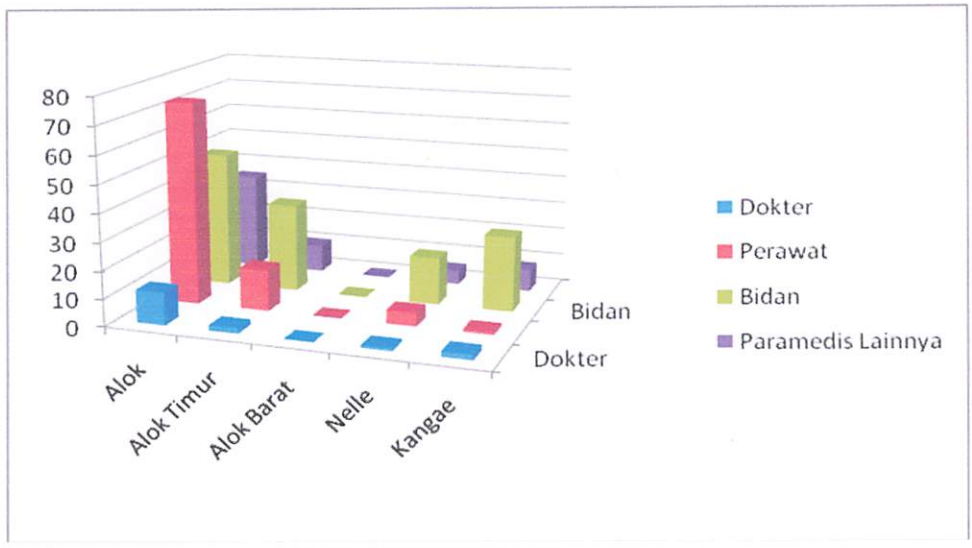

No.	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		2009			
9	Doreng	1	14	10	3
10	Mapitara	-	-	-	-
11	Alok	12	73	49	35
12	Alok Timur	2	15	32	10
13	Alok Barat	-	-	-	-
14	Paga	1	12	9	4
15	Tanawawo	1	7	8	2
16	Mego	1	13	10	4
17	Lela	1	33	10	7
18	Waigete	1	19	12	3
19	Talibura	1	15	11	6
20	Waiblama	1	10	6	4
21	Palue	1	5	8	6
22	**Kabupaten Sikka**	**31**	**272**	**246**	**116**

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 2010

Dari data tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka di atas dapat kita lihat gambaran jumlah tenaga kesehatan kesehatan di calon Kota Maumere, melalui data dari kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah calon kota. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.27.

Grafik 2.5. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Calon Kota Maumere

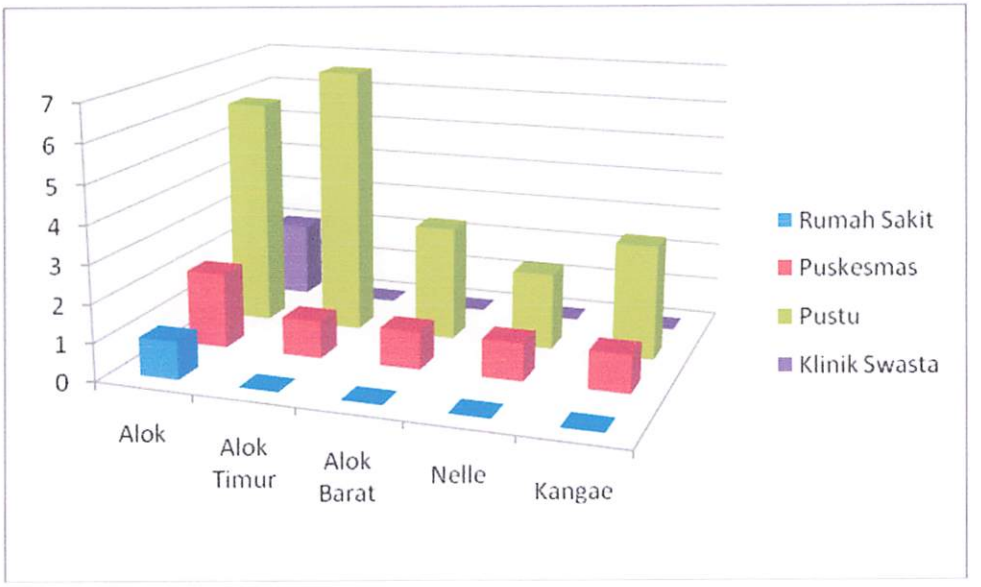

Selain jumlah fasiliras kesehatan yang menjadi ukuran pelayanan dari bidang kesehatan adalah jumlah tenaga kesehatan. Utuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.23. Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		2009			
		Dokter	Perawat	Bidan	Paramedis Lainnya
1	Nita	1	15	17	7
2	Magepanda	1	10	8	4
3	Kewapante	2	21	2	4
4	Hewokloang	-	-	-	-
5	Nelle	1	5	17	5
6	Koting	-	3	-	-
7	Kangae	2	1	27	8
8	Bola	1	1	10	4

No.	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		2009			
19	Talibura	-	1	5	-
20	Waiblama	-	1	1	-
21	Palue	-	1	2	-
22	**Kabupaten Sikka**	**3**	**19**	**65**	**4**

Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 2010

Dari data jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Sikka di atas dapat kita lihat gambaran jumlah fasilitas kesehatan di calon Kota Maumere, melalui data dari kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah calon kota. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.25.

Tabel 2.22.Jumlah Fasilitas Kesehatan Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		2009			
		Rumah Sakit	**Puskesmas**	**Pustu**	**Klinik Swasta**
1	Alok	1	2	6	2
2	Alok Timur	-	1	7	-
3	Alok Barat	-	1	3	-
4	Nelle	-	1	2	-
5	Kangae	-	1	3	-
6	**Calon Kota Maumere**	**1**	**6**	**21**	**2**

Sumber : Diolah dari Profil Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka 2010

Gambaran persebaran dan jumlah fasilitas kesehatan di calon Kota Maumere dapat digambarkan seperti pada grafik di berikut ini.

2.4.2. Bidang Kesehatan

Selain pendidikan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat adalah bidang kesehatan. Ketersediaan fasilitas dan tenaga medis di suatu daerah mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kondisi palayanan publik dalam bidang kesehatan di Kabupaten Sikka dan Calon Kota Maumere adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21.Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Fasilitas Kesehatan			
		2009			
		Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	Klinik Swasta
1	Nita	-	1	4	-
2	Magepanda	-	1	2	-
3	Kewapante	1	-	2	1
4	Hewokloang	-	-	4	-
5	Nelle	-	1	2	-
6	Koting	-	1	1	-
7	Kangae	-	1	3	-
8	Bola	-	1	2	-
9	Doreng	-	-	2	-
10	Mapitara	-	1	1	-
11	Alok	1	2	6	2
12	Alok Timur	-	1	7	-
13	Alok Barat	-	1	3	-
14	Paga	-	1	5	-
15	Tanawawo	-	1	3	-
16	Mego	-	1	3	-
17	Lela	1	1	3	1
18	Waigete	-	1	4	-

Dari data jumlah tenaga pendidik di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk, dapat kita lihat jumlah tenaga pendidikan di beberapa kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20. Jumlah Tenaga Pendidik Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Jumlah Pengajar				
		2009				
		SLB	SD	SMP	SMA	SMK
1	Alok	14	238	107	132	222
2	Alok Timur	19	258	149	129	91
3	Alok Barat	-	128	62	-	-
4	Nelle	-	77	34	-	18
5	Kangae	-	146	54	-	-
6	**Calon Kota Maumere**	**33**	**847**	**406**	**261**	**331**

Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas PPO Kabupaten Sikka

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik berikut ini

Grafik 2.4. Jumlah Tenaga Pendidik Calon Kota Maumere

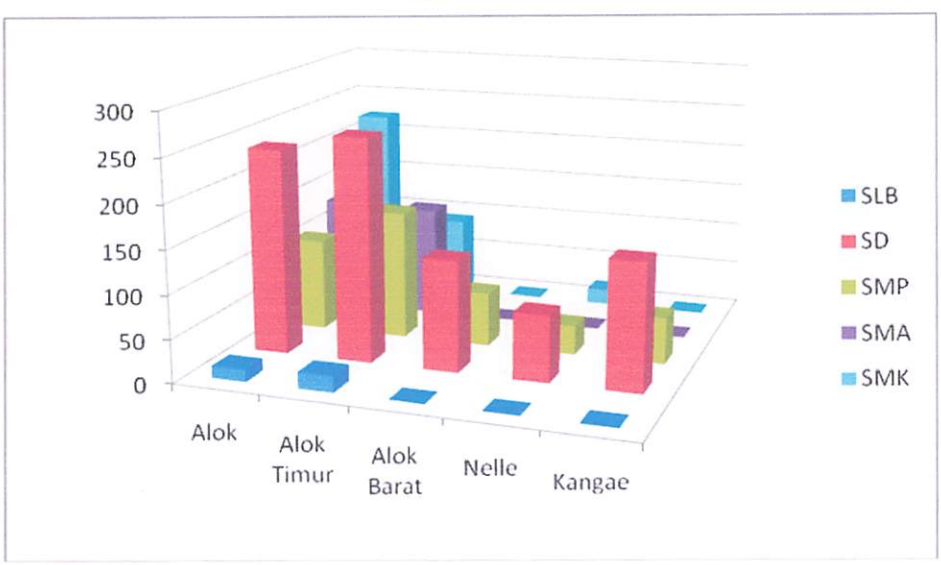

Grafik di atas menunjukan jumlah siswa terbanyak adalah siswa Sekolah Dasar dan tersebar merata denan prosentasi tertinggi di Kecamatan Alok Timur. Setelah melihat data jumlah siswa, berikutnya kita akan melihat jumlah tenaga pengajar di Kabupaten Sikka, dan calon Kota Maumere.

Tabel 2.19. Jumlah Tenaga Pendidik di Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Jumlah Pengajar				
		2009				
		SLB	SD	SMP	SMA	SMK
1	Nita	-	216	56	25	-
2	Magepanda	-	91	25	-	-
3	Kewapante	-	121	32	18	24
4	Hewokloang	-	102	45	15	-
5	Nelle	-	77	34	-	18
6	Koting	-	74	11	-	-
7	Kangae	-	146	54	-	-
8	Bola	-	123	28	18	-
9	Doreng	-	116	28	-	-
10	Mapitara	-	71	7	-	-
11	Alok	14	238	107	132	222
12	Alok Timur	19	258	149	129	91
13	Alok Barat	-	128	62	-	-
14	Paga	-	211	59	39	-
15	Tanawawo	-	108	40	-	-
16	Mego	-	150	43	-	-
17	Lela	-	142	32	-	30
18	Waigete	-	202	47	-	-
19	Talibura	-	217	65	20	19
20	Waiblama	-	68	27	-	-
21	Palue	-	77	24	-	-
22	**Kabupaten Sikka**	**33**	**2936**	**975**	**396**	**404**

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas PPO Kabupaten Sikka

Dari data di atas, dapat kita ketahui pula jumlah siswa di calon Kota Maumere, dari data kecamatan – kecamatan yang masuk dalam wilayah Kota Maumere

Tabel 2.18. Jumlah Siswa di Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa				
		2009				
		SLB	SD	SMP	SMA	SMK
1	Nelle	-	710	483	-	250
2	Kangae	-	2155	815	-	-
3	Alok	85	4381	1915	2457	3041
4	Alok Timur	300	4695	2506	1384	1772
5	Alok Barat	-	2572	634	-	-
6	**Calon Kota**	**385**	**14513**	**6353**	**3841**	**5063**

Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2010

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik jumlah siswa dan persebarannya berikut ini.

Grafik 2.3. Jumlah Siswa di Calon Kota Maumere

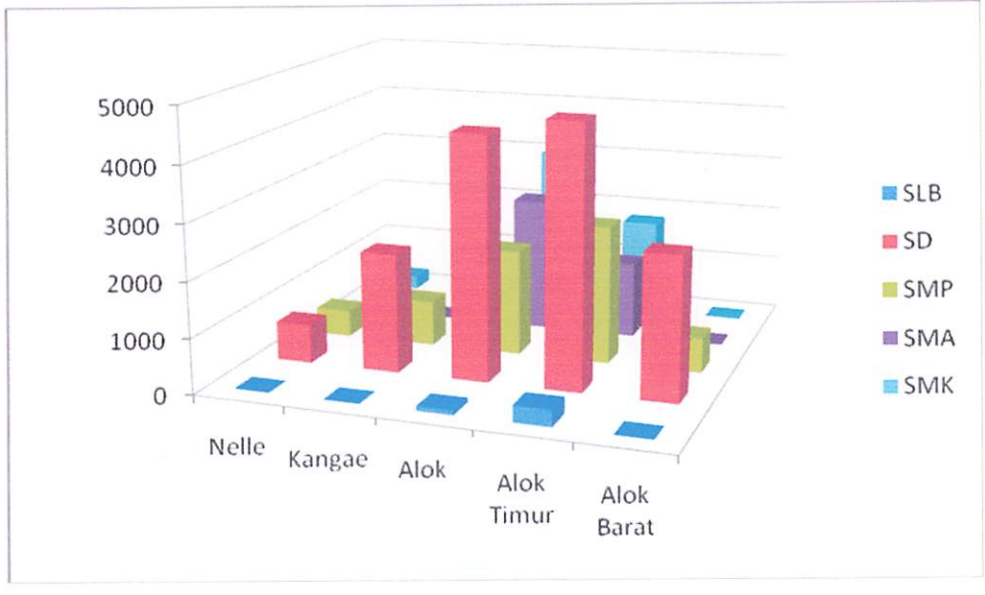

Tabel 2.17. Jumlah Siswa di Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran

No.	Kecamatan	Jumlah Siswa				
		2009				
		SLB	SD	SMP	SMA	SMK
1	Nita	-	2937	974	185	-
2	Magepanda	-	1695	304	-	-
3	Kewapante	-	2268	482	193	177
4	Hewokloang	-	1574	474	207	-
5	Nelle	-	710	483	-	250
6	Koting	-	815	144	-	-
7	Kangae	-	2155	815	-	-
8	Bola	-	1406	363	94	-
9	Doreng	-	2112	380	-	-
10	Mapitara	-	1133	109	-	-
11	Alok	85	4381	1915	2457	3041
12	Alok Timur	300	4695	2506	1384	1772
13	Alok Barat	-	2572	634	-	-
14	Paga	-	2893	881	471	-
15	Tanawawo	-	1891	370	-	-
16	Mego	-	2432	508	-	-
17	Lela	-	1708	412	-	348
18	Waigete	-	3881	646	-	-
19	Talibura	-	3863	926	303	148
20	Waiblama	-	1206	151	-	-
21	Palue		1481	237	-	-
22	**Kabupaten Sikka**	**385**	**47808**	**13714**	**5294**	**5736**

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas PPO Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah				
		2009				
		SLB	SD	SMP	SMA	SMK
4	Nelle	-	8	2	-	1
5	Kangae	-	16	3	-	-
6	**Kota Maumere**	**2**	**73**	**21**	**9**	**9**

Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2010

Grafik 2.2. Jumlah dan Persebaran Sekolah Calon Kota Maumere

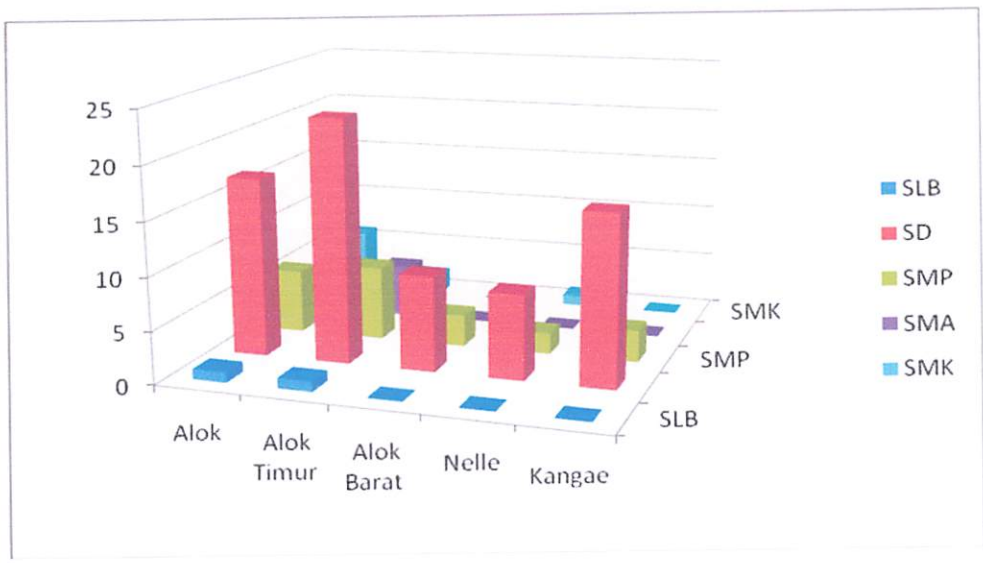

Dari grafik dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan yang terbanyak di calon Kota Maumere adalah Sekolah Dasar, dengan persebaran merata di setiap kecamatan, dengan dominasi berada di Kecamatan Alok Timur.

Setelah mengetahui persebaran dan jumlah fasilitas pendidikan, berikut ini adalah jumlah siswa atau pelajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah				
		2009				
10	Mapitara	-	8	1	-	-
11	Alok	1	17	6	4	6
12	Alok Timur	1	23	7	5	2
13	Alok Barat	-	9	3	-	-
14	Paga	-	20	5	2	-
15	Tanawawo	-	16	3	-	-
16	Mego	-	17	3	-	-
17	Lela	-	15	3	-	1
18	Waigete	-	19	4	-	-
19	Talibura	-	21	5	1	1
20	Waiblama	-	8	1	-	-
21	Palue	-	10	2	-	-
22	**Kabupaten Sikka**	**2**	**300**	**65**	**16**	**12**

Sumber : Profil Pendidikan Kabupaten Sikka Tahun 2010 Dinas PPO Kabupaten Sikka

Dari data jumlah dan persebaran sekolah di Kabupaten Sikka sebelum pemekaran,dapat kita tinjau jumlah dan persebaran di setiap kecamatan di calon Kota Maumere adalah sebagai berikut

Tabel 2.16. Jumlah Sekolah di Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah				
		2009				
		SLB	SD	SMP	SMA	SMK
1	Alok	1	17	6	4	6
2	Alok Timur	1	23	7	5	2
3	Alok Barat	-	9	3	-	-

Tebel di atas bukan merupakan angka pasti besaran keuangan daerah calon Kota Maumere, tapi merupakan gambaran yang dihitung berdasarkan kontribusi prosentasi PDRB.

2.4 Pelayanan Publik

Evaluasi kinerja pelayanan publik akan difokuskan kepada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Di sini akan digambarakan kondisi palayanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2.4.1. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan suatu daerah. Berbicara tentang pendidik, berkaitan dengan pelayanan publik. Di mana untuk mewujudkan suatu pelayanan di bidang pendidikan yang baik dan berkualitas dapat ditinjau dari kuantitas atau jumlah baik dari aspek sarana maupun tenaga pendidik serta rasio terhadap peserta didik atau murid.

Adapun kondisi palayanan publik dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sikka dan Calon Kota Maumere adalah sebagai berikut :

Tabel 2.15. Jumlah Sekolah di Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah				
		2009				
		SLB	SD	SMP	SMA	SMK
1	Nita	-	25	4	1	-
2	Magepanda	-	9	2	-	-
3	Kewapante	-	12	2	1	1
4	Hewokloang	-	11	4	1	-
5	Nelle	-	8	2	-	1
6	Koting	-	9	1	-	-
7	Kangae	-	16	3	-	-
8	Bola	-	15	2	1	-
9	Doreng	-	12	2	-	-

No.	Variabel Keuangan	Jumlah (Rupiah)				
		2005	2006	2007	2008	2009
5	Bagi hasil	2,568,888,974.88	2,010,323,948	7,572,930,439	8,904,233,867	3,200,546,202
6	Belanja Rutin	38,913,141,362.88	55,990,135,627	92,234,407,634	115,110,299,416	119,587,309,496
7	Bantuan	6,641,582,962.08	11,285,277,091	15,711,561,013	29,523,688,413	30,914,000,000
8	Total Penerimaan Daerah	8,781,385,161.12	13,132,025,404	15,658,642,761	19,856,811,950	37,339,704,368

Sumber : Diolah dari Buku APBD Kabupaten Sikka (Tahun 2005-2009) DPPKAD Kabupaten Sikka berdasarkan kontribusi PDRB per Kecamatan Kota.

Tabel 2.13.Tabel Keuangan Daerah Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran

No.	Variabel Keuangan	Jumlah (Rupiah)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	APBD	219,615,071,321	323,086,000,000	369,888,200,000	413,826,000,000	455,000,000,000
2	PAD	12,217,552,419	19,306,344,251	20,247,865,249	26,346,425,997	25,727,513,241
3	DAU	161,536,000,000	343,884,539,577	386,400,454,413	470,102,298,264	489,232,494,588
4	DAK	11,640,000,000	19,306,344,251	20,247,865,249	26,346,425,997	29,727,513,241
5	Bagi hasil	5,351,852,031	247,890,000,000	279,124,000,000	302,338,153,000	311,871,977,000
6	Belanja Rutin	81,069,044,506	29,960,000,000	44,825,000,000	55,204,000,000	55,314,000,000
7	Bantuan	13,836,631,171	4,061,260,500	14,966,265,689	17,425,115,200	6,154,896,543
8	TPD	18,294,552,419	113,111,385,105	182,281,438,011	225,264,773,808	229,975,595,184

Sumber : Buku APBD Kabupaten Sikka (Tahun 2005-2009) DPPKAD Kabupaten Sikka

Tabel 2.14.Tabel Keuangan Daerah calon Kota Maumere

No.	Variabel Keuangan	Jumlah (Rupiah)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	APBD	105,415,234,234.08	170,222,847,091	195,518,629,933	240,222,274,413	254,400,897,186
2	PAD	5,864,425,161.12	9,556,640,404	10,245,419,816	13,463,023,684	15,458,306,885
3	DAU	77,537,280,000.00	122,705,550,000	141,236,744,000	154,494,796,183	162,173,428,040
4	DAK	5,587,200,000.00	14,830,200,000	22,681,450,000	28,209,244,000	28,763,280,000

No.	Kecamatan	Angka Kemiskinan	
		2008	2009
17	Lela	29%	25%
18	Waigete	66%	61%
19	Talibura	62%	63%
20	Waiblama	82%	65%
21	Palue	45%	35%

Sumber : Profil Kabupaten Sikka, Bappeda Sikka 2009

Keterangan :

: Kecamatan yang masuk calon Kota Maumere

2.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu variabel utama dalam penyelnggaraan otonomi daerah. Keuangan pemerintah daerah tidak saja mencerminkan arah dan pencapaian kebijakan fiskal dalam mendorong pembangunan di daerah secara umum, tetapi juga menggambarkan sejauhmana pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembankan pada pemerintah daerah (kabupaten) dalam konteks desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, Di sini akan digambarkan kondisi keuangan daerah Kabupaten Sikka, dan kontribusi dari Calon Kota Otonom Maumere.

Dari tabel PDRB Non migas atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sikka sebagi kabupaten induk dan calon Kota Maumere dapat kita lihat tingkat pertumbuhan PDRB non migas di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere adalah seperti yang tergambar dalam tabel dan grafik di bawah ini

2.2.4 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan diperoleh dari prosentasi penduduk miskin dari total keseluaruan jumlah penduduk. Untuk angka prosentasi kemiskinan di Kabupaten Sikka dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.12. Angka Kemiskinan Sikka
Tahun 2008-2009

No.	Kecamatan	Angka Kemiskinan	
		2008	2009
1	Nita	47%	43%
2	Magepanda	51%	47%
3	Kewapante	58%	58%
4	Hewokloang	60%	61%
5	Nelle	35%	33%
6	Koting	35%	37%
7	Kangae	54%	51%
8	Bola	71%	57%
9	Doreng	60%	55%
10	Mapitara	57%	52%
11	Alok	24%	21%
12	Alok Timur	30%	33%
13	Alok Barat	42%	39%
14	Paga	54%	54%
15	Tanawawo	62%	59%
16	Mego	47%	43%

No.	Kecamatan	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.000)		
		2006	2007	2008
12	Alok Timur	0	143,288,484	169,579,541
13	Alok Barat	0	37,878,246	47,002,657
14	Paga	60,874,337	43,043,964	53,403,071
15	Tanawawo	0	22,591,061	27,586,410
16	Mego	35,075,226	38,448,420	44,936,250
17	Lela	41,405,699	44,329,469	55,250,530
18	Waigete	42,842,539	45,975,743	56,372,105
19	Talibura	74,059,732	61,273,579	73,984,401
20	Waiblama	0	18,884,117	22,983,929
21	Palue	28,837,011	30,815,558	36,020,733
22	**Kabupaten Sikka**	**1,045,038,565**	**1,131,583,688**	**1,330,850,174**

Sumber : PDRB Kabupaten Sikka Per Kecamatan (Tahun 2005-2009)

Dari data PDRB non migas atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sikka dapat kita tinjau besaran PDRB non migas atas dasar harga berlaku di calon Kota Maumere.

\

Tabel 2.11.PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Maumere

No.	Kecamatan	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.000)		
		2006	2007	2008
1	Alok	430,521,679	302,248,501	331,267,394
2	Alok Timur	0	143,288,484	169,579,541
3	Alok Barat	0	37,878,246	47,002,657
4	Nelle	75,649,177	37,288,611	43,152,284
5	Kangae	0	42,006,220	51,098,073
6	**Calon Kota Maumere**	**506,170,856**	**562,710,062**	**642,099,949**

Sumber : Diolah dari PDRB Kabupaten Sikka Per Kecamatan (Tahun 2005-2009)

Tabel 2.9. PDRB Per kapita Kecamatan dalam Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	PDRB Per Kapita(Rupiah)		
		2007	2008	2009
1	Alok	10,552,945	11,075,208	11,508,956
2	Alok Timur	5,153,557	5,812,381	6,068,998
3	Alok Barat	2,758,484	3,276,388	3,385,423
4	Nelle	6,791,001	7,571,493	7,796,761
5	Kangae	2,706,787	3,192,132	3,275,074
6	**Calon Kota Maumere**	**5,592,555**	**6,185,520**	**6,407,042**

Sumber : Diolah dari PDRB Kabupaten Sikka Per Kecamatan (Tahun 2005-2009)

2.2.3 PDRB Non Migas

Adapun PDRB Non Migas, atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sikka, maupun di Calon Kota Maumere dapat kita lihat dalam table di bawah ini :

Tabel 2.10.PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka

No.	Kecamatan	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.000)		
		2006	2007	2008
1	Nita	62,021,670	66,475,930	77,945,710
2	Magepanda	34,411,016	36,819,525	44,992,568
3	Kewapante	85,772,671	30,554,289	37,905,141
4	Hewokloang	0	18,846,139	22,959,060
5	Nelle	75,649,177	37,288,611	43,152,284
6	Koting	0	32,455,083	37,651,023
7	Kangae	0	42,006,220	51,098,073
8	Bola	73,567,808	41,301,744	50,396,665
9	Doreng	0	21,201,939	26,532,755
10	Mapitara	0	15,857,066	19,829,874
11	Alok	430,521,679	302,248,501	331,267,394

No.	Kecamatan	PDRB per kapita (Rupiah)			
		2006	2007	2008	2009
3	Kewapante	2.430.970	2.426.117	2.889.681	2.976.786
4	Hewokloang	0	2.337.197	2.741.150	2.816.028
5	Nelle	3.130.371	6.791.001	7.571.493	7.796.761
6	Koting	0	5.249.985	5.897.208	6.060.380
7	Kangae	0	2.706.787	3.192.132	3.275.074
8	Bola	2.533.338	3.664.898	4.310.126	4.422.880
9	Doreng	0	2.009.918	2.422.961	2.487.683
10	Mapitara	0	2.550.767	3.088.015	3.173.112
11	Alok	7.332.228	10.552.945	11.075.208	11.508.956
12	Alok Timur	0	5.153.557	5.812.381	6.068.998
13	Alok Barat	0	2.758.484	3.276.388	3.385.423
14	Paga	2.594.904	2.847.475	3.401.532	3.494.007
15	Tanawawo	0	2.061.840	2.422.165	2.490.138
16	Mego	2.375.432	2.471.824	2.786.079	2.868.459
17	Lela	3.392.438	3.614.150	4.630.062	4.758.751
18	Waigete	2.453.453	2.596.773	3.067.940	3.149.049
19	Talibura	2.944.511	3.430.483	4.002.587	4.106.550
20	Waiblama	0	2.903.299	3.398.541	3.494.856
21	Palue	2.349.115	2.531.898	2.837.107	2.927.213
22	**Kabupaten Sikka**	**3.696.556**	**3.978.020**	**4.502.448**	**4.650.200**

Sumber : PDRB Kabupaten Sikka Per Kecamatan (Tahun 2005-2009)

Dari tabel PDRB per kapita Kabupaten Sikka di atas dapat kita lihat kondisi PDRB per kapita calon Kota Maumere yang terdiri dari 5 kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Dari data pendapatan per kapita Kabupaten Sikka di atas, dapat kita lihat besaran pendapatan per kapita calon Kota Maumere. Untuk lebih jelasnya dpat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7. Pendapatan Per Kapita Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Pendapatan per kapita (Rupiah)		
		2007	2008	2009
1	Alok	10.159.227	10.552.945	11.075.208
2	Alok Timur	4.937.150	5.153.557	5.812.381
3	Alok Barat	2.667.673	2.758.484	3.276.388
4	Nelle	6.595.402	6.791.001	7.571.493
5	Kangae	2.638.694	2.706.787	3.192.132
6	**Calon Kota Maumere**	**5,399,629**	**5,592,554**	**6,185,520**

Sumber : Diolah dari PDRB Kabupaten Sikka Per Kecamatan (Tahun 2005-2009)

2.2.2 PDRB per kapita

PDRB per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu/ PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini menunjukan rata-rata PDRB untuk setiap penduduk; dan digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat kemakmuran. Adapun PDRB per kapita di Kabupaten Sikka, dapat kita lihat pada tabel 2.7

Tabel 2.8. PDRB Per kapita Kecamatan di Kabupaten Sikka Sebelum Pembentukan Kota Maumere

No.	Kecamatan	PDRB per kapita (Rupiah)			
		2006	2007	2008	2009
1	Nita	3.1528.40	3.375.385	3.806.239	3.914.362
2	Magepanda	3.274.540	3.483.588	4.101.227	4.210.167

Tabel 2.6. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Sikka Sebelum Pemekaran

No.	Kecamatan	Pendapatan per kapita (Rupiah)			
		2006	2007	2008	2009
1	Nita	3060881	3.282.380	3.375.385	3.806.239
2	Magepanda	3183790	3.392.790	3.483.588	4.101.227
3	Kewapante	2361355	2.354.029	2.426.117	2.889.681
4	Hewokloang	0	2.274.515	2.337.197	2.741.150
5	Nelle	3042268	6.595.402	6.791.001	7.571.493
6	Koting	0	5.109.824	5.249.985	5.897.208
7	Kangae	0	2.638.694	2.706.787	3.192.132
8	Bola	2463354	3.571.589	3.664.898	4.310.126
9	Doreng	0	1.957.055	2.009.918	2.422.961
10	Mapitara	0	2.481.524	2.550.767	3.088.015
11	Alok	7034470	10.159.227	10.552.945	11.075.208
12	Alok Timur	0	4.937.150	5.153.557	5.812.381
13	Alok Barat	0	2.667.673	2.758.484	3.276.388
14	Paga	2520836	2.771.659	2.847.475	3.401.532
15	Tanawawo	0	2.004.984	2.061.840	2.422.165
16	Mego	2302879	2.400.686	2.471.824	2.786.079
17	Lela	3294323	3.515.590	3.614.150	4.630.062
18	Waigete	2385468	2.529.313	2.596.773	3.067.940
19	Talibura	2863098	3.343.496	3.430.483	4.002.587
20	Waiblama	0	2.822.380	2.903.299	3.398.541
21	Palue	2272380	2.453.412	2.531.898	2.837.107
22	**Kabupaten Sikka**	**3.572.587**	**3.851.123**	**3.978.020**	**4.502.448**

Sumber : PDRB Kabupaten Sikka Per Kecamatan (Tahun 2005-2009)

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kota-Kota Otonom Baru Sejenis di Indonesia

No.	Kota	Jumlah Penduduk
1	Kota Bima	117,935
2	Kota Palopo	133,990
3	Kota Tual	102,557
4	Calon Kota Maumere	100313

Sumber : Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2010

2.2 Perekonomian

Perekonomian merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap arah dan kesuksesan dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau pembentukan daerah baru perlu dikaji faktor ekonomi. Beberapa indikator ekonomi yang perlu dikaji berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah pendapatan perkapita/PDRB perkapita, PDRB non migas, Ratio PDRB dan angka kemiskinan.

2.2.1 Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita juga merupakan pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun; dan menunjukkan rata-rata pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk. Ukuran ini juga biasa digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran.

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk		
		2007	2008	2009
7	Rote Ndao	110617	114236	115874
8	Lembata	102344	106312	108152
9	Flores Timur	225268	234076	238166
10	Kota Kupang	279124	292922	299518
11	Sumba Timur	217454	228351	233568
12	Manggarai Barat	195532	206367	211614
13	Kupang	362790	383896	394173
14	Belu	394810	441451	465933
15	Sumba Barat	409851	106524	108644
16	Ngada	250305	133406	135294
17	Manggarai	495136	512065	274984
18	Sumba Barat Daya	-	261211	266408
19	Sumba Tengah	-	60173	61370
20	Nagekeo	-	124992	126761
21	Manggarai Timur	-	-	244798
22	**Provinsi NTT**	**4355121**	**4534319**	**4635249**

Sumber : NTT dalam angka 2007-2009

Keterangan :

: Belum ada data/tidak bisa dianalisis karena merupakan kota/kabupaten pemekaran, atau dimekarkan

: Calon Kota Maumere

: Total Jumlah Provinsi NTT

Setelah melihat tabel kependudukan di kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berikut ini merupakan merupakan data kependudukan di calon kota-kota sejenis yang baru dimekarkan di Indonesia, yang bukan merupakan ibu kota provinsi.

Grafik 2.1. Perbandingan Jumlah Penduduk Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

Selain jumlah penduduk calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk, dalam gambaran umum kependudukan ini juga akan ditampilkan kondisis kependudukan kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan beberapa kota sejenis yang baru dimekarkan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kota/Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2007 – 2009

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk		
		2007	2008	2009
1	Sikka *(Tanpa Kota)*	181194	181573	194645
2	Calon Kota Maumere	**94,742**	**97,055**	**100,313**
3	Ende	237555	238127	238295
4	Timor Tengah Selatan	412353	417942	419984
5	Alor	177009	180487	181913
6	Timor Tengah Utara	209037	213153	214842

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2007	2008	2009
1	Alok	29758	30336	31416
2	Alok Timur	28888	29516	31049
3	Alok Barat	14267	14888	15209
4	Nelle	5705	5818	5863
5	Kangae	16124	16497	16776
6	**Calon Kota Maumere**	**94,742**	**97,055**	**100,313**

Sumber : Diolah dari Sikka Dalam Angka (Tahun 2005 – 2009)

Setelah melihat data kependudukan Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere, berikut ini akan digambarkan perbandingan antara jumlah penduduk di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tabel Perbandingan Jumlah Penduduk Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
		2007	2008	2009
1	Sikka	**184,686**	**188,712**	**194,645**
2	Maumere	**94,742**	**97,055**	**100,313**

Untuk lebih jelas gambaran tentang perbandingan jumlah penduduk antara Kabupaten Sikka sebagai Kabupaten induk dengan calon Kota Maumere dapat kita lihat pada grafik di bawah ini.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2005	2006	2007	2008	2009
7	Kangae	-	-	16124	16497	16776
8	Bola	29089	28,561	11709	11795	11848
9	Doreng	-	-	10960	10960	11269
10	Mapitara	-	-	6459	6461	6543
11	Alok	55484	55,809	29758	30336	31416
12	Alok Timur	-	-	28888	29516	31049
13	Alok Barat	-	-	14267	14888	15209
14	Paga	15069	15069	15706	16196	16925
15	Tanawawo	-	-	11384	11770	11770
16	Mego	11802	11,989	14799	15168	15810
17	Lela	12051	12,043	12019	12321	12464
18	Waigete	18678	18,837	19507	19806	20071
19	Talibura	24816	24,940	18558	18939	20475
20	Waiblama	-	-	6758	6861	7856
21	Palue	9883	9,958	10227	10866	10950
22	**Kabupaten Sikka**	**268,344**	**268,435**	**295,134**	**301,963**	**311,883**

Sumber : Sikka Dalam Angka (Tahun 2005 – 2009)

Dari tabel kependudukan Kabupaten Sikka di atas dapat kita gambarkan kondisi kependudukan calon Kota Maumere, di mana sesuai dengan rencana bahwa Calon Kota Maumere terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Data yang akan ditampilkan di sini adalah data kependudukan selama tiga tahun terakhir di calon Kota Maumere. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel 2.2.

BAB II
GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum wilayah penelitian menggambarkan dua komponen penting yakni keadaan umum Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan yang lebih spesisik calon Kota Otonom Maumere disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

2.1 Kependudukan

Kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan, karena penduduk sebagai subyek maupun obyek dalam pembangunan. Disamping itu penduduk juga merupakan motor penggerak dan dapat mempercepat pembangunan di segala bidang.

Di sini akan digambarkan kondisi kependudukan di Kabupaten Sikka sebelum pembentukan Kota Maumere, kondisi kependudukan calon Kota Maumere, dan perbandingan jumlah penduduk Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere.

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sikka Sebelum Pembentukan Kota Maumere

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Nita	29936	30,189	22400	22593	22707
2	Magepanda	-	-	12020	12455	12593
3	Kewapante	35618	35,838	13085	13933	14097
4	Hewokloang	-	-	8378	8361	9648
5	Nelle	25918	25,202	5705	5818	5863
6	Koting	-	-	6423	6423	6544

Bagan 1.2. Kerangka Pikir "Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

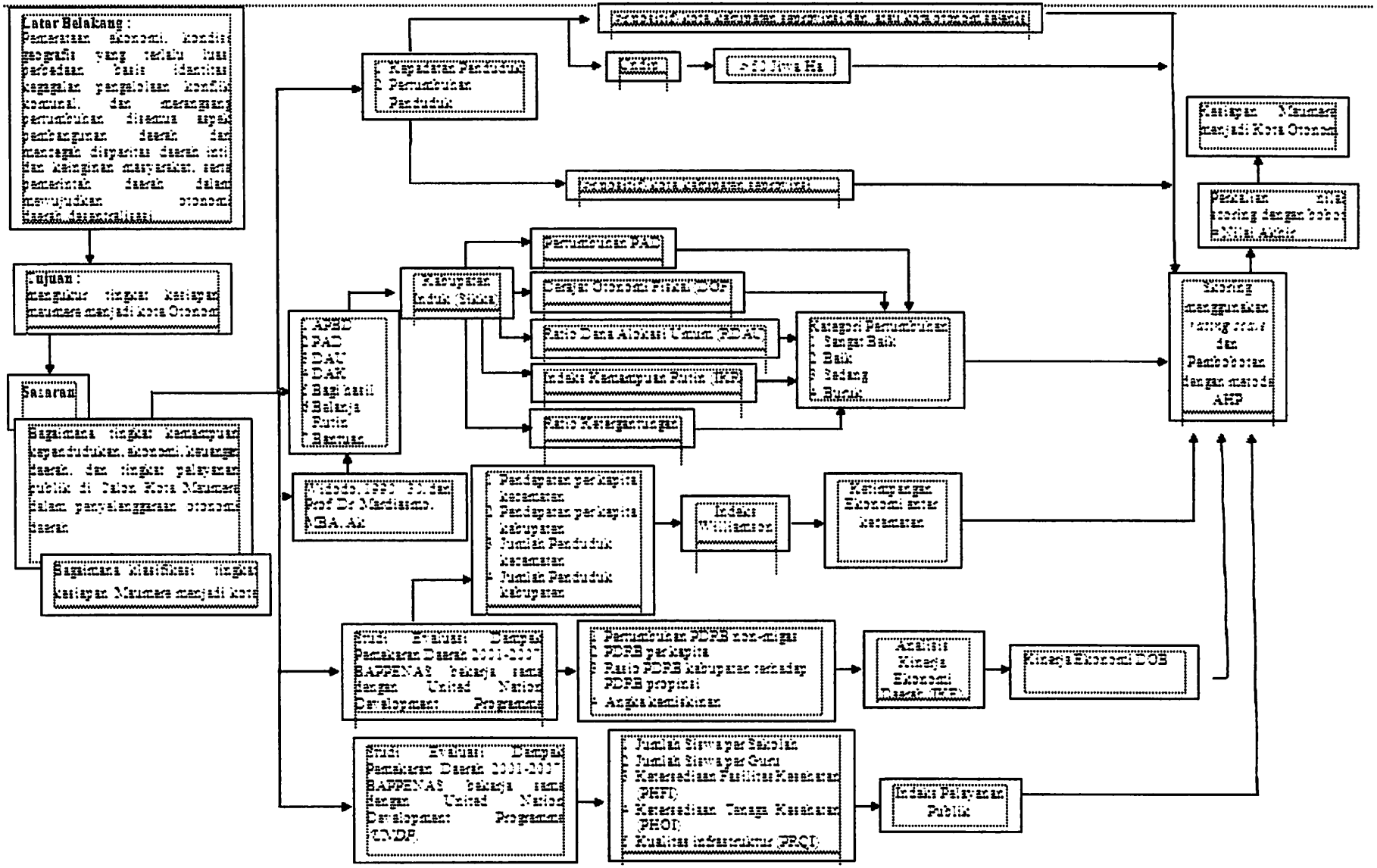

BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah, dengan data – data yang dimiliki oleh wilayah atau lokasi studi, serta wilayah pembanding.

BAB III ANALISIS KESIAPAN MAUMERE MENJADI KOTA OTONOM

Pada bab ini dipaparkan hasil temuan di lapangan dan analisa yang digunakan dengan menggunakan bebrapa varibel yang ada. Dari temuan dan hasil analisa maka ditentukan perlu tidaknya dilakukan pemekaran Kota Maumere.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini tediri atas kesimpulan dari hasil bahasan dan Kota Maumere rekomendasi bagi penelitian selanjutnya

Berdasarkan hasil perhitungan AHP, total bobot yang diperoleh dari seluruh indikator adalah 100. Setelah ditemukan bobot melalui metode AHP, maka bobot tersebut dikalikan dengan skoring yang ada dan didapatkan nilai untuk penentuan kesiapan/kelulusan suatu daerah otonom baru adalah $100 \leq x \leq 500$.

Untuk kategori kesiapan, nilai tersebut dibagi menjadi 5 kelas mengingat *rating scale* membagi skala dimulai dari 1 hingga 5 dan menunjukan kamampuan dari masing-masing indicator. Berdasarkan hasil pembagian kelas maka diketahui nilai untuk masing-masing kategori dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.3. Nilai Kesiapan Daerah Otonom Baru

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator
Sangat Mampu	420 s/d 500
Mampu	340 s/d 419
Kurang Mampu	260 s/d 339
Tidak Mampu	180 s/d 259
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179

Sumber : PP 78 Tahun 2007

1.9. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran "Kajian Kesiapan Pembentukan Kota Otonom Maumere" dapat dilihat pada diagram 1.2

1.10. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang pengambilan, isu dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penenlitian bagi pihak-pihak terkait, ruang lingkup yang terdiri atas lingkup penelitian dan lingkup wilayah, tinjauan pustaka, dan landasan teori, serta kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan dalam pelaporan hasil penelitian.

dimensi masing-masing matriks. Dengan cara yang sama, setiap indeks konsistensi acak juga dibuat berdasarkan prioritas kriteria yang bersangkutan dan hasilnya dijumlahkan.

Indeks konsistensi dirumuskan :

$$IK = (\lambda \text{ maks-n}) / (n - 1)$$

Adapun variabel dan sub-sub variabel yang akan dinilai berpengaruh terhadap pemekaran seperti yang digambarkan dalam bagan alir Proses Analisis Hirarki.

Bagan 1.1. Struktur Hierarki AHP

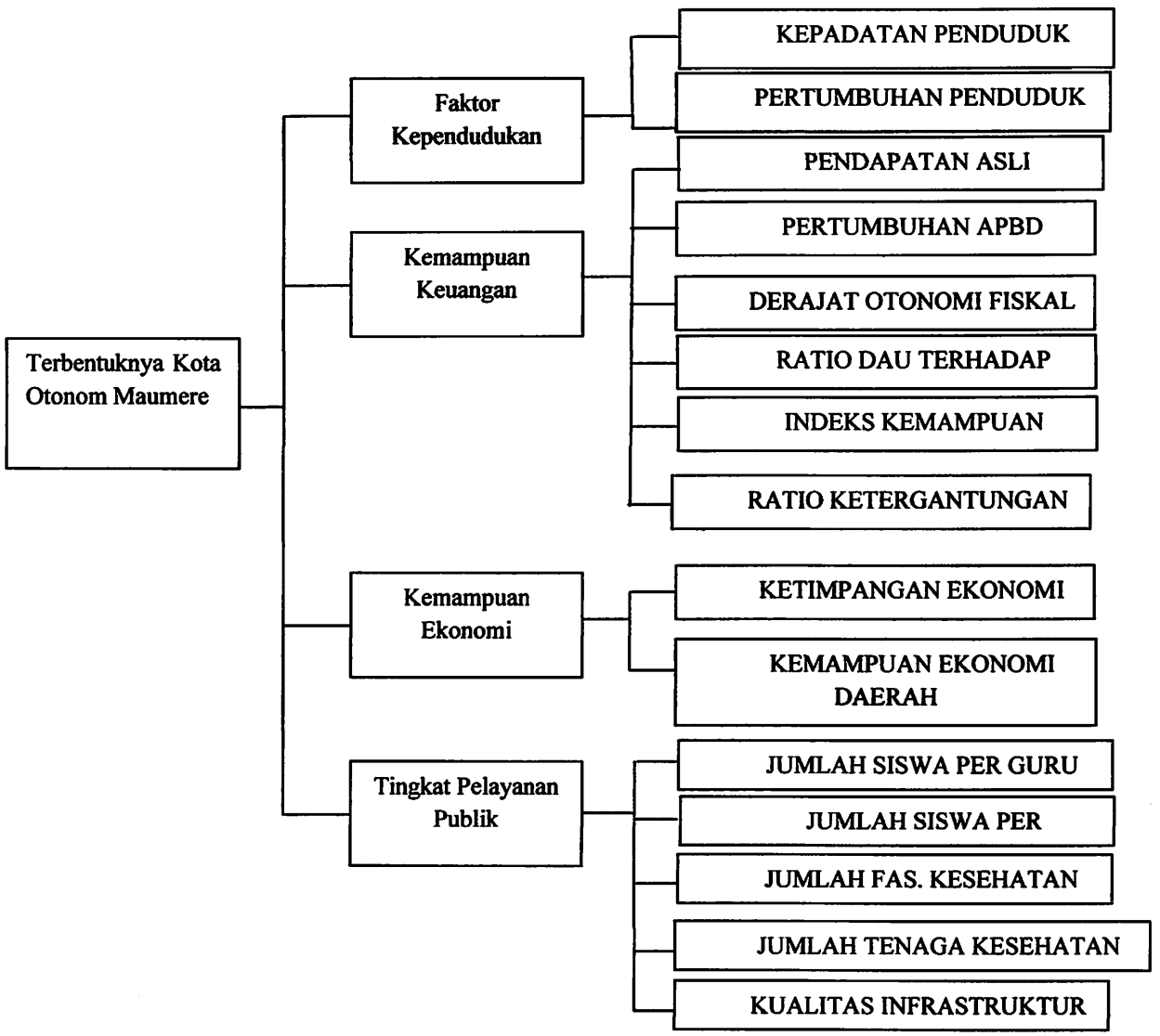

b. Menentukan Vektor Prioritas (VP), vector prioritas pada dasarnya merupakan EV yang telah disesuaikan, di mana VP tiap baris merupakan ratio EV tiap baris terhadap jumlah total EV. Jadi nilai VP merupakan prosentase dari EV sehingga jumlah seluruh VP adalah 1 (100%).

Vp tiap baris diperoleh dengan rumus :

$$VP = \frac{\text{Nilai EV}}{\text{Jumlah Total Nilai EV}}$$

Makin tinggi nilai VP, makin tinggi prioritasnya.

c. Menentukan Konsistensi Maksimum (λ maks) sebagai berikut :

Nilai eigen (eigen value = λ maks) pada AHP bertujuan untuk melihat penyimpangan konsistensi suatu matriks.

$$\lambda \text{ maks} = \sum (\text{Jumlah kolom ke j x Vpi untuk } i = j$$

λ maks selalu lebih besar dari pada ukuran matriks (n)1, makin dekat λ maks dengan n, maka niali observasi dalam matriks semakin konsisten.

5. Malaksanakan langkah 3, 4, dan 5, untuk semua tingkat dan gugusan dalam hirarki tersebut.
6. Menggunakan komposisi secara hirarki sintesis untuk membobotkan vektor-vektor yang bersangkutan dengan entri prioritas dari tingkat bawah berikutnya dan seterusnya. Hasilnya adalah vektor prioritas menyeluruh untuk tingkat hirarki yang paling bawah, dan jika hasilnya ada beberapa bisa diambil rata-rata aritmatiknya.
7. Mengevaluasi konsistensi untuk seluruh hirarki dengan mengalihkan setiap indeks konsistensi dengan prioritas kriteria yang bersangkutan dan menjumlahkan hasil kalinya. Hasil ini dibagi dengan pernyataan sejenis yang menggunakan indeks konsistensi acak yang sesuai dengan

Tabel 1.2. Skala Banding Secara Berpasangan

Skala	Definisi dari "Importance"
1	Sama pentingnya (Equal Importance)
3	Sedikit lebih penting (Slightly more Importance)
5	Jelas lebih Penting (Materially more Importance)
7	Sangat jelas penting (Significantly more Importance)
9	Mutlak lebih penting (Absolutely more Importance)
2, 4, 6, 8,	Ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan (Compromise values)
1/1,3,5,7,9	Tidak dapat dijelaskan

3. Mendapatkan semua pertimbangan yang diperlukan untuk mengembangkan peringkat matriks. Pertimbangan ini didapat dari hasil kuisioner pada pihak–pihak yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan responden yang telah ditentukan yaitu :
   a. Prof. Dr. Banavantura NGW, MS (Ahli Kebijakan Publik / Ilmu Sosial)
   b. Dr. Sasongko, MS (Ahli Ekonomi Wilayah)
   c. Dimas Wisnu Adrianto, ST, MT, M. Env. Man (Ahli Planologi)

4. Setelah mengumpulkan semua data banding berpasangan itu dan memasukan nilai – nilai kebalikannya beserta entri bilangan I sepanjang diagonal utama, prioritas dicari dan konsistensi diuji.

   a. Mencari prioritas

      Menentukan Eigen Vektor (EV), nilai EV diperoleh dengan rumus

$$EVj = (\sqrt[n]{Ni_1 \times Ni_2 \times Ni_3 \ldots . \times Ni_n}$$

      Dengan i = 1, 2, 3, ..., n.

      Bila diperhatikan, EV merupakan rata-rata geometris dari unsur-unsur matriks tiap baris.

berkompeten di bidang pengembangan wilayah dan pemekaran terkait urutan bobot masing-masing variabel. Pendapat para ahli terkait tingkatan sub-sub variabel yang dirasa mempunyai pengaruh terhadap studi kesiapan pembentukan kota otonom Maumere.

Landasan dari metode AHP adalah pada perbandingan relative antara berbagai elemen/faktor yang ingin diketahui prioitas pengembangannya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam AHP adalah [36]:

1. Definisikan persoalan dan rinci pemecahan yang diinginkan, struktur hirarki dari sudut pandang managerial menyeluruh (dari level atas sampai level terbawah)
2. Membuat matriks banding berpasangan untuk kontribusi atau pengaruh elemen yang relevan atas kriteria yang berpengaruh yang berada setingkat di atasnya. Dalam matriks ini pasangan – pasangan elemen yang dibandingkan berkenaan dengan suatu kriteria yang lebih tinggi. Dalam membandingkan suatu elemen, orang lebih suka memberi suatu pertimbangan yang menunjukan nilai resiprokalnya.

   Perbandingan tersebut diajukan dalam satu sistem penilaian konsisten, yang relatif bisa dikuantitatifkan menjadi bobot 1 sampai 9 yang ditetapkan bagi pertimbangan dalam membandingkan pasangan elemen yang sejenis di setiap tingkat hirarki terhadap suatu kriteria yang berada setingkat di atasnya. Semua pertimbangan yang diterjemahkan secara numerik ini merupakan ancaman belaka; validitas dapat dievaluasi dengan uji konsistensi.

---

[36] Saaty, T.L *The Analytical Hierarchy Prosess : Planing, Priority Setting, Resourc Allocation*. Pittsbugh University Pers. 1990.

1.8.2.2 Skoring dan Pembobotan

Skoring dan pembobotan merupakan tahap akhir dari analisis yang akan dilakukan dalam studi ini. Skoring dan pembobotan dilakukan berdasarkan masing-masing variable yang telah dilakukan pada awal penelitian. Skoring yang diberikan pada setiap indicator menggunakan *Rating Scale.* Skala ini mengukur data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif (Sugiyono, 2008). Pemberian score dilakukan dengan interval 1-5 di mana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 untuk kategori mampu, skor 3 untuk kurang mampu, skor 2 untuk kategori tidak mampu, dan skor 1 untuk kategori sangat tidak mampu. Pembagian skoring menjadi 5 kelas dilakukan dengan tujuan untuk memperketat interval nilai titik di atas dan titik bawah agar jarak antar nilai tidak terlalu jauh.

Untuk kriteria skoring ini menggunakan metode perbandingan dengan persentase total sebesar 100%, maka nilai persentase tersebut disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada dengan selisih persentase pada masing-masing skor sama. Dengan melihat kesamaan skor yang diberikan, maka parameter besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor.

1. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% dengan kategori sangat baik.
2. Pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% dengan kategori baik
3. Pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% dengan kategori kurang baik
4. Pemberian skor 2 apabila besaran/nilai/indikator lebih besar atau sama dengan 20% dengan kategori buruk
5. Pemberian skor 1 apabila besaran/nilai/indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata dengan kategori sangat buruk.

Untuk pembobotan masing-masing variabel digunakan metode *Analytical Hierarchy Proccess* (AHP) di mana akan diminta pendapat para ahli yang

c. Mengukur besarnya Ratio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD Kabupaten Sikka (Depdagri, 1991)

$$RDAU = \frac{DAU}{APBD} \times 100\%$$

Keterangan :

RDAU = Ratio Dana Alokasi Umum

DAU = Dana Alokasi Umum

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

d. Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Sikka untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan (Depdagri, 1991)

$$IKR = \frac{PADt + DAU + Bagi\ hasil}{Belanja\ Rutin} \times 100\%$$

e. Menghitung Ratio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat membiayai belanja daerah (Depdagri, 1991)

$$Ratio\ Ketergantungan = \frac{DAU+DAK+Bantuan}{APBD} \times 100\%$$

PHOI : Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekatkannya dengan skala kecamatan). Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, tenaga paramedis dan pembantu paramedis.

PRQI : Indikator ini menyangkut besarnya persentase panjang jalan dengan kualitas baik, terhadap keseluruhan panjang ruas jalan di kabupaten yang bersangkutan.

E. Analisis Ratio Keuangan Daerah

Dalam analisis ini dilakukan perhitungan :

a. Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan APBN dilakukan melalui metode rata-rata tahunan (Widodo, 1990 : 30)

$$TP\ PADt = \frac{(PADt - PAD\ t\text{-}1)}{PADt\text{-}1} \times 100\ \%$$

Keterangan :

TP PADt = tingkat pertumbuhan pendapatan Asli Daerah

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

b. Mengukur Derajat Ekonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Sikka (Depdagri, 1991)

$$DOF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

2. Kinerja Ekonomi Daerah

Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas *(Bappenas, dan UNDP)*. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$IKE_{i,t} = \frac{(ECGI_{i,t} + WELFI_{i,t} + ESERI_{i,t} + (100 - POVEI_{i,t}))}{4}$$

Ketarangan :

IKE = I ndeks Kemampuan Ekonomi

ECGI = Pertumbuhan PDRB non-migas

WELFI = PDRB per kapita

ESERI = Rasio PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kabupaten

POVEI = Angka kemiskinan

D. Indeks Pelayanan Publik *(Bappenas, dan UNDP)*

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja pelayanan publik ini, maka dibuat Indeks Pelayanan Publik (PPI) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$PPI_{it} = \frac{(BEFI_{it} + (100 - BETI_{it}) + AEFI_{it} + (100 - AETI_{it}) + PHFI_{it} + PHOI_{it} + PRQI_{it})}{7}$$

Keterangan :

PPI : Indeks Pelayanan Publik

BEFI : Rasionya dibedakan antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP

AEFI : Rasionya dibedakan antara tingkat pendidikan tingkat lanjutan SLTA

BETI : Rasio siswa per guru tingkat pendidikan dasar SD dan SMP

AETI : Rasio siswa per guru tingkat lanjutan SLTA.

B. Pertumbuhan Penduduk

Analisis tingkat pertumbuhan penduduk di sini untuk melihat sejauh mana laju pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere, dan Kabupaten Induk. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peluasan permukiman yang berimplikasi pada aspek ekonomi, politik, administrasi, maupun cakupan wilayah kerja pemerintah daerah.

Rumus umum Persentase pertumbuhan penduduk NPP adalah :

$$\%\ NPP\ :\ \frac{\text{Jumlah Penduduk}_t - \text{Jumlah Penduduk}_i}{\text{Jumlah Penduduk}_i} \times 100$$

Keterangan :

% NPP	: Persentase Nilai Pertumbuhan Penduduk
Jumlah Penduduk$_t$	: Jumlah penduduk tahun berjalan
Jumlah Penduduk$_i$	: Jumlah penduduk tahun sebelumnya

Setelah melakukan perhitungan pertumbuhan penduduk, kemudian dilakukan perbandingan dengan rata-rata pertumbuhan provinsi.

C. Analisis Kemampuan Ekonomi

Dalam analisis pola spasial berdasarkan kriteria ekonomi, adalah :

1. Indeks Williamson

Untuk mengukur ketimpangan ekonomi dilakukan analisis dengan menggunakan Indeks Williamson *(Bappenas, dan UNDP)*

Rumus untuk menghitung Indeks Williamson adalah :

$$IW = \frac{\sqrt{\Sigma(Yi - Y)^2 x(ni/N)}}{Y}$$

Keterangan:
IW = Indeks Williamson
Yi = pendapatan per kapita kecamatan
Y = pendapatan per kapita kabupaten
ni = penduduk kecamatan
N = jumlah penduduk kabupaten

1.8.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah evaluatif dangan pendekatan kuantitatif, yang membandingkan faktor dan indikator yang sama antara calon daerah otonom dengan daerah induknya, dan daerah-daerah lain dalam satu provinsi atau dengan daerah-daerah otonom lainnya di wilayah Indonesia

1.8.2.1 Teknik Analisis Data

Pengkajian terhadap berbagai faktor dan indikator-indikator menggunakan macam metode analisis yaitu :

A. Analisis Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah kilometer persegi (Km^2).

Kepadatan penduduk Aritmatik yaitu jumlah rata-rata penduduk yang menempati wilayah seluas satu kilometer persegi (1 Km^2). Angka kepadatan penduduk inilah yang sering kita jumpai dan hanya disebut kepadatan penduduk saja.

Rumusnya :

$$\text{Kepadatan Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (Km}^2\text{)}}$$

Kemuadian dari hasil perhitungan tersebut akan dikaji apakah kepadatan penduduk calon daerah otonom memenuhi syarat untuk membentuk kota otonom. Dengan cara membandingkan tingkat kepadatan penduduk calon kota dengan kabupaten induk, atau kota/kabupaten seprovinsi, dan atau dengan daerah otonom baru yang sejenis.

1.8. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan alat untuk membantu suatu materi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Pada sub bab ini menguraikan metodologi penelitian yang berkenaan dengan cara dan metode yang digunakan pada penyusunan laporan penelitian ini. Adapun metodologi tersebut yang akan digunakan antara lain :

1.8.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode ini terdiri dari survei primer, dan survei sekunder untuk memperoleh data-data dasar yang dibutuhkan.

1.8.1.1 Survey Primer

Survei primer merupakan langkah dalam memperoleh data-data di lapangan, baik berupa data fisik maupun data non fisik. Adapun cara memperoleh datanya yaitu dengan melakukan observasi.

Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian-kejadian tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pengumpulan data melalui observasi langsung sangat diperlukan, karena melalui observasi ini peneliti dapat mengetahui kenyataan tentang batasan wilayah calon kota otonom.

1.8.1.2 Survey Sekunder

Survey Sekunder (*Library Research*) merupakan kajian teoritis dari pustaka atau pencarian data untuk mendukung survey primer. Data yang diperoleh biasanya berasal dari instansi terkait antara lain : Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA, Bagian Ekonomi, dan Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka (Kabupaten Induk), Dinas Pendudukan dan catatan sipil.

No	Variabel / Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Orientasi Pembanding	Kriteria	
	- Ratio Ketergantungan	- DAU - DAK - Dana Bantuan - APBD		< 10,00	Sangat Baik
				10,01 - 20,00	Baik
				20,01 - 30,00	Sedang
				30,01 - 40,00	Cukup
				40,01 - 50,00	Kurang
				>50,01	Sangat Kurang
5	**Tingkat Pelayanan Publik** - Ratio Siswa Per Sekolah	Perbandingan Jumlah Siswa per Fasilitas Persekolahan	Kabupaten Induk	Tingginya ratio menunjukan rendahnya efektifitas daya tampung dari fasilitas pendidikan terhadap jumlah pelajar,sedangkan rendahnya ratio menunjukan tingginya efektifitas daya tampung	
	- Ratio Siswa Per Guru	Perbandingan Jumlah Siswa per Tenaga Pengajar	Kabupaten Induk	Tingginya ratio menunjukan rendahnya efektifitas proses belajar mengajar,sedangkan rendahnya ratio menunjukan tingginya efektifitas proses belajar mengajar	
	- Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	Perbandingan Jumlah Fasilitas Kesehatan per 10.000 penduduk	Kabupaten Induk	Tingginya ratio menunjukan rendahnya efektifitas pelayanan kesehatan	
	- Ketersediaan Tenaga Kesehatan	Perbandingan Tenaga Kesehatan per 10.000 penduduk	Kabupaten Induk	Tingginya ratio menunjukan rendahnya efektifitas pelayanan kesehatan	
	- Kualitas Infrastruktur	% Perbandingan Jalan dengan kondisi baik	Kabupaten Induk	Prosentasi tinggi menunjukan kualitas infrastruktur yang baik	

Sumber : Diolah dari landasan teori dan tinjauan pustaka

No	Variabel / Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Orientasi Pembanding	Kriteria	
				40,01 - 50,00	Baik
				>50,01	Sangat Baik
	- Tingkat Pertumbuhan APBD	- APBD	-	< 10,00	Sangat Kurang
				10,01 - 20,00	Kurang
				20,01 - 30,00	Cukup
				30,01 - 40,00	Sedang
				40,01 - 50,00	Baik
				>50,01	Sangat Baik
	- Derajat Otonomi Fiskal	- PAD - Total Penerimaan Daerah	-	< 10,00	Sangat Kurang
				10,01 - 20,00	Kurang
				20,01 - 30,00	Cukup
				30,01 - 40,00	Sedang
				40,01 - 50,00	Baik
				>50,01	Sangat Baik
	- Ratio DAU terhadap APBD	- Dana Alokasi Umum - APBD	-	< 10,00	Sangat Baik
				10,01 - 20,00	Baik
				20,01 - 30,00	Sedang
				30,01 - 40,00	Cukup
				40,01 - 50,00	Kurang
				>50,01	Sangat Kurang
	- Indeks Kemampuan Rutin	- Dana Alokasi Umum - PAD - Dana Bagi Hasil - Belanja Rutin	-	< 10,00	Sangat Kurang
				10,01 - 20,00	Kurang
				20,01 - 30,00	Cukup
				30,01 - 40,00	Sedang
				40,01 - 50,00	Baik
				>50,01	Sangat Baik

Tabel 1.1. Tabel Rumusan Variabel

No	Variabel / Sub Variabel	Data Yang Dibutuhkan	Orientasi Pembanding	Kriteria
1	**Kependudukan**			
	- Kepadatan Penduduk	- Jumlah Penduduk - Luas Wilayah	Kota - Kota Sejenis	≥ rata - rata (448 Jiwa / Km²) ≥ 50 Jiwa / Ha
	- Pertumbuhan Penduduk	- Jumlah Penduduk	Rata-rata Provinsi NTT	Positif ≥ rata-rata Provinsi (2 %)
2	**Kemampuan Ekonomi**			
	- Ketimpangan Ekonomi	- Pendapatan Per Kapita Kabupaten - Pendapatan Per Kapita Per Kecamatan - Jumlah Penduduk Kabupaten - Jumlah Penduduk Kecamatan	Antar Kecamatan - Kecamatan calon Kota Maumere dan Kecamatan - kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka (Induk)	Mendekati 0 berarti terjadi pemerataan jika mendekati 1 berarti terjadi ketimpangan
	- Kinerja Ekonomi Daerah	- Pertumbuhan PDRB Non Migas - PDRB Perkapita - Ratio PDRB - Jumlah Penduduk Miskin	- Antar Kabupaten / Kota dalam Provinsi	Indeks Tinggi artinya menunjukan PDRB yang tinggi dan rendahnya jumlah penduduk miskin
4	**Kemampuan Keuangan Daerah** - Tingkat Pertumbuhan PAD	- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	< 10,00 Sangat Kurang 10,01 - 20,00 Kurang 20,01 - 30,00 Cukup 30,01 - 40,00 Sedang

b. Kemampuan Ekonomi
   - ✓ Ketimpangan wilayah
   - ✓ Kemampuan Ekonomi

c. Kemampuan Keuangan
   - ✓ Tingkat Pertumbuhan PAD
   - ✓ Tingkat Pertumbuhan APBD
   - ✓ Derajat Otonomi Fiskal
   - ✓ Indeks Kemampuan Rutin
   - ✓ Ratio Ketergantungan

d. Tingkat Pelayanan Publik
   - ✓ Ratio Siswa Per sekolah
   - ✓ Ratio Siswa Per Guru
   - ✓ Jumlah Fasilitas Kesehatan
   - ✓ Jumlah Tenaga Kesehatan
   - ✓ Kualitas Infrastruktur

Untuk lebih jelas berkaitan dengan variabel penelitian dan tolok ukur dapat diuraikan dalam tabel rumusan variabel berikut.

Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan kriteria kota berdasarkan beberapa syarat, yaitu :

a. Kepadatan penduduk per kilometer persegi sebanyak 5000 orang atau lebih;
b. Rumah tangga yang memiliki mata pencaharian terutama di bidang pertanian kurang dari 25 %;
c. Memiliki lebih dari delapan sarana perkotaan.

Sedangkan penelitian Universitas Padjadjaran (2000)[35], kepadatan penduduk kota di atas 50 jiwa per ha, dengan kegiatan non perekonomian di atas 75 %. Sejalan dengan berbagai pengertian dan karakteristiknya, dapat dikatakan bahwa kota mempunyai cirri – cirri yang berlaku umum dan universal. Kota adalah sebuah tempat pemukiman yang permanen dengan tingkat kepadatan penduduknya mencolok, yang corak masyarakat heterogen dan yang lebih luas daripada sebuah keluarga atau klan. Kota ada dan berkembang dari berbagai bentuk pelayanan (keagamaan, politik, administrasi, ekonomi pasar, informasi, industri, hiburan dan berbagai bentuk pelayanan jasa pada umumnya) (Suparlan, 1991 dalam *Pemekaran Kabupaten Sikka – Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3PRO)*).

1.7. Rumusan Variabel

Dari tinjauan pustaka dan landasan teori di atas dapat dirumuskan variabel pemelitian dan sub variabel dengan tolok ukur masing – masing. Berikut ini merupakan rumusan variabel dan sub variabel yang digunakan dalam "Kajian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom" :

a. Kependudukan
   - ✓ Kepadatan Penduduk
   - ✓ Pertumbuhan Penduduk

[35] Ibid, Hal. 32

1.6.5. Konsep Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah kabupaten menjadi beberapa wilayah kabupaten baru, pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon daerah otonom baru yang akan dibentuk, perlu memiliki basis sumbar daya yang seimbang antara satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak muncul terjadinya disparitas yang mencolok pada masa yang akan datang. Selanjutnya dalam usaha pemekaran wilayah, akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru akan mempengaruhi aktivitas orang atau masyarakat, dimana ada yang merasa diuntungkan dan sebaliknya dalam meperoleh pelayanan dari pusat pemerintah baru, disebabkan jarak pergerakan berubah. (P4N, UGM, 1997).[32]

Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan serta mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, perekonomian daerah, pengembangan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya tujuan pemekaran wilayah, sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah, dan antar sector, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup[33].

1.6.6. Teori Kota

Pengertian mengenai kota berbeda-beda rumusannya, tergantung dari disiplin ilmu dan ahli yang mendefinisikannya. Bourne (1982)[34] mengemukakan bahwa definisi kota secara umum mengandung tiga batasan yakni, batas ambang jumlah penduduk, skala geografi untuk menampung area terbangun, dan memiliki daya tarik akan pekerjaan bagi penduduk kota dan daerah sekitarnya.

---

[32] Ibid.

[33] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, CV. Eko Wijaya, Jakarta, 2008

[34] Pemekaran Kabupaten Sikka – Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3PRO), 2008, Hal. 31

pembangunan nasional secara keseluruhan. Menurut Poernomosidi (dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan , 2006 : Hal 261-277), bahwa pengembangan wilayah dimungkinkan karena ada modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, dan sumber daya alam, berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Arus barang sebagai salah satu gejala ekonomi, merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, antar pulau, dan antar Negara.[30]

Dalam konteks pembangunan wilayah, pendekatan berdasarkan konsep ekonomi paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun praktis. Tujuan dari konsep ini adalah pembangunan pada sector – sector utama pada lokasi – lokasi tertentu, sehingga akan menyebarkan kemajuan ke seluruh wilayah. Beberapa konsep pengembagan wilayah [31] , yaitu :

a. Membangkitkan kembali daerah terbelakang *(depressed area),* sebagai daerah yang memiliki karakteristik tingginya tingkat pengangguran, pendapatan perkapita rendah, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, dan rendahnya tingkat pelayanan fasilitas dan utilitas yang ada.
b. Mendorong dekonsentrasi wilayah, konsep ini untuk menekan tingkat konsentrasi wilayah, dan bertujuan untuk membentuk struktur ruang yang tepat, terutama pada beberapa bagian di wilayah, non metropolitan yang berarti untuk menekan perannya terlalu besar.
c. Memodifikasi sistem kota-kota, merupakan sebagai pengontrol urbanisasi menuju pusat-pusat pertumbuhan, yaitu dengan adanya pengaturan sistem perkotaan, telah memiliki hirarki yang terstruktur dengan baik, dan diharapkan akan dapat mengurangi migrasi penduduk ke kota besar.
d. Pencapaian terhadap keseimbangan wilayah, hal ini muncul dikarenakan kurang memuaskannya struktur ekonomi inter regional yang biasanya dengan mempertimbangkan tingkat kesejahtraan, serta yang berhubungan dengan belum dimanfaatkannya sumber daya alam pada beberapa daerah.

---

[30] Ibid.
[31] Ibid.

1.6.4. Konsep Pengembangan Wilayah

Wilayah dapat dibedakan berdasarkan cara pandang terkait dengan kondisi atau berdasarkan fungsinya[27] yaitu :

a. Wilayah Subjektif, yaitu wilayah merupakan alat untuk mengidentifikasikan suatu lokasi yang berdasarkan kriteria tertentu atau tujuan tertentu,
b. Wilayah Objektif, yaitu wilayah itu benar – benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah.

Dalam analisisi wilayah dikenal tiga tipe[28], yaitu

a. Wilayah fungsional, adanya saling berinteraksi antar komponen – komponen di dalam dan di luar wilayahnya, wujud wilayah sering dinamakan wilayah nodal yang didasari susunan (system) yang berhirarki dari suatu hubungan di antara simpul – simpul perdagangan.
b. Wilayah homogen maksudnya adanya kemiripan relatif dalam wilayah.
c. Wilayah administrative, yaitu wilayah ini dibentuk untuk kepentingan wilayah pengelolaan atau organisasi oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain.

Sementara itu, tujuan wilayah (region), menurut Sihotang (1997) [29] *regionalisme* adalah suatu usaha untuk menentukan batas-batas daerah yang biasanya lebih besar daripada daerah struktur pemerintahan lokal, dengan maksud mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah dan perencanaan lokal dan nasional.

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Dalam konteks nasional adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah menyebabkan tidak tercapainya tujuan

---

[27] Perencanaan Pembangunan Wilayah, Drs. Robinson Tarigan, M.R.P. Bumi Aksara 2005
[28] Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Kajian Ekonomi Negara Berkembanga, Malik Cahyadin, 2006
[29] Ibid

NO	FAKTOR PENENTU	TINGKATAN		BOBOT	Nilai bobot (x 100)
		I	II		
14	**Tingkat Pelayanan Publik**	**0.589**			58.9
15	Jumlah Siswa Per Sekolah		0.09	0.052	5.2
16	Jumlah Siswa Per Guru		0.26	0.152	15.2
17	Jumlah Fasilitas Kesehatan		0.23	0.137	13.7
18	Jumlah Tenaga Kesehatan		0.19	0.110	11.0
19	Kualitas Infrastruktur		0.23	0.137	13.7
20	Jumlah	**1.000**		**1.000**	**100.0**

Sumber : Hasil Analisis

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa bobot akhir dari masing – masing faktor penentu telah sesuai jumlahnya dengan setiap tingkatan masing – masing. Tingkat I untuk kependudukan, merupakan hasil jumlah bobot dari tingkat II yaitu kepadatan penduduk, dan pertumbuhan penduduk. Begitu pula bobot-bobot selanjutnya dari setiap tingkatan memiliki bobot yang sama dengan jumlah bobot tingkatan di bawahnya. Hasil perhitungan dari jumlah semua bobot adalah 1 (100%) hal tersebut dinyatakan bahwa hasil perhitungan dapat diterima.

No.	FAKTOR PENENTU	VP
12	Jumlah Siswa Per Guru	0.26
13	Jumlah Fasilitas Kesehatan	0.23
14	Jumlah Tenaga Kesehatan	0.19
15	Kualitas Infrastruktur	0.23

Sumber : Hasil Analisis

3.5.2. Bobot Akhir Faktor Penentu

Bobot akhir faktor penentu merupakan pembobotan vektor prioritas. Menjumlahakan semua entri prioritas terbobot yang bersangkutan dengan entri prioritas dari tingkat bawah berikutnya, dan seterusnya. Sehingga hasilnya adalah vector prioritas menyeluruh untuk tingkat hirarki paling bawah, dengan nilai akhir adalah 100 % (1). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.33. Pembobotan Faktor Penentu

NO	FAKTOR PENENTU	TINGKATAN		BOBOT	Nilai bobot (x 100)
		I	II		
1	**Kependudukan**	**0.028**			**2.8**
2	Kepadatan Penduduk		0.13	0.004	0.4
3	Pertumbuhan Penduduk		0.87	0.024	2.4
4	**Ekonomi**	**0.185**			18.5
5	Ketimpangan Ekonomi		0.10	0.019	1.9
6	Kinerja Ekonomi Daerah		0.90	0.167	16.7
7	**Kemampuan Keuangan**	**0.198**			19.8
8	Pertumbuhan PAD		0.30	0.059	5.9
9	Pertumbuhan APBD		0.07	0.015	1.5
10	Derajat Otonomi Fiskal		0.26	0.052	5.2
11	Ratio Dana Alokasi Umum		0.05	0.009	0.9
12	Indeks Kemampuan Rutin		0.28	0.056	5.6
13	Ratio Ketergantungan		0.04	0.008	0.8

3.5.1. Nilai Vektor Prioritas (VP)

Nilai Vektor Prioritas (VP) diperoleh dari hasil perhitungan Eigen Vektor (EV), dimana nilai EV pada setiap faktor penentu dibagi jumlah keseluruan EV faktor penentu, sehingga jumalh total VP adalah 1 (100%).

$$VP = \frac{\text{Nilai EV}}{\text{Jumlah Total Nilai EV}}$$

Semakin tinggi nilai VP, maka semakin tinggi prioritasnya. Untuk lebih jelasnya nilai VP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.32. Nilai Vektor Priorotas Indikator dan Sub Indikator Tingkat Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

NO	FAKTOR PENENTU	VP
	TINGKAT I	
1	Kependudukan	**0.028**
2	Ekonomi	**0.185**
3	Kemampuan Keuangan	**0.198**
4	Tingkat Pelayanan Publik	**0.589**
	TINGKAT II	
1	Kepadatan Penduduk	0.13
2	Pertumbuhan Penduduk	0.87
3	Ketimpangan Ekonomi	0.10
4	Kinerja Ekonomi Daerah	0.90
5	Pertumbuhan PAD	0.30
6	Pertumbuhan APBD	0.07
7	Derajat Otonomi Fiskal	0.26
8	Ratio Dana Alokasi Umum	0.05
9	Indeks Kemampuan Rutin	0.28
10	Ratio Ketergantungan	0.04
11	Jumlah Siswa Per Sekolah	0.09

Grafik di atas menunjukan posisi kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere menepati posisi atau kedudukan dengan indeks pelayanan publik yang tinggi ada 2 kecamatan yaitu Kecamatan Alok dan Alok Timur, sedangkan yang memiliki indeks pelayanan publik sedang yaitu Kecamatan Nelle, sedangkan 2 kecamatan memiliki indeks pelayanan publik rendah dan cukup. Hal ini menunjukan belum meratanya dan optimalnya tingkat pelayanan publik di calon Kota Maumere.

3.5 Analisis Penentuan Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

Untuk penentuan hasil penilaian dari setiap indikator maka dilakukan pembobotan dengan analisis proses hirarki, atau *analytical procces hierarchy* (AHP). AHP merupakan salah satu model pengambilan keputusan yang sering digunakan. Metode ini banyak digunakan untuk memilih strategi dalam mewujudkan tujuannya. Menurut Bourgeous (2005) dan Wayan (2007), AHP umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas dari berbagai alternatif/pilihan yang ada, dan pilihan-pilihan tersebut bersifat kompleks atau multi criteria. Secara umum, dengan menggunakan AHP, prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, logis, transparansi, dan partisipasif. AHP akan sangat cocok digunakan untuk penyusunan prioritas kebijakan publik yang menuntut transparansi dan partisipasi.

Dalam analisis ini quisioner diberikan kepada para ahli yang dianggap kompeten dalam bidangnya, antara lain :

1. Prof. Dr. Banavantura NGW, MS : yang merupakan ketua program studi pascasarjanan administrasi publik (MAP) Universitas Merdeka Malang.
2. Dr. Sasongko, MS : yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dimas Wisnu Adrianto, ST, MT, M. Env. Man : yang merupakan dosen pada jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Brawijaya Malang.

No.	Kecamatan	BEFI	AEFI	BETI	AETI	PHOI	PHFI	PRQI	PPI	Kategori
10	Alok Barat	267	0	17	0	0	3	65	515	Rendah
11	Bola	104	95	12	6	14	3	55	450	Rendah
12	Waigete	197	0	18	0	17	2	50	446	Rendah
13	Doreng	178	0	17	0	25	2	35	421	Rendah
14	Kangae	156	0	15	0	23	2	55	419	Rendah
15	Magepanda	182	0	17	0	18	2	35	418	Rendah
16	Mego	147	0	15	0	18	3	40	389	Rendah
17	Waiblama	151	0	14	0	27	3	25	388	Rendah
18	Palue	143	0	17	0	18	3	35	379	Rendah
19	Tanawawo	119	0	15	0	15	3	45	364	Rendah
20	Mapitara	138	0	16	0	0	3	30	352	Rendah
21	Koting	96	0	11	0	5	3	45	334	Rendah

Sumber : Hasil analisis

Dari tabel di atas dapat telihat secara jelas bahwa kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere, berada pada posisi teratas dengan indeks tertinggi, dan beberapa pada posisi tengah, dengan indeks yang sedang. Hal ini menunjukan kontribusi yang sangat besar dari kecamatan-kecamatan yang masuk calon Kota Maumere terhadap tingkat pelayanan publik di Kabupaten Sikka.

Untuk lebih jelasnya dapat tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.16. Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sikka

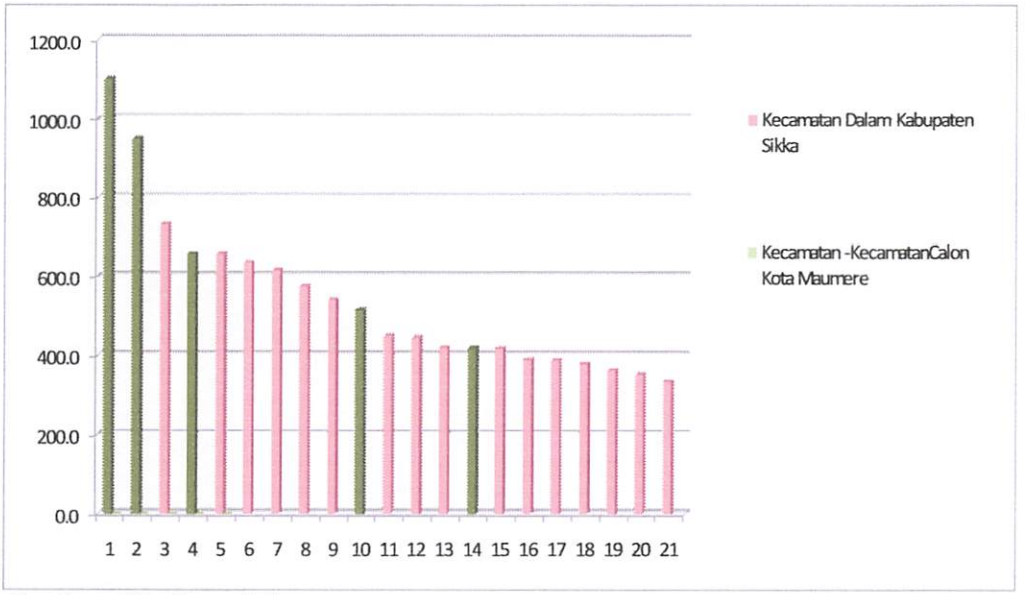

Sumber : Hasil analisis

Dari tabel dan grafik perbandingan di atas, menunjukan prosentasi jalan dengan kondisi baik di calon Kota Maumere lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk, dengan prosentasi 60%.

3.4.4 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan perhitungan tingkat pelayanan publik di setiap kecamatan dengan menggunakan tolok ukur yang telah dijabarkan atau dianalisis di atas seperti :

a. Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Sekolah (BEFI)
b. Ratio Siswa Sekolah Menengah Per Sekolah (AEFI)
c. Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Guru (BETI)
d. Ratio Siswa Sekolah Menengah Per Guru (AETI)
e. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (PHFI)
f. Ketersediaan Tenaga Kesehatan (PHOI)

Indeks pelayanan publik digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat pelayanan publik kecamatan – kecamatan dalam Kabupaten Sikka, dan melihat posisi kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere di antara kecamatan-kecamatan lainnya.

Tabel 3.31. Indeks Pelayanan Publik Per Kecamatan di Kabupaten Sikka Tahun 2009

No.	Kecamatan	BEFI	AEFI	BETI	AETI	PHOI	PHFI	PRQI	PPI	Kategori
1	Alok	266	551	18	17	54	4	65	1101	Tinggi
2	Alok Timur	242	452	18	15	19	3	70	950	Tinggi
3	Lela	118	349	12	13	41	5	50	733	Sedang
4	Nelle	119	251	11	15	48	5	65	657	Sedang
5	Talibura	184	227	17	13	16	3	60	657	Sedang
6	Paga	151	237	14	13	15	4	60	636	Sedang
7	Kewapante	196	186	18	10	21	3	40	615	Sedang
8	Nita	135	186	14	8	18	2	60	576	Rendah
9	Hewokloang	137	208	14	15	0	4	25	541	Rendah

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere

Tabel di atas menunjukan prosentasi kualitas jalan di setiap kecamatan di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere.

Tabel 3.30. Tabel Perbandingan Rata – Rata Prosentasi Jalan Dengan Kondisi Baik Terhadap Total Keseluruan Jalan

No.	Kecamatan	Prosentasi (%) Panjang Jalan
1	Kabupaten Sikka	40
2	Calon Kota Maumere	60

Sumber : Hasil analisis

Tabel perbandingan di atas menunjukan bahwa prosentasi jalan dengan kondisi baik terhadap keseluruhan jalan yang ada di calon Kota Maumere lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk dengan rata – rata di atas 50 %.

Untuk lebih jelasnya dapat tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.15. Perbandingan Rata- Rata Kualitas Jalan di Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

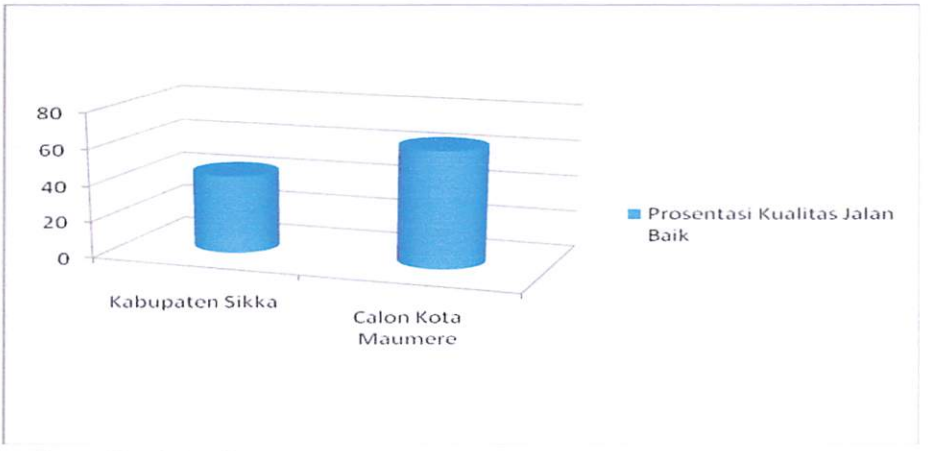

Sumber : Hasil Analisis

3.4.3 Kualitas Infrastruktur (PRQI)

Ketersediaan pelayanan infrastruktur juga memainkan peranan yang penting dalam pembangunan daerah. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan pelayanan publik, serta menjadi satu instrumen untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya. Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan. Jalan memang merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur.

Untuk lebih jelas berkaitan dengan kualitas infrastruktur atau prosentasi jalan dalam kondisi baik, terhadap total panjang ruas jalan di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29. Kualitas Infrastruktur Kabupaten Sikka Tahun 2009

No.	Kecamatan	Prosentasi (%) Panjang Jalan
1	Nita	60
2	Magepanda	35
3	Kewapante	40
4	Hewokloang	25
5	Nelle	65
6	Koting	45
7	Kangae	55
8	Bola	55
9	Doreng	35
10	Mapitara	30
11	Alok	65
12	Alok Timur	70
13	Alok Barat	65
14	Paga	60
15	Tanawawo	45
16	Mego	40
17	Lela	50
18	Waigete	50
19	Talibura	60
20	Waiblama	25
21	Palue	35

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 3.28. Perbandingan Ratio Fasilitas Kesehatan Antara Calon Kota Maumere Dengan Kabupaten Sikka

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Ratio /10000	PHOI
1	Kabupaten Sikka	371	211570	21	18
2	Calon Kota Maumere	294	100313	10	29

Sumber : Hasil Analisis

Perbandingan ratio fasilitas kesehatan antara calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.14. Perbandingan Ratio Fasilitas Kesehatan Antara Calon Kota Maumere Dengan Kabupaten Sikka

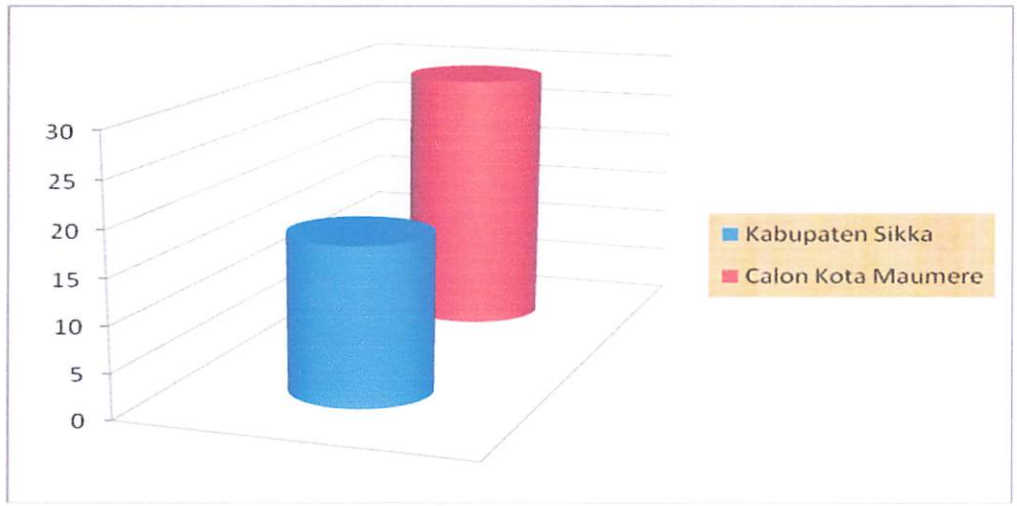

Sumber : Hasil Analisis

Tabel di atas menunjukan bahwa ratio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk di calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka menunjukan bahwa ratio tertinggi terdapat di calon Kota Maumere hal ini menunjukan bahwa Mumere memilki ketersediaan tenaga medis yang kurang memadai jika dibandingkan dengan Kabuupaten Sikka, sebagai kabupaten induk.

Tabel 3.27. Ratio Tenaga Kesehatan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka Tahun 2009

No.	Kecamatan	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Penduduk	Ratio /10000	PHOI
1	Nita	40	22707	2	18
2	Magepanda	23	12593	1	18
3	Kewapante	29	14097	1	21
4	Hewokloang	0	9648	1	0
5	Nelle	28	5863	1	48
6	Koting	3	6544	1	5
7	Kangae	38	16776	2	23
8	Bola	16	11848	1	14
9	Doreng	28	11269	1	25
10	Mapitara	0	6543	1	0
11	Alok	169	31416	3	54
12	Alok Timur	59	31049	3	19
13	Alok Barat	0	15209	2	0
14	Paga	26	16925	2	15
15	Tanawawo	18	11770	1	15
16	Mego	28	15810	2	18
17	Lela	51	12464	1	41
18	Waigete	35	20071	2	17
19	Talibura	33	20475	2	16
20	Waiblama	21	7856	1	27
21	Palue	20	10950	1	18

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere

Tabel di atas dapat kita lihat ratio tenaga medis di kecamatan-kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Sikka, dan dapat tergambar kondisi ketersediaan tenaga medis di calon Kota Maumere.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam tabel perbandingan berikut.

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere

Dari tabel di atas dapat kita lihat ratio fasilitas kesehatan di kecamatan-kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Sikka, dan dapat tergambar kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan di calon Kota Maumere. Semakin besar ratio ketersediaan maka semakin memadai fasilitas kesehatan yang ada. Misalnya di Kabupaten Sikka ratio 3, makan setiap 10.000 penduduk Sikka dilayani oleh 3 fasilitas kesehatan yang ada, demikianpun persebaran per kecamatan. Tabel di atas menunjukan ratio ketersediaan fasilitas di kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere rata-rata berada di atas atau sama dengan Kabupaten Sikka.

Tabel 3.26. Ratio Fasilitas Kesehatan Per 10.000 Penduduk Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Fas. Kesehatan	Jumlah Penduduk	Ratio /10000	PHFI
1	Kabupaten Sikka	61	211570	21	3
2	Calon Kota Maumere	30	100313	10	3

Sumber : Hasil Analisis

Tabel di atas menunjukan tingkat pelayanan yang sama antara ketersediaan fasilitas kesehatan di calon Kota Maumere, dengan Kabupaten Sikka yang merupakan kabupaten induk.

3.4.2.2. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kesehatan menggunakan rasio tenaga kesehatan termasuk dokter, paramedis dan tenaga non paramedis untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk lebih jelasnya ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere, dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

3.4.2.1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (PHFI)

Di bidang kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan diukur dengan jumlah fasilitas kesehatan untuk tiap 10.000 orang penduduk. Ukuran jumlah penduduk ini digunakan untuk lebih mengarahkan ketersediaan fasilitas kesehatan pada tingkat kecamatan. Untuk lebih jelasnya ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere, dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25. Ratio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk Kabupaten Sikka 2009

No.	Kecamatan	Jumlah Fas. Kesehatan	Jumlah Penduduk	Ratio /10000	PHFI
1	Nita	5	22707	2	2
2	Magepanda	3	12593	1	2
3	Kewapante	4	14097	1	3
4	Hewokloang	4	9648	1	4
5	Nelle	3	5863	1	5
6	Koting	2	6544	1	3
7	Kangae	4	16776	2	2
8	Bola	3	11848	1	3
9	Doreng	2	11269	1	2
10	Mapitara	2	6543	1	3
11	Alok	11	31416	3	4
12	Alok Timur	8	31049	3	3
13	Alok Barat	4	15209	2	3
14	Paga	6	16925	2	4
15	Tanawawo	4	11770	1	3
16	Mego	4	15810	2	3
17	Lela	6	12464	1	5
18	Waigete	5	20071	2	2
19	Talibura	6	20475	2	3
20	Waiblama	2	7856	1	3
21	Palue	3	10950	1	3

Sumber : Hasil Analisis

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.13. Grafik Perbandingan Ratio Siswa Sekolah Menengah Per Guru Antara Calon Kota Maumere Dengan Kabupaten Sikka

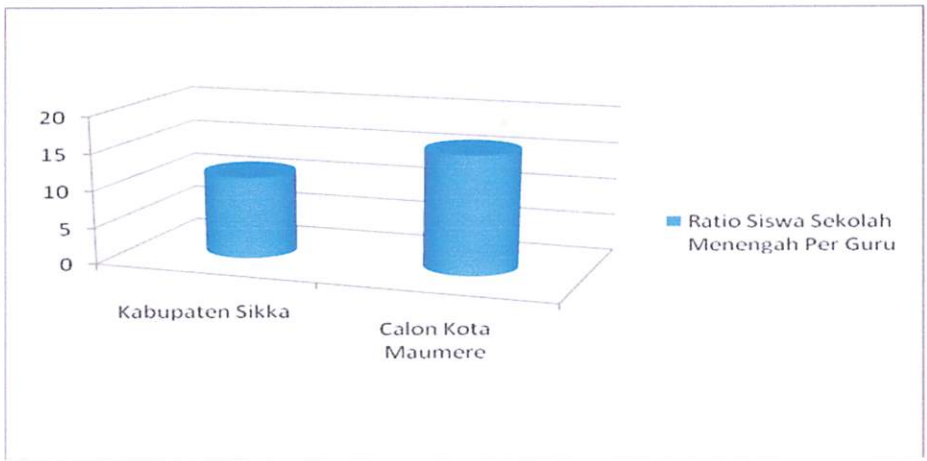

Sumber : Hasil Analisis

Tabel dan grafik di atas menunjukan ratio siswa per guru sekolah menengah di calon Kota Maumere lebih tinggi jka dibandingkan dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk. Ratio Jumlah siswa per guru sekolah menengah, menunjukan tingkat pelayanan tenaga pendidik terhadap jumlah pelajar sekolah menengah. Ratio yang tinggi menunjukan rendahnya efektifitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu dari analisis di atas menunjukan bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat ketersediaan tenaga pendidikan di calon masih kurang jika dibandingkan dengan Kabupaten induk.

3.4.2 Pelayanan Bidang Kesehatan

Pemekaran daerah seharusnya secara nyata mendorong pemerataan pelayanan kesehatan, terutama di bidang pengadaan sarana isik. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa kualitas fasilitas kesehatan yang dibangun juga harus ditingkatkan, agar sasaran pembangunan bidang kesehatan tercapai.

No.	Kecamatan	Jumlah Guru		Total Guru	Jumlah Siswa		Total Siswa	Ratio AETI
		SMA	SMK		SD	SMP		
6	Koting	-	-	-	-	-	-	-
7	Kangae	-	-	-	-	-	-	-
8	Bola	18	-	18	94	-	112	6
9	Doreng	-	-	-	-	-	-	-
10	Mapitara	-	-	-	-	-	-	-
11	Alok	132	222	354	2457	3041	5852	17
12	Alok Timur	129	91	220	1384	1772	3376	15
13	Alok Barat	-	-	-	-	-	-	-
14	Paga	39	-	39	471	-	510	13
15	Tanawawo	-	-	-	-	-	-	-
16	Mego	-	-	-	-	-	-	-
17	Lela	-	30	30	-	348	378	13
18	Waigete	-	-	-	-	-	-	-
19	Talibura	20	19	39	303	148	490	13
20	Waiblama	-	-	-	-	-	-	-
21	Palue	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere

Dari tabel di atas dapat kita bandingkan antara ketersediaan tenaga pendidik untuk sekolah menengah di calon Kota Maumere dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Tabel 3.24. Perbandingan Ratio Jumlah Siswa Sekolah Menengah Terhadap Guru Antara Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Guru		Total Guru	Jumlah Siswa		Total Siswa	Ratio AETI
		SMA	SMK		SMA	SMK		
1	Kabupaten Sikka	135	73	208	1453	673	2334	11
2	Calon Kota Maumere	261	331	592	3841	5063	9496	16

Sumber : Hasil Analisis

Grafik 3.12. Grafik Perbandingan Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Guru Antara Calon Kota Maumere Dengan Kabupaten Sikka

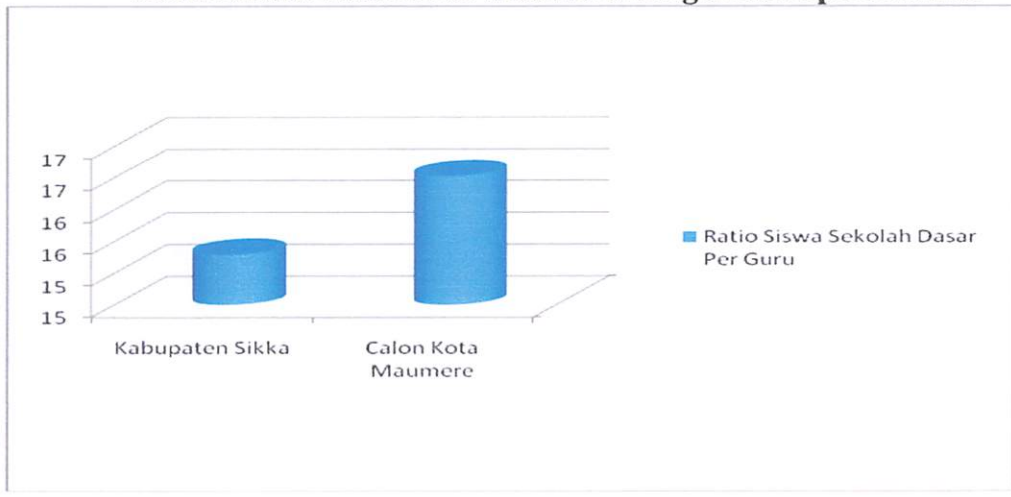

Sumber : Hasil analisis

Tabel dan grafik di atas, menunjukan tingginya ratio siswa per guru sekolah dasar di calon Kota Maumere jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka, sebagai kabupaten induk. Tingginya ratio, menunjukan rendahnya efektifitas proses belajar mengajar di calon Kota Maumere. Hal ini menunjukan ketersediaan tenaga pengajar, untuk memberikan pelayanan kepada siswa-siswi sekolah dasar (SD) di calon Kota Maumere masih kurang jika dibandingkan dengan kabupaten induk.

Setelah melihat gambaran ketersediaan tenaga guru untuk sekolah dasar, selanjutnya adalah ratio siswa sekolah menengah per guru, yang tergambar jelas dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.23. Ratio Siswa Per Guru Sekolah Menengah di Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2009/2010

No.	Kecamatan	Jumlah Guru		Total	Jumlah Siswa		Total	Ratio
		SMA	SMK	Guru	SD	SMP	Siswa	AETI
1	Nita	25	-	25	185	-	210	8
2	Magepanda	-	-	-	-	-	-	-
3	Kewapante	18	24	42	193	177	412	10
4	Hewokloang	15	-	15	207	-	222	15
5	Nelle	-	18	18	-	250	268	15

| | | |

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere

Tabel 3.22 menunjukan ratio siswa per guru sekolah dasar di Kabupaten Sikka dan dari tabel tersebut di atas dapat kita tinjau ratio siswa per sekolah dasar di kecamatan – kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere.

Berikut ini dapat kita lihat perbandingan antara ratio siswa sekolah dasar per guru calon Kota Maumere dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Tabel 3.22. Perbandingan Ratio Siswa Sekolah Dasar Per Guru Calon Kota Maumere dengan Kabupaten Sikka

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Guru 2010			Total Guru	Jumlah Siswa 2010			Total Siswa	Ratio BETI
		SLB	SD	SMP		SLB	SD	SMP		
1	Kabupaten Sikka	0	2089	569	2658	0	33295	7361	40656	15
2	Calon Kota Maumere	33	847	406	1286	385	14513	6353	21251	17

Sumber : Hasil Analisis

Ratio Jumlah siswa per guru sekolah dasar jumlah tenaga pendidik terhadap jumlah pelajar. Ratio yang tinggi menunjukan rendahnya efektifitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu dari analisis di atas menunjukan bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat ketersediaan tenaga pendidikan di calon masih kurang jika dibandingkan dengan Kabupaten induk.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

publik melalui indeks pelayanan kita dapat melihat ratio siswa per guru yang dibedakan

- ✓ Pendidikan Dasar (BEFI)
- ✓ Pendidikan Menengah (AEFI)

Adapun ratio siswa per guru di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21. Ratio Siswa Per Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sikka Tahun Ajaran 2009/2010

No.	Kecamatan	Jumlah Guru 2010			Total Guru	Jumlah Siswa 2010			Total Siswa	Ratio BETI
		SLB	SD	SMP		SLB	SD	SMP		
1	Nita	-	216	56	272	-	2937	974	3911	14
2	Magepanda	-	91	25	116	-	1695	304	1999	17
3	Kewapante	-	121	32	153	-	2268	482	2750	18
4	Hewokloang	-	102	45	147	-	1574	474	2048	14
5	Nelle	-	77	34	111	-	710	483	1193	11
6	Koting	-	74	11	85	-	815	144	959	11
7	Kangae	-	146	54	200	-	2155	815	2970	15
8	Bola	-	123	28	151	-	1406	363	1769	12
9	Doreng	-	116	28	144	-	2112	380	2492	17
10	Mapitara	-	71	7	78	-	1133	109	1242	16
11	Alok	14	238	107	359	85	4381	1915	6381	18
12	Alok Timur	19	258	149	426	300	4695	2506	7501	18
13	Alok Barat	-	128	62	190	-	2572	634	3206	17
14	Paga	-	211	59	270	-	2893	881	3774	14
15	Tanawawo	-	108	40	148	-	1891	370	2261	15
16	Mego	-	150	43	193	-	2432	508	2940	15
17	Lela	-	142	32	174	-	1708	412	2120	12
18	Waigete	-	202	47	249	-	3881	646	4527	18
19	Talibura	-	217	65	282	-	3863	926	4789	17
20	Waiblama	-	68	27	95	-	1206	151	1357	14
21	Palue	-	77	24	101		1481	237	1718	17

Sumber : Hasil analisis

Tabel 3.20. Perbandingan Ratio Siswa Per Sekolah Menengah Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Sekolah		Total Sekolah	Jumlah Siswa		Total Siswa	Ratio AEFI
		SMA	SMK		SMA	SMK		
1	Kabupaten Sikka	27	27	54	11523	15189	26766	496
2	Calon Kota Maumere	9	9	18	3841	5063	8922	1254

Sumber : Hasil analisis

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.11. Perbandingan Ratio Siswa Per Sekolah Menengah Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

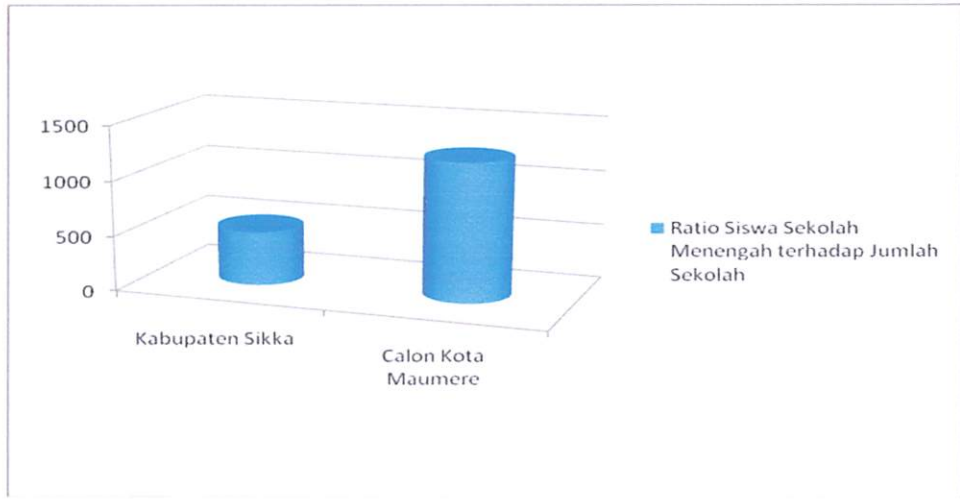

Sumber : Hasil analisis

Perbandingan di atas menunjukan bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah menengah yang masih lebih jika dibandingkan dengan kabupaten induk. Hal ini berarti efektifitas daya tampung sekolah di calon Kota Maumere masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten induk.

3.4.1.2. Jumlah Siswa Per Guru

Jumlah siswa per guru menunjukan ratio/tingkat perbandingan antara siswa terhadap ketersediaan tenaga pengajar. Untuk mengatahui tingkat pelayanan

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Total	Jumlah Siswa		Total	Ratio
		SMA	SMK	Sekolah	SMA	SMK	Siswa	AEFI
8	Bola	1	-	1	94	-	95	95
9	Doreng	-	-	-	-	-	-	-
10	Mapitara	-	-	-	-	-	-	-
11	Alok	4	6	10	2457	3041	5508	551
12	Alok Timur	5	2	7	1384	1772	3163	452
13	Alok Barat	-	-	-	-	-	-	-
14	Paga	2	-	2	471	-	473	237
15	Tanawawo	-	-	-	-	-	-	-
16	Mego	-	-	-	-	-	-	-
17	Lela	-	1	1	-	348	349	349
18	Waigete	-	-	-	-	-	-	-
19	Talibura	1	1	2	303	148	453	227
20	Waiblama	-	-	-	-	-	-	-
21	Palue	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil analisis

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere

Tabel 3.19 menunjukan ratio siswa per sekolah menengah di Kabupaten Sikka dan dari tabel tersebut di atas dapat kita tinjau ratio siswa persekolah dasar di kecamatan – kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere.

Ratio Jumlah siswa per sekolah menengah menunjukan daya tampung dari setiap sekolah terhadap keberadaan siswa sekolah menengah. Tingginya ratio menunjukan rendahnya efektifitas daya tampung dari fasilitas pendidikan terhadap jumlah pelajar. Oleh karena itu dari analisis di atas menunjukan bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan di calon masih kurang jika dibandingkan dengan Kabupaten induk.

Grafik 3.10. Perbandingan Ratio Siswa Per Sekolah Dasar Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

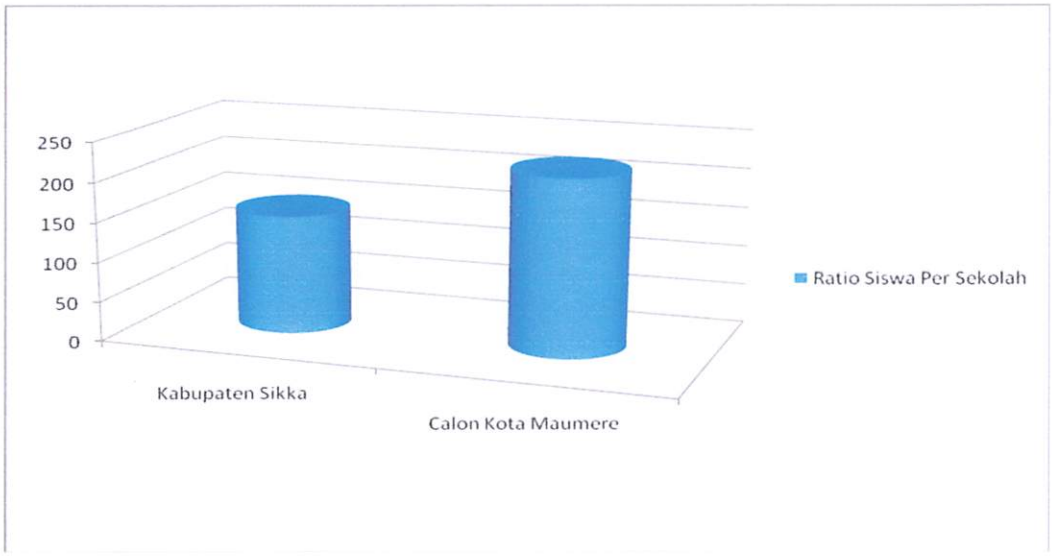

Sumber : Hasil Analisis

Perbandingan di atas menunjukan bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah dasar yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten induk. Hal ini berarti efektifitas daya tampung sekolah di calon Kota Maumere masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten induk.

Selanjutnya dapat kita lihat tabel ratio perbandingan antara siswa dan sekolah menengah di Kabupaten Sikka.

Tabel 3.19. Ratio Siswa Per Sekolah Menengah di Kabupaten Sikka Tahun Ajaran 2009/2010

Tabel 3.20.

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Total	Jumlah Siswa		Total	Ratio
		SMA	SMK	Sekolah	SMA	SMK	Siswa	AEFI
1	Nita	1	-	1	185	-	186	186
2	Magepanda	-	-	-	-	-	-	-
3	Kewapante	1	1	2	193	177	372	186
4	Hewokloang	1	-	1	207	-	208	208
5	Nelle	-	1	1	-	250	251	251
6	Koting	-	-	-	-	-	-	-
7	Kangae	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Total Sekolah	Jumlah Siswa			Total Siswa	Ratio
		SLB	SD	SMP		SLB	SD	SMP		BEFI
18	Waigete	-	19	4	23	-	3881	646	4527	197
19	Talibura	-	21	5	26	-	3863	926	4789	184
20	Waiblama	-	8	1	9	-	1206	151	1357	151
21	Palue	-	10	2	12		1481	237	1718	143

Sumber : Hasil analisis

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan di calon Kota Maumere

Tabel 3.17 menunjukan ratio siswa per sekolah dasar di Kabupaten Sikka dan dari tabel tersebut di atas dapat kita tinjau ratio siswa persekolah dasar di kecamatan – kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere.

Ratio Jumlah siswa per sekolah dasar menunjukan daya tampung dari setiap sekolah terhadap keberadaan siswa sekolah dasar. Tingginya ratio menunjukan rendahnya efektifitas daya tampung dari fasilitas pendidikan terhadap jumlah pelajar.

Tabel 3.18. Tabel Perbandingan Ratio Siswa Per Sekolah Dasar Calon Kota Maumere dan Kabupaten Sikka

No.	Kota / Kabupaten	Jumlah Sekolah			Total Sekolah	Jumlah Siswa			Total Siswa	Ratio
		SLB	SD	SMP		SLB	SD	SMP		BEFI
1	Kabupaten Sikka	0	227	44	271	0	33295	7361	40656	150
2	Calon Kota Maumere	2	73	21	96	385	14513	6353	21251	221

Sumber : Hasil analisis

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

fasilitas pendidikan baik di tingkat dasar maupun lanjutan, serta menyediakan lebih banyak tenaga pendidik yang memadai melalui peran pemerintah daerah.

3.4.1.1. Jumlah Siswa Per Sekolah

Jumlah siswa per sekolah menunjukan ratio/tingkat perbandingan antara siswa terhadap ketersediaan fasilitas persekolahan. Untuk mengatahui tingkat pelayanan publik melalui indeks pelayanan kita dapat melihat ratio siswa per sekolah yang dibedakan

- ✓ Pendidikan Dasar (BEFI)
- ✓ Pendidikan Menengah (AEFI)

Adapun jumlah siswa per sekolah di Kabupaten Sikka dan calon Kota Maumere dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.17. Ratio Siswa Per Sekolah Dasar di Kabupaten Sikka Tahun Tahun Ajaran 2009/2010

No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Total Sekolah	Jumlah Siswa			Total Siswa	Ratio
		SLB	SD	SMP		SLB	SD	SMP		BEFI
1	Nita	-	25	4	29	-	2937	974	3911	135
2	Magepanda	-	9	2	11	-	1695	304	1999	182
3	Kewapante	-	12	2	14	-	2268	482	2750	196
4	Hewokloang	-	11	4	15	-	1574	474	2048	137
5	Nelle	-	8	2	10	-	710	483	1193	119
6	Koting	-	9	1	10	-	815	144	959	96
7	Kangae	-	16	3	19	-	2155	815	2970	156
8	Bola	-	15	2	17	-	1406	363	1769	104
9	Doreng	-	12	2	14	-	2112	380	2492	178
10	Mapitara	-	8	1	9	-	1133	109	1242	138
11	Alok	1	17	6	24	85	4381	1915	6381	266
12	Alok Timur	1	23	7	31	300	4695	2506	7501	242
13	Alok Barat	-	9	3	12	-	2572	634	3206	267
14	Paga	-	20	5	25	-	2893	881	3774	151
15	Tanawawo	-	16	3	19	-	1891	370	2261	119
16	Mego	-	17	3	20	-	2432	508	2940	147
17	Lela	-	15	3	18	-	1708	412	2120	118

kecamatan). Fasilitas kesehatan dimaksud adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), dan balai pengobatan.

4. Ketersediaan Tenaga Kesehatan (PHOI)

   Ketersediaan tenaga kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekatkannya dengan skala kecamatan). Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah dokter, tenaga paramedis dan pembantu paramedis.

5. Kualitas infrastruktur (PRQI)

   Indikator ini menyangkut besarnya persentase panjang jalan dengan kualitas baik, terhadap keseluruhan panjang ruas jalan di kabupaten yang bersangkutan.

Untuk mengetahui secara komprehensif kinerja pelayanan publik ini, maka dibuat Indeks Pelayanan Publik (PPI) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$PPI_{it} = \frac{(BEFI_{it} + (100 - BETI_{it}) + AEFI_{it} + (100 - AETI_{it}) + PHFI_{it} + PHOI_{it} + PRQI_{it})}{7}$$

Indeks pelayanan publik di sini akan dilakukan perhitungan secara menyeluruh di semua kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sikka, yang kemudian dapat kita lihat posisi kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere. Sejauh mana tingkat kemampuan kecamatan-kecamatan tersebut dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya.

3.4.1 Tingkat Pelayanan Bidang Pendidikan

Sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam pelayanan publik. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 disebutkan permasalahan bidang pendidikan di Indonesia antara lain mencakup: fasilitaspelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan yang lebih tinggi yang belum tersedia secara merata; serta ketersediaan pendidik yang belum memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemekaran daerah memungkinkan pemerintah memperbaiki pemerataan

Dari hasil analisis pada tabel 3.17 tersebut menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan (RK) calon Kota Maumere pada tahun 2005-2006 semakin menurun dari 85,15% menjadi 85,15%, kemudian menjadi 160,97% karena tingkat ketergantungannya semakin besar. Namun setelah itu mengalami peningkatan lagi yaitu terjadi penurunan besaran prosentasi ketergantungan pada tahun 2008 sebesar 149,89%, dan pada tahun 2009 menjadi 146,05%, dengan nilai rata-rata sebesar 140 % pertahunnya. Namun demikian jika melihat kecendrungan diatas, maka pemerintah daerah mempunyai potensi yang besar untuk memperkecil tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah sudah dapat mengelola dananya dengan baik jadi tidak terlalu tergantung dengan pemerintah pusat.

3.4 Analisis Tingkat Pelayanan Publik

Evaluasi kinerja pelayanan publik akan difokuskan kepada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Karena itu indikator kinerja pelayanan publik yang dirumuskan dalam studi ini akan lebih menitikberatkan perhatiannya pada sisi input pelayanan publik itu sendiri. Indikator yang akan digunakan ialah sebagai berikut :

1. Jumlah Siswa per Sekolah

   Indikator ini mengindikasikan daya tampung sekolah di satu daerah. Rasionya dibedakan antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP (BEFI) dan tingkat lanjutan SLTA (AEFI).

2. Jumlah Siswa per Guru

   Indikator ini menyangkut ketersediaan tenaga pendidik. Indikator ini dibedakan juga atas pendidikan dasar (SD dan SLTP) dan pendidikan tingkat lanjut (SLTA). Rasio siswa per guru ini juga dibedakan antara tingkat pendidikan dasar SD dan SMP (BETI) dan tingkat lanjutan SLTA (AETI).

3. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan (PHFI)

   Ketersediaan fasilitas kesehatan dinyatakan dalam rasio terhadap 10 ribu penduduk (jumlah ini digunakan untuk mendekatkannya dengan skala

Keterangan :

RK : Ratio Ketergantungan

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana dan bantuan dari pemerintah pusat memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber daya dan potensi lokal yang terkandung di dalamnya.

Tabel 3.16. Ratio Ketergantungan Calon Kota Maumere Tahun 2005-2009

Tahun	RK	Kategori Perubahan (%)	Kategori RK
2005	85.15	>50.1	Sangat Kurang
2006	160.97	>50.1	Sangat Kurang
2007	162.40	>50.1	Sangat Kurang
2008	149.89	>50.1	Sangat Kurang
2009	146.05	>50.1	Sangat Kurang
Rata-rata	140.89	>50.1	Sangat Kurang

Sumber : Hasil analisis

Untuk lebih jelas berkaitan dengan gambaran tingkat ketergantungan calon Kota maumere dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.9. Ratio Ketergantungan Calon Kota Maumere Tahun 2005 - 2009

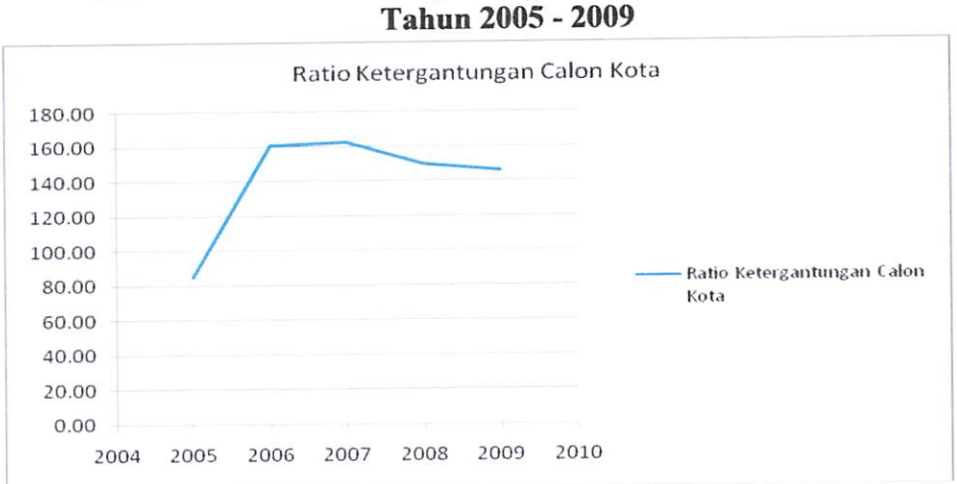

Sumber : Hasil Analisis

Grafik 3.8. Indeks Kemampuan Rutin Calon Kota Maumere

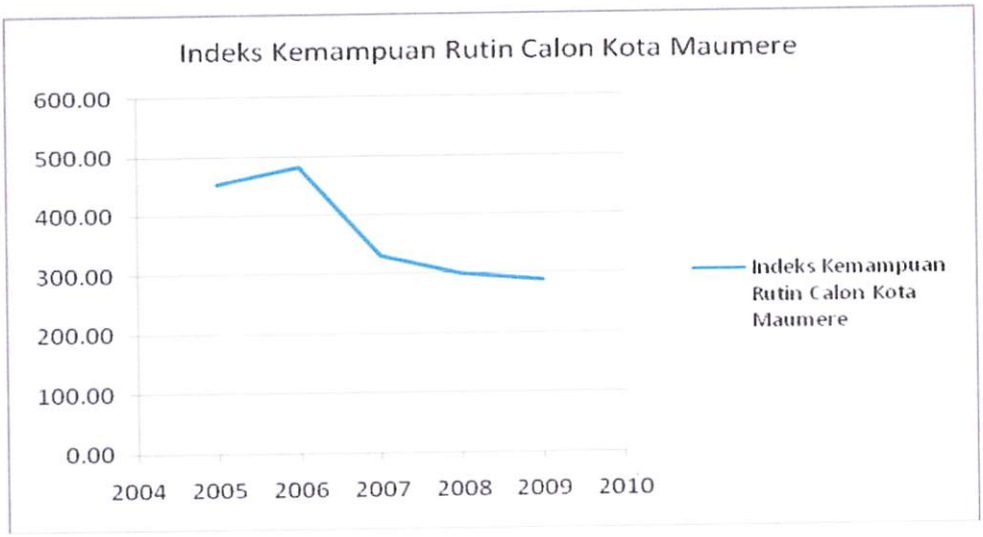

Sumber : Hasil analisis

Berdasarkan tabel 3.15 dan diperjelas dalam grafik di atas dapat kita perhatikan bahwa nilai IKR Kabupaten calon Kota Maumere mengalami kenaikan pada tahun 2005-2006 ,yaitu pada tahun 2005 IKR berjumlah 453.12% , kemudian pada tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 480,77%, yang selanjutnya terus menurun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 mencapai 288, 32%. Apabila secara keselururuhan dapat dinyatakan bahwa Kabupaten Sikka mampu menambah indeks Kemampuan rutin dengan rata –rata sebesar 370.28% pertahunnya. Sehingga masuk dalam kategori "Sangat Baik" : Karena IKR membuat kemampuan dan potensi daerah dalam membiayai belanja rutin berkembang pesat.

3.3.6. Ratio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat membiayai belanja daerah

Menghitung Ratio Ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat membiayai belanja daerah (Depdagri, 1991)

$$\text{Ratio Ketergantungan} = \frac{\text{DAU+DAK+Bantuan}}{\text{APBD}} \text{ x } 100\%$$

3.3.5. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Menghitung Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Kabupaten Sikka untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja rutin dan pembangunan (Depdagri, 1991)

$$IKR = \frac{PADt + DAU + Bagi\ hasil}{Belanja\ Rutin} \times 100\%$$

Keterangan :

IKR : Indeks Kemampuan Rutin

PADt : Pendapatan Asli Daerah Tahun berjalan

DAU : Dana Alokasi Umum

Untuk mengetahui keuangan daerah dapat menggunakan tolak ukur indeks kemampuan rutin (IKR) yaitu suatu ukuran menggambarkan sejauh maka kemampuan dalam potensi daerah Kabupaten Sikka dalam membiayai belanja rutin.

Tabel 3.15. Indeks Kemampuan Rutin Calon Kota Maumere

Tahun	IKR	Kategori Perubahan (%)	Kategori IKR
2005	453.12	>50.1	Sangat Baik
2006	480.77	>50.1	Sangat Baik
2007	329.44	>50.1	Sangat Baik
2008	299.73	>50.1	Sangat Baik
2009	288.32	>50.1	Sangat Baik
Total	1851.38		
Rata-rata	370.28	>50.1	Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisis

Untuk lebih jelas berkaitan dengan tingkat kemampuan rutin dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

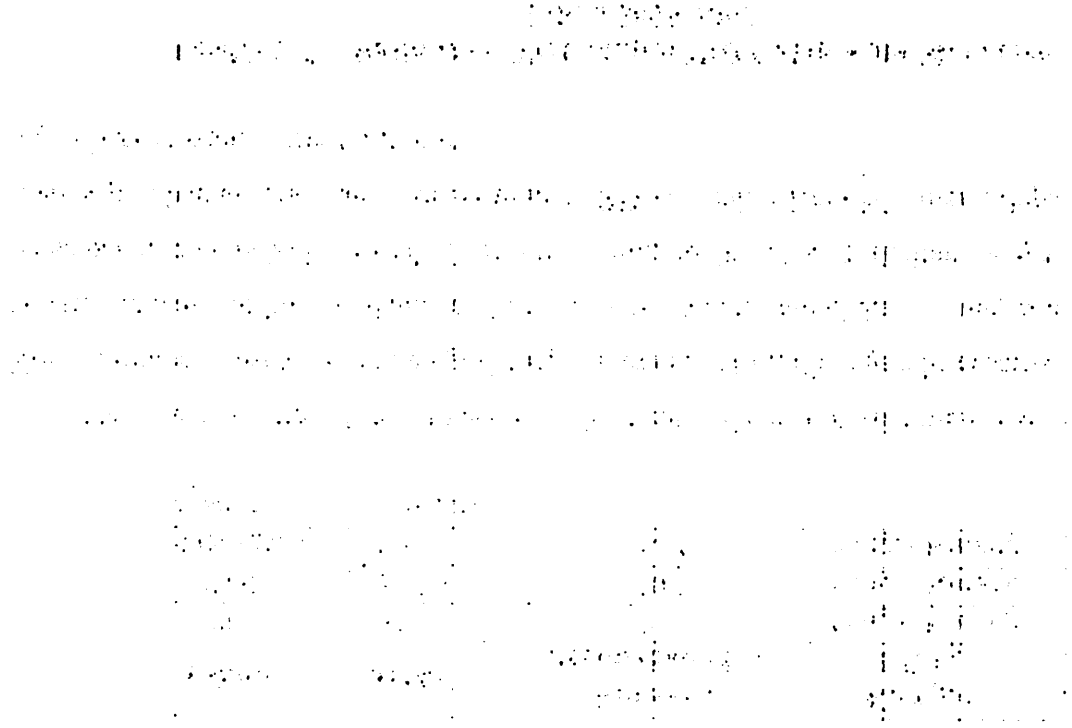

Tahun	RDAU	Kategori Perubahan (%)	Kategori RDAU
2008	64.31	>50.1	Sangat Kurang
2009	63.75	>50.1	Sangat Kurang
Rata-rata	69.19	>50.1	Sangat Kurang

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ratio dana alokasi umum calon Kota Maumere masuk dalam kategori sangat kurang, hal ini dipengaruhi besarnya ketergantungan terhadap dana alokasi umum dalam mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk lebih jelas, berkaitan dengan tingkat perubahan ratio dana alokasi umum (RDAU) calon Kota Maumere, dapat digambarkan pada grafik berikut ini.

Grafik 3.7. Ratio DAU Terhadap APBD Calon Kota Maumere Tahun 2005-2009

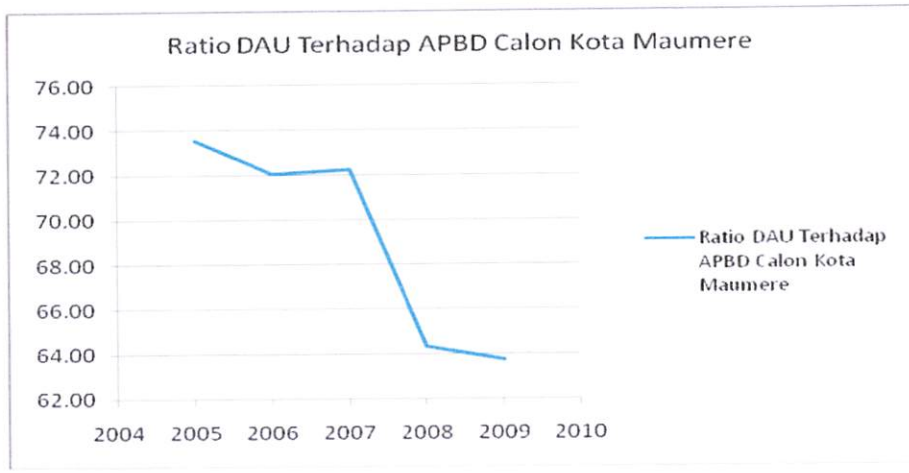

Sumber : Hasil analisis

Secara umum walaupu kategori RDAU masih sangat kurang, namun dari grafik 3.7 ratio DAU calon Kota Maumere terlihat terjadi penurunan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukan tingkat ketergantungan calon Kota Maumere ke pusat terus turun dari tahun ke tahun, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan terus.

mengalami peningkatan sebesar 72,77% akan tetapi pada tahun 2008 terjadi penurunan yaitu menjadi 66.21%, kemudian pada tahun 2008 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,80%, setelaha itu kembali menurun pada tahun 2009 menjadi 41,40%. Hal ini terjadi karena peranan PAD sangat kecil, sementara TPD terus mengalami kenaikan untuk mengimbangi belanja daerah. Akan tetapi secara keseluruhan DOF dari tahun 2005-2009 masih dalam kategori sangat baik,kemudian pada tahun 2009 yang menurun menjadi baik. Akan tetapi rata-rata pertumbuhan pertahun masih dalam kategori sangat baik dengan nilai rata-rata 62,99%.

3.3.4. Ratio Dana Alokasi Umum Terhadap APBD

Mengukur besarnya Ratio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD (Depdagri, 1991)

$$RDAU = \frac{DAU}{APBD} \times 100\%$$

Keterangan :

RDAU = Ratio Dana Alokasi Umum

DAU = Dana Alokasi Umum

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut ini akan kita tinjau ratio dana alokasi umum (RDAU) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) calon Kota Maumere yang kemudian dapat kita ketahui tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.

Tabel 3.14. Ratio Dana Alokasi Umum (RDAU) Terhadap APBD Calon Kota Maumere Tahun 2005-2009

Tahun	RDAU	Kategori Perubahan (%)	Kategori RDAU
2005	73.55	>50.1	Sangat Kurang
2006	72.09	>50.1	Sangat Kurang
2007	72.24	>50.1	Sangat Kurang

Tabel 3.13. Tabel Derajat Otonomi Fiskal Calon Kota Maumere Tahun 2005-2009

Tahun	DOF	Kategori Perubahan (%)	Kategori DOF
2005	66.78	>50.1	Sangat Baik
2006	72.77	>50.1	Sangat Baik
2007	66.21	>50.1	Sangat Baik
2008	67.80	>50.1	Sangat Baik
2009	41.40	40.01-50.00	Baik
Total	314.97		
Rata-rata	62.99		Sangat Baik

Sumber : Hasil analisis

Dari tabel di atas, untuk dapat melihat lebih jelas derajat otonomi fiskal calon Kota Maumere dalam kurun waktu 5 tahun, dapat tergambar dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.6. Derajat Otonomi Fiskal Calon Kota Maumere Tahun 2005-2009

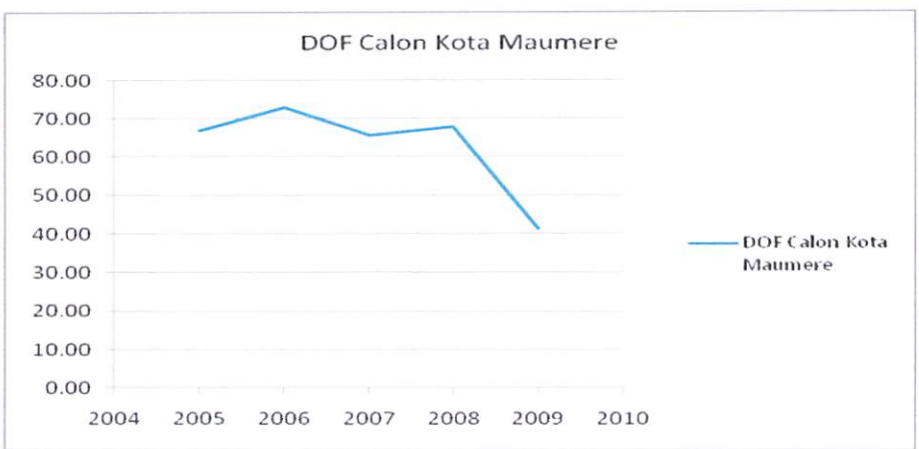

Sumber : Hasil analisis

Hasil perhitungan DOF di calon Kota Maumere yang ditampilkan dalam tabel 3.13 dan grafik 3.6 diatas menunjukan pertumbuhan DOF pada tahun 2005 mengalami peningkatan yaitu sebesar 66,78% kemudian pada tahun 2006

dapat dipertahankan kembali pada tahun 2009 karena te
yaitu 5,90%. Penurunan dan kenaikan yang tidak
dikarenakan adanya krisis ekonomi secara makro dimar
tinggi sehingga harga barang dan jasa melambung ting
relatif rendah yang berakibat kegiatan ekonomi m
Keadaan belum pulih sepenuhnya yang mengakibatkan Total Penerimaan Daerah (TPD) yaitu seluruh realisasi penerimaan daerah berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan, bantuan, penerimaan lain-lain dan pinjaman daerah menjadi menurun karna krisis ekonomi yang sampai saat ini belum terselesaikan.

3.3.3. Mengukur Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Untuk mengukur derajat otonomi fiskal/DOF (Depdagri, 1991) digunakan rumus :

$$DOF = \frac{PADt}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan :

DOF	= Derajat Otonomi Fiskal
PADt	= Pendapatan Asli Daerah tahun t
PADt	= Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan
TPADt	= Total Pendapatan Daerah tahun t

Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal (DOF), dalam analisis ini kita dapat melakukan analisis untuk melihat DOF di calon Kota Maumere. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap tingkat pertumbuhan APBD calon Kota Maumere. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 3.12. Tingkat Pertumbuhan APBD calon Kota Maumere Tahun 2005-2009

Tahun	Pertumbuhan APBD (%)	Kategori Perubahan (%)	Kategori Pertumbuhan APBD
2006	61.48	>50.1	Sangat Baik
2007	14.86	10.01-20.00	Kurang
2008	22.86	20.01-30.00	Cukup
2009	5.90	<10.00	Sangat Kurang
Rata -Rata	26.28		Cukup

Sumber : Hasil Analisis

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada grafik berikut ini :

Grafik 3.5. Tingkat Pertumbuhan APBD Calon Kota Maumere Tahun 2005-2009

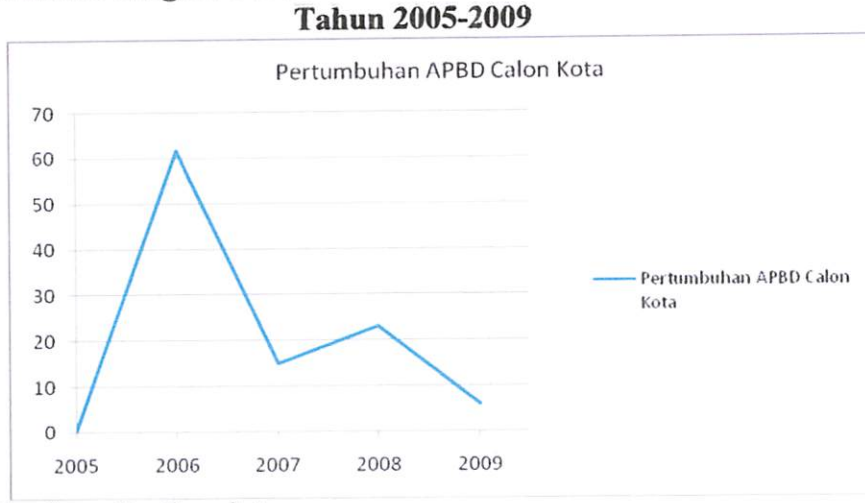

Sumber : Hasil analisis

Pada tabel 3.12 dan grafik 3.5, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah Kota Maumere sudah mengalami peningkatan yang pesat terutama tahun 2006 sebesar 61, 48 %. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dipertahankan pada tahun 2007 dilihat dengan adanya penurunan pada tahun 2007 sebesar 14,86%, pada tahun 2008 perlahan terjadi kenaikan sebesar 22,86% dan tidak

Tabel dan grafik di atas merupakan gambaran dan kategori tingkat pertumbuhan PAD di calon Kota Maumere, di mana dapat kita dari tahun 2005 ke 2006 terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan dan masuk dalam kategori sangat baik. Namun terjadi penurunan pada tahun 2007, sehingga pertumbuhan PAD calon Kota Maumere masuk dalam kategori sangat kurang. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan dan kemudian penurunan kembali terjadi di tahun 2009 dimana calon Kota Maumere memiliki tingkat pertumbuhan PAD masuk dalam kategori kurang.

3.3.2. Mengukur tingkat pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai APBD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan (Widodo, 1990: 30)

$$TP\ TPDt = \frac{(TPDt - TPD\ t\text{-}1)}{TPDt\text{-}1} \times 100\ \%$$

Keterangan :

TP TPDt = Tingkat Pertumbuhan APBD tahun berjalan

TPDt = APBD tahun berjalan

TPDt-1 = APBD tahun sebelumnya

Berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam analisis, kita melakukan analisis untuk melihat pertumbuhan APBD di perkiraan calon Kota Maumere. APBD calon Kota Maumere diketahui dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, daru buku APBD Kabupaten Sikka, yang diolah dan diperoleh data kisaran besaran APBD dari kontribusi penerimaan, dan belanja di kecamatan – kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere.

Pengukuran pertumbuhan PAD dalam analisis ini dilakukan perhitungan pertumbuhan PAD dari calon Kota otonom Maumere, melalui data kontribusi penerimaan dari setiap kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere terhadap keseluruhan PAD Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk. Untuk lebih jelasnya dapat kita perhatikan dari tabel analisis berikut.

Tabel 3.11. Tingkat Pertumbuhan PAD Calon Kota Maumere Tahun 2006-2009

Tahun	Pertumbuhan PAD (%)	Kategori Perubahan (%)	Kategori Pertumbuhan PAD
2006	62.96	>50.1	Sangat Baik
2007	7.21	<10.00	Sangat Kurang
2008	31.41	30.01-40.00	Sedang
2009	14.82	10.01-20.00	Kurang
Rata -Rata	29.10		Cukup

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel di atas, dapat kita perhatikan tingkat pertumbuhan PAD calon Kota Maumere, dan kategori perubahan dan pertumbuhannya. Untuk lebih jelas mengenai pertumbuhan PAD di calon Kota Maumere, dapat kita gambarkan dalam grafik berikut ini.

Grafik 3.4. Tingkat Pertumbuhan PAD calon Kota Maumere Tahun 2006 – 2009

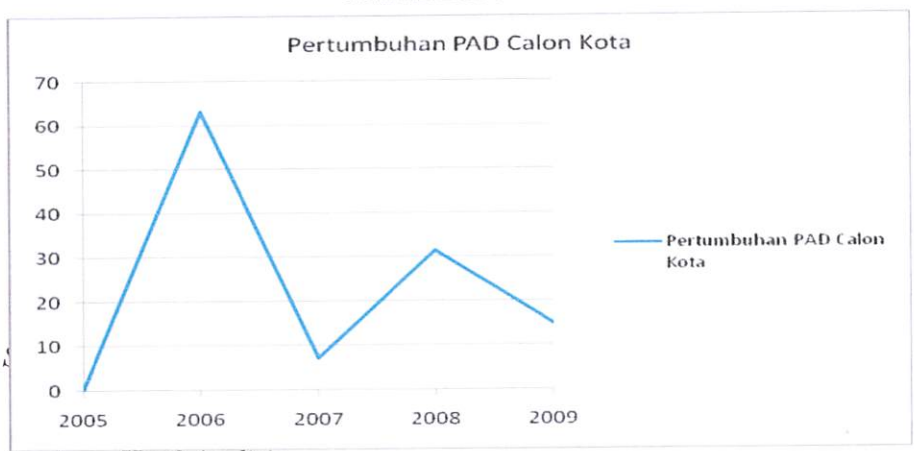

Sumber : Hasil Analisis

3. Analisis Derajat Otonomi Fiskal (DOF)
4. Analisis Ratio Dana Alokasi Umum (RDAU)
5. Analisis Indeks Kemampuan Rutin (IKR)
6. Analisis Ratio Ketergantungan

Analisis – analisis di atas akan menghasilkan prosentasi yang kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori kemampuan[40], sebagai berikut :

Tabel 3.10.Tabel Kategori Keuangan Daerah

No	Perubahan	Analisis Keuangan	
		PAD / TPD / DOF / IKR	RDAU / RK
1	< 10,00	Sangat Kurang	Sangat Baik
2	10,01 - 20,00	Kurang	Baik
3	20,01 - 30,00	Cukup	Sedang
4	30,01 - 40,00	Sedang	Cukup
5	40,01 - 50,00	Baik	Kurang
6	>50,01	Sangat Baik	Sangat Kurang

Sumber : Depdagri, 1991

Untuk lebih jelas, dapat kita lihat analisis kemampuan keuangan calon Kota Maumere berikut ini.

3.3.1. Mengukur tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (TP PAD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan (Widodo, 1990: 30)

$$TP\ PADt = \frac{(PADt - PAD\ t\text{-}1)}{PADt\text{-}1} \times 100\ \%$$

Keterangan :

TP PADt = tingkat pertumbuhan pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan

PADt-1 = Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

[40] Kajian Keuangan Daerah, Depdagri : 20, 1991

Dari analisis indeks kemampuan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat kita lihat bahwa, calon Kota Otonom Maumere menempati urutan ke 2 dari 21 kabupaten/kota dengan kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa kinerja ekonomi daerah calon Kota Maumere cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada dalam satu provinsi, dimana tingkat PDRB non migas, PDRB per kapita, dan ratio PDRB calon Kota Mumere terhadap PDRB Provinsi NTT cukup tinggi dengan angka penduduk miskin yang rendah.

3.3 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Bentuk kemandirian daerah dapat pula dilihat dari kemampuan keuanan daerah dalam hal ini adalah APBD. APBD menggambarkan secara lengkap tentang tingkat kemampuan daerah dari aspek keuangan, baik itu sector pendapatan, maupun pengeluaran.

Analisis ratio keuangan daerah dilakukan melalui :

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah
2. Mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh sebagai dasar bagi operasionalisasi variabel yang di ukur sebagaimana akan dikemukakan dalam penelitian ini.
3. Menghitung dan menyajikan hasil analisis data yang berupa rasio-rasio keuangan daerah
4. Menarik kesimpulan atas rangkaian analisis data dan informasi yang disajikan, sehingga diketahui bagaimana kemampuan keuangan daerah calon Kota Maumere dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Analisis kemampuan keuangan daerah terdiri dari :

1. Analisis Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (TP PAD)
2. Analisis Tingkat Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TP APBD)

Hal ini menunjukan PDRB perkapita, PDRB non migas, di kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah calon Kota Maumere, masih berada di atas beberapa kecamatan lain di Kabupaten Sikka. Selain itu tingkat keminskinan pun lebih rendah dan terlihat mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan meningkatnya indeks kemampuan ekonomi (IKE)

Setelah melihat indeks kemampuan ekonomi di Kabupaten Sikka, maka kita akan melihat indeks kemampuan ekonomi di kabupaten/kota dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur. Indeks kemampuan ekonomi di wilayah provinsi ini akan menggambarkan posisi atau kinerja ekonomi daerah dari masing-masing wilayah kabupaten ataupun kota, termasuk calon Kota Maumere, di antara kabupaten/kota lain.

Tabel 3.9. Indeks Kemampuan Ekonomi Provinsi NTT 2009

No.	Kabupaten / Kota	2009	Kategori IKE
1	Kota Kupang	300	Tinggi
2	Calon Kota Maumere	178	Sedang
3	Manggarai	156	Rendah
4	Ende	155	Rendah
5	Kupang	145	Rendah
6	Ngada	142	Rendah
7	Timor Tengah Selatan	142	Rendah
8	Sumba Timur	136	Rendah
9	Sumba Barat	135	Rendah
10	Rote Ndao	132	Rendah
11	Flores Timur	132	Sedang
12	Nagekeo	126	Rendah
13	Belu	125	Rendah
14	Alor	120	Rendah
15	Sumba Barat Daya	117	Rendah
16	Sikka *(Tanpa Kota)*	110	Rendah
17	Timor Tengah Utara	109	Rendah
18	Manggarai Timur	104	Rendah
19	Lembata	99	Rendah
20	Manggarai Barat	98	Rendah
21	Sumba Tengah	88	Sedang

Sumber : Hasil analisis

Tabel 3.8. Indeks Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2009

No	Kecamatan	IKE 2009	Kategori IKE
1	Alok	335	Tinggi
2	Nelle	273	Tinggi
3	Koting	172	Rendah
4	Alok Timur	237	Sedang
5	Lela	182	Rendah
6	Bola	131	Rendah
7	Magepanda	145	Rendah
8	Talibura	123	Rendah
9	Nita	160	Rendah
10	Paga	135	Rendah
11	Waiblama	124	Rendah
12	Alok Barat	168	Rendah
13	Kangae	133	Rendah
14	Mapitara	139	Rendah
15	Waigete	113	Rendah
16	Kewapante	121	Rendah
17	Palue	162	Rendah
18	Mego	146	Rendah
19	Hewokloang	114	Rendah
20	Doreng	126	Rendah
21	Tanawawo	117	Rendah

Sumber : Hasil analisis

Keterangan

: Kecamatan – kecamatan dalam calon Kota Maumere

Dari tabel di atas dapat kita lihat indeks kemampuan ekonomi kecamatan, menempatkan beberapa kecamatan dalam calon Kota Maumere pada posisi di atas rata-rata Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk. Kecamatan Alok dan Nelle menempati posisi pada indeks kemampuan ekonomi tertinggi, sedangkan 3 kecamatan lainnya yang masuk dalam wilayah administratif calon Kota Maumere masih berada di atas rata-rata indeks kemampuan ekonomi Kabupaten Sikka.

Pembangunan ekonomi seyogyanya meng
yandiukur menggunakan head-count index, y
miskin terhadap total penduduk.

Untuk mengetahui secara umum perkemba
dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang
rata dari keempat indikator di atas *(Bappenas, dan UNDP)*. Untuk kabupaten i di tahun t, indeks ini secara formal dirumuskan sebagai berikut:

$$IKE_{i,t} = \frac{(ECGI_{i,t} + WELFI_{i,t} + ESERI_{i,t} + (100 - POVEI_{i,t}))}{4}$$

Ketarangan :

IKE = Indeks Kemampuan Ekonomi
ECGI = Pertumbuhan PDRB non-migas
WELFI = PDRB per kapita
ESERI = Rasio PDRB Kecamatan terhadap PDRB kabupaten/ kabupaten terhadap provinsi
POVEI = Angka kemiskinan

Dari data yang ada di kabupaten induk, maka akan dilakukan analisis kemampuan ekonomi daerah melalui perhitungan indeks kemampuan ekonomi (IKE) untuk melihat kinerja ekonomi dari masing-masing kecamatan.

Untuk lebih jelasnya indeks kemampuan ekonomi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sikka dan posisi kedudukan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere dari hasil pengindeksan, dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

rata 0,236 angka ini menunjukkan bahwa di calon Kota Maumere PDRB per kapita relatif merata.

PDRB per kapita adalah indikator makro yang secara agregat dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari gerak pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ada ketimpangan ekonomi yang signfikan antara kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk, maupun diantara kacamatan-kecamatan itu sendiri.

3.2.2. Analisis Kinerja Ekonomi Daerah

Analisis kinerja ekonomi daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja ekonomi daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah atau pembentukan daerahotonom baru. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah:

1. Pertumbuhan PDRB non-migas (ECGI)

   Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan

   lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.
2. PDRB per kapita (WELFI)

   Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
3. Rasio PDRB wilayah administratif terhadap PDRB wilayah administratif yang lebih besar (ESERI)

   Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah (kecamatan/kabupaten) dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah kabupaten/propinsi. Semakin besar perannya dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.
4. Angka kemiskinan (POVEI)

[illegible]

Tabel 4.2 [illegible]

No	[illegible]	IW 1997	IW 1998	IW 1999	Rata-Rata IW
1	Aceh [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Keterangan :

: Kecamatan – kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere

: Total IW di bawah rata – rata Kabupaten Sikka

: Terjadi penurunan tingkat ketimpangan

Dari analisis di atas dapat menunjukan indeks ketimpangan Williamson berfluktuasi tetapi secara umum mengalami peningkatan. Dari hasil analisis, dapat kita lihat posisi kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah calon Kota Maumere pada umumnya di tahun 2009 mengalami peningkatan dalam arti terjadi penurunan tingkat ketimpangan ekonomi wilayah terhadap kecamatan lain. Tabel di atas juga menunjukan kecamatan-kecamatan dengan Indeks Williamson berada di bawah rata-rata Indeks Williamson Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Untuk lebih jelas berkaitan dengan tingkat ketimpangan wilayah dalam lingkup calon Kota Maumere dapat kita lihat pada hasil analisis berikut ini.

Tabel 3.7. Tabel Tingkat Ketimpangan Wilayah Kecamatan di Calon Kota Maumere

No	Kecamatan	IW			Rata-Rata IW
		2007	2008	2009	
1	Alok	0.497091	0.441952	0.445628	0.461557
2	Alok Timur	0.043345	0.033267	0.029354	0.035322
3	Alok Barat	0.196651	0.184203	0.183634	0.188163
4	Nelle	0.052585	0.054860	0.052439	0.053295
5	Kangae	0.212871	0.199517	0.199906	0.204098
6	Jumlah Kota Maumere	1.002543	0.913799	0.910960	0.942434
7	Rata-rata Kota Maumere	0.200509	0.182760	0.182192	0.188487

Sumber : Hasil analisis

Tabel 3.7 menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB per kapita antar kecamatan di Calon Kota Maumere selama periode 2007-2009 yaitu rata-

Dari rumus di tersebut maka dilakukan analisis ketimpangan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sikka, termasuk kecamatan-kecamatan yang direncanakan menjadi kecamatan dalam wilayah administratif Kota Maumere. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Tabel Tingkat Ketimpangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sikka

No	Kecamatan	IW			Nilai IW		Rata-Rata
		2007	2008	2009	2008	2009	IW
1	Nita	0.040686	0.041438	0.041723	0.000752	0.000285	0.04128221
2	Magepanda	0.024018	0.025243	0.017906	0.001225	-0.007336	0.02238894
3	Kewapante	0.081854	0.083800	0.076154	0.001946	-0.007646	0.08060241
4	Hewokloang	0.068976	0.068635	0.068803	-0.000341	0.000168	0.06880466
5	Nelle	0.099074	0.098154	0.093458	-0.000919	-0.004696	0.09689558
6	Koting	0.048216	0.046634	0.044872	-0.001583	-0.001762	0.04657408
7	Kangae	0.073586	0.074694	0.067496	0.001108	-0.007198	0.07192513
8	Bola	0.014458	0.015557	0.008325	0.001099	-0.007231	0.01277994
9	Doreng	0.094777	0.094256	0.087792	-0.000521	-0.006464	0.09227503
10	Mapitara	0.052611	0.052482	0.045502	-0.000130	-0.006980	0.05019815
11	Alok	0.520120	0.523873	0.463317	0.003753	-0.060556	0.50243692
12	Alok Timur	0.088227	0.092389	0.091797	0.004162	-0.000592	0.09080445
13	Alok Barat	0.067565	0.068072	0.060134	0.000507	-0.007938	0.06525677
14	Paga	0.064661	0.065818	0.056961	0.001157	-0.008858	0.06248008
15	Tanawawo	0.094149	0.095100	0.089757	0.000951	-0.005344	0.0930018
16	Mego	0.084337	0.084860	0.085829	0.000523	0.000969	0.08500845
17	Lela	0.017582	0.018477	0.005666	0.000895	-0.012811	0.01390833
18	Waigete	0.088240	0.088925	0.080824	0.000685	-0.008101	0.08599675
19	Talibura	0.033053	0.034471	0.028446	0.001417	-0.006025	0.03198981
20	Waiblama	0.040422	0.040724	0.038912	0.000301	-0.001811	0.04001937
21	Palue	0.067561	0.068960	0.069305	0.001399	0.000345	0.06860858
22	Jumlah Kab. Sikka	1.764173	1.782560	1.622978	0.018387	-0.159582	1.723237
23	**Kabupaten Sikka**	0.084008	0.084884	0.077285	0.000876	-0.007599	0.082059

Sumber : Hasil analisis

[illegible]

[illegible]

[illegible]

daerah. Dalam analisis perekonomian ini akan dilakukan analisis ketimpangan ekonomi wilayah (Indeks Williamson), dan Analisis kinerja ekonomi daerah.

3.2.1. Analisis Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Indeks Williamson)

Strategi pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kebijaksanaan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi yang ada. Namun hasil pembangunan kadang belum dirasakan merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah oleh karena itu diterapkan otonomi daerah (Amin Pujiati; 2008)[39].

Kesenjangan atau ketimpangan ekonomi antar wilayah (daerah) dapat dianalisis dengan menggunakan metode Indeks Williamson (IW). Untuk menghitung indeks kesenjangan ekonomi antar wilayah didasarkan atas PDRB per kapita, atas dasar harga konstan pada kurun waktu tertentu. PDRB atas dasar harga konstan dijadikan variabel perhitungan karena menunjukan nilai riil. ***"Kriteria pengukuran kesenjangan ekonomi antar daerah berdasarkan metode IW adalah antara nol dan satu. Jika nilai IW mendekati nol berarti terjadi pemerataan antar daerah (kecamatan). Hasilnya jika nilai IW mendekati satu menunjukan bahwa terjadi kesenjangan ekonomi antar kecamatan. "***

Adapun rumus dari Indeks Williamson (IW) adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\Sigma(Yi - Y)^2 x(ni/N)}}{Y}$$

Keterangan:
IW = Indeks Williamson
Yi = pendapatan per kapita kecamatan
Y = pendapatan per kapita kabupaten
ni = penduduk kecamatan
N = jumlah penduduk kabupaten

[39] Y.M. Marbun. Ketimpangan dan Otonomi Daerah. Universitas Sumatra Utara. 2010

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik tingkat pertumbuhan berikut ini.

Grafik 3.3. Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTT Tahun 2007 - 2009

Sumber : Hasil analisis

Sesuai dengan data Bank Dunia rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia sampai dengan tahun 2009 adalah 1%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere di atas rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Dari analisis pertumbuhan penduduk di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere adalah 3 % pada tahun 2009, jadi sedangakan total pertumbuhan Provinsi NTT yaitu 2 % maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere adalah 150 % dari pertumbuhan provinsi.

3.2 Analisis Kemampuan Ekonomi

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau pembentukan daerah baru perlu dikaji faktor ekonomi karena perekonomian merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap arah dan kesuksesan dalam pembangunan

No.	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan	
		2008	2009
11	Sumba Timur	5%	2%
12	Manggarai Barat	6%	3%
13	Kupang	6%	3%
14	Belu	12%	6%
15	Sumba Barat	-	2%
16	Ngada	-	1%
17	Manggarai	3%	-
18	Sumba Barat Daya	-	2%
19	Sumba Tengah	-	2%
20	Nagekeo	-	1%
21	Manggarai Timur	-	-
22	**Provinsi NTT**	**4%**	**2%**

Sumber : Hasil Analisis

Keterangan :

: Belum ada data/tidak bisa dianalisis karena merupakan kota/kabupaten pemekaran, atau dimekarkan

: Calon Kota Maumere

: Total Pertumbuhan Provinsi NTT

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa, calon tingkat pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere dari tahun 2008 – 2009 menempati urutan ke 2 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 21 kabupaten/kota yaitu 3 % (positif), setelah Kabupaten Sikka sebagai Kabupaten induk menepati urutan ke 1 dengan tingkat pertumbuhan 7%, dan dari tahun 2007-2009.

Sesuai dengan data Bank Dunia rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia sampai dengan tahun 2009 adalah 1% [38]. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere di atas rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia.

[38] http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=sp_pop_grow&idim=country:IDN&dl=id&hl=id&q=pertumbuhan+penduduk *29 November 2009*

Tabel 3.4. Pertumbuhan Penduduk di Calon Kota Maumere

No.	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk	
		2008	2009
1	Alok	2%	3%
2	Alok Timur	2%	5%
3	Alok Barat	4%	2%
4	Nelle	2%	1%
5	Kangae	2%	2%
6	**Kota Maumere**	2%	3%

Sumber : Hasil Analisis

Dari tabel tingkat pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere di atas dapat diketahui dalam kurun waktu dari tahun 2007 sampai 2009 terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere di mana dari tahun 2007 ke 2008 terjadi pertumbuhan sebesar 2 % dan dari tahun 2008 sampai 2009 terjadi pertumbuhan sebesar 3 %. Artinya dari tahun 2007 sampai 2009 laju pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere bergerak meningkat sebanyak 1 % (positif).

Setelah mengetahui tingkat pertumbuhan di calon Kota Maumere, kita dapat melakukan komparasi atau perbandingan dengan kota/kabupaten lain dalam satu provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel analisis pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan kota/kabupaten.

Tabel 3.5. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten / Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Kabupaten / Kota	Pertumbuhan	
		2008	2009
1	Sikka *(Tanpa Kota)*	0%	7%
2	Calon Kota Maumere	2%	3%
3	Ende	0.002	0.001
4	Timor Tengah Selatan	1%	0.005
5	Alor	2%	1%
6	Timor Tengah Utara	2%	1%
7	Rote Ndao	3%	1%
8	Lembata	4%	2%
9	Flores Timur	4%	2%
10	Kota Kupang	5%	2%

penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia (menurut Wikipedia).

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun dunia. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk baik pertambahan maupun penurunannya.

Angka pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertambahan penduduk suatu wilayah atau negara dalam suatu jangka waktu tertentu, dinyatakan dalam persentase. Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat.

Analisis tingkat pertumbuhan penduduk di sini untuk melihat sejauh mana laju pertumbuhan penduduk di calon Kota Maumere, dan Kabupaten Induk. Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peluasan permukiman yang berimplikasi pada aspek ekonomi, politik, administrasi, maupun cakupan wilayah kerja pemerintah daerah.

Rumus umum Persentase pertumbuhan penduduk NPP adalah :

$$\%\ NPP = \frac{\text{Jumlah Penduduk}_t - \text{Jumlah Penduduk}_i}{\text{Jumlah Penduduk}_i} \times 100$$

Keterangan :

% NPP	: Persentase Nilai Pertumbuhan Penduduk
Jumlah Penduduk$_t$	: Jumlah penduduk tahun berjalan
Jumlah Penduduk$_i$	: Jumlah penduduk tahun sebelumnya

Untuk itu dapat kita lihat hasil analisis pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere

Grafik 3.2. Grafik Perbandingan Kepadatan Penduduk Calon Kota Maumere dengan Kota-Kota Otonomi Baru

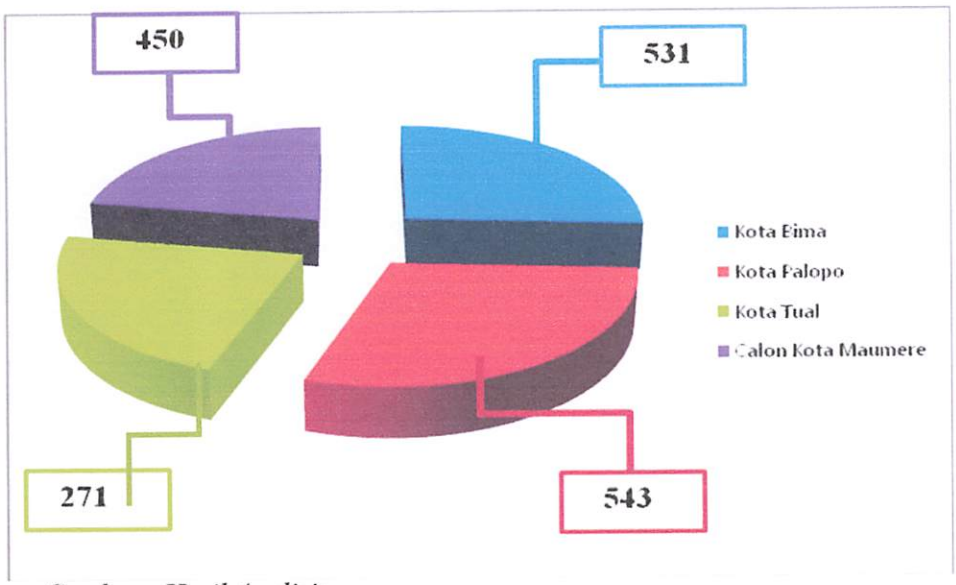

Sumber : Hasil Analisis

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk calon Kota Maumere berada di urutan ketiga dari kota-kota pembanding sejenis, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 450,2 Jiwa / km, atau 100,5 % di atas rata-rata kota otonom sejenis yang ada di Indonesia, atau dengan kata lain, calon Kota Maumere masih memiliki tingkat kepadatan penduduk yang seimbang dan efektif dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Selain melakukan perbandingan antara kepadatan penduduk calon Kota Maumere dengan kepadatan Provinsi dan berdasarkan ciri-ciri kota menurut hasil penelitian Universitas Padjajaran tahun 2000[37] kepadatan penduduk Kota lebih besar (>) 50 jiwa / ha, maka calon Kota Maumere memiliki tingkat kepadatan masih berada di bawah dari cirri-ciri kota menurut hasil penelitian UPAD .

3.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan

[37] Pemekaran Kabupaten Sikka – Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal. 32

No	Kecamatan	IW			Nilai IW		Rata-Rata IW
		2007	2008	2009	2008	2009	
1	Nita	0.040686	0.041438	0.041723	0.000752	0.000285	0.04128221
2	Magepanda	0.024018	0.025243	0.017906	0.001225	-0.007336	0.02238894
3	Kewapante	0.081854	0.083800	0.076154	0.001946	-0.007646	0.08060241
4	Hewokloang	0.068976	0.068635	0.068803	-0.000341	0.000168	0.06880466
5	Nelle	0.099074	0.098154	0.093458	-0.000919	-0.004696	0.09689558
6	Koting	0.048216	0.046634	0.044872	-0.001583	-0.001762	0.04657408
7	Kangae	0.073586	0.074694	0.067496	0.001108	-0.007198	0.07192513
8	Bola	0.014458	0.015557	0.008325	0.001099	-0.007231	0.01277994
9	Doreng	0.094777	0.094256	0.087792	-0.000521	-0.006464	0.09227503
10	Mapitara	0.052611	0.052482	0.045502	-0.000130	-0.006980	0.05019815
11	Alok	0.520120	0.523873	0.463317	0.003753	-0.060556	0.50243692
12	Alok Timur	0.088227	0.092389	0.091797	0.004162	-0.000592	0.09080445
13	Alok Barat	0.067565	0.068072	0.060134	0.000507	-0.007938	0.06525677
14	Paga	0.064661	0.065818	0.056961	0.001157	-0.008858	0.06248008
15	Tanawawo	0.094149	0.095100	0.089757	0.000951	-0.005344	0.0930018
16	Mego	0.084337	0.084860	0.085829	0.000523	0.000969	0.08500845
17	Lela	0.017582	0.018477	0.005666	0.000895	-0.012811	0.01390833
18	Waigete	0.088240	0.088925	0.080824	0.000685	-0.008101	0.08599675
19	Talibura	0.033053	0.034471	0.028446	0.001417	-0.006025	0.03198981
20	Waiblama	0.040422	0.040724	0.038912	0.000301	-0.001811	0.04001937
21	Palue	0.067561	0.068960	0.069305	0.001399	0.000345	0.06860858
22	Jumlah Kab. Sikka	1.764173	1.782560	1.622978	0.018387	-0.159582	1.723237
23	Kabupaten Sikka	0.084008	0.084884	0.077285	0.000876	-0.007599	0.082059

No	Kecamatan	$(Yi-Y)^2 \times (ni/N)/Y$		
		2007	2008	2009
1	Nita	6.37490E+03	6.83065E+03	7837.880135
2	Magepanda	2.22157E+03	2.53476E+03	1443.630692
3	Kewapante	2.58027E+04	2.79353E+04	26111.36333
4	Hewokloang	1.83223E+04	1.87396E+04	21313.88263
5	Nelle	3.78012E+04	3.83254E+04	39326.56352
6	Koting	8.95316E+03	8.65102E+03	9065.710567
7	Kangae	2.08535E+04	2.21939E+04	20511.62637
8	Bola	8.04975E+02	9.62730E+02	312.0775804
9	Doreng	3.45935E+04	3.53415E+04	34702.23045
10	Mapitara	1.06597E+04	1.09567E+04	9321.832007
11	Alok	1.04182E+06	1.09174E+06	966509.2808
12	Alok Timur	2.99773E+04	3.39554E+04	37940.7031
13	Alok Barat	1.75803E+04	1.84334E+04	16281.09832
14	Paga	1.61018E+04	1.72331E+04	14608.19763
15	Tanawawo	3.41363E+04	3.59773E+04	36272.78437
16	Mego	2.73920E+04	2.86464E+04	33167.50361
17	Lela	1.19051E+03	1.35806E+03	144.5485285
18	Waigete	2.99862E+04	3.14571E+04	29412.67684
19	Talibura	4.20740E+03	4.72676E+03	3643.191576
20	Waiblama	6.29253E+03	6.59718E+03	6817.514033
21	Palue	1.75783E+04	1.89173E+04	21626.19223

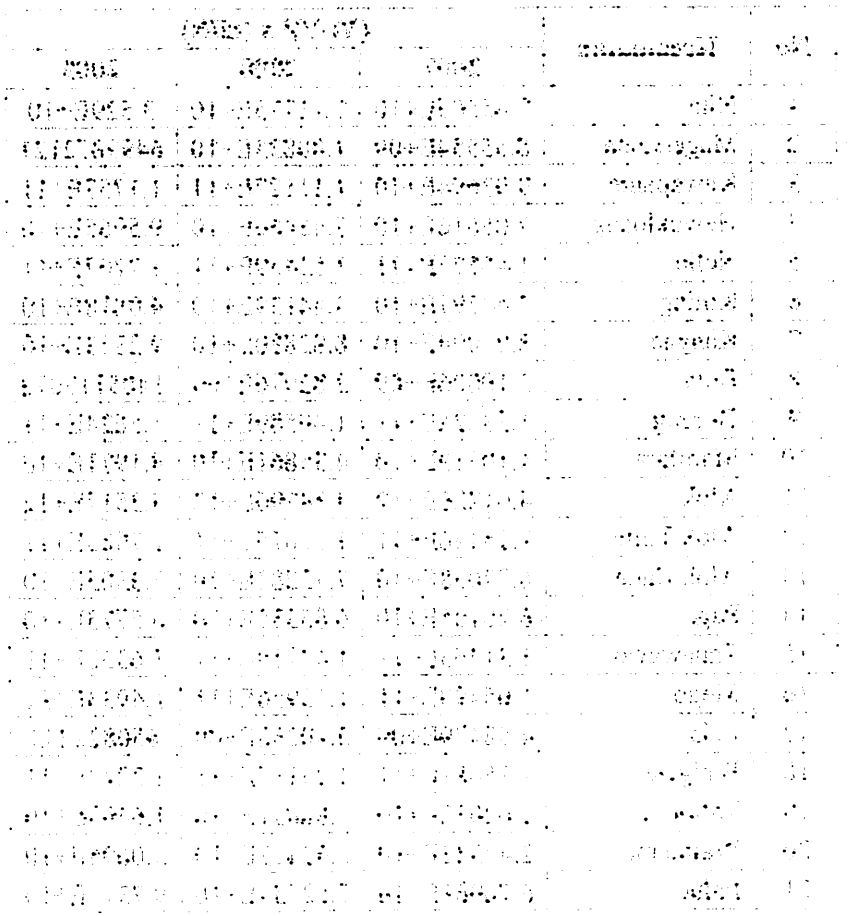

No	Kecamatan	$(Yi-Y)^2 \times (ni/N)$		
		2007	2008	2009
1	Nita	2.45505E+10	2.71725E+10	3.529E+10
2	Magepanda	8.55554E+09	1.00833E+10	6499872121
3	Kewapante	9.93694E+10	1.11127E+11	1.1757E+11
4	Hewokloang	7.05616E+10	7.45466E+10	9.5965E+10
5	Nelle	1.45577E+11	1.52459E+11	1.7707E+11
6	Koting	3.44797E+10	3.44139E+10	4.0818E+10
7	Kangae	8.03094E+10	8.82880E+10	9.2353E+10
8	Bola	3.10006E+09	3.82976E+09	1405113078
9	Doreng	1.33224E+11	1.40589E+11	1.5624E+11
10	Mapitara	4.10519E+10	4.35861E+10	4.1971E+10
11	Alok	4.01220E+12	4.34296E+12	4.3517E+12
12	Alok Timur	1.15446E+11	1.35075E+11	1.7083E+11
13	Alok Barat	6.77038E+10	7.33283E+10	7.3305E+10
14	Paga	6.20101E+10	6.85535E+10	6.5773E+10
15	Tanawawo	1.31463E+11	1.43118E+11	1.6332E+11
16	Mego	1.05490E+11	1.13956E+11	1.4933E+11
17	Lela	4.58479E+09	5.40238E+09	650822233
18	Waigete	1.15481E+11	1.25137E+11	1.3243E+11
19	Talibura	1.62032E+10	1.88031E+10	1.6403E+10
20	Waiblama	2.42333E+10	2.62437E+10	3.0696E+10
21	Palue	6.76961E+10	7.52533E+10	9.7371E+10

No	Kecamatan	(ni/N)		
		2007	2008	2009
1	Nita	7.58977E-02	7.48204E-02	0.072806148
2	Magepanda	4.07273E-02	4.12468E-02	0.040377321
3	Kewapante	4.43358E-02	4.61414E-02	0.045199642
4	Hewokloang	2.83871E-02	2.76888E-02	0.030934677
5	Nelle	1.93302E-02	1.92673E-02	0.018798716
6	Koting	2.17630E-02	2.12708E-02	0.020982227
7	Kangae	5.46328E-02	5.46325E-02	0.053789402
8	Bola	3.96735E-02	3.90611E-02	0.037988605
9	Doreng	3.71357E-02	3.62958E-02	0.036132139
10	Mapitara	2.18850E-02	2.13967E-02	0.020979021
11	Alok	1.00829E-01	1.00463E-01	0.100730081
12	Alok Timur	9.78810E-02	9.77471E-02	0.099553358
13	Alok Barat	4.83408E-02	4.93041E-02	0.048765082
14	Paga	5.32165E-02	5.36357E-02	0.054267145
15	Tanawawo	3.85723E-02	3.89783E-02	0.037738511
16	Mego	5.01433E-02	5.02313E-02	0.050692086
17	Lela	4.07239E-02	4.08030E-02	0.039963704
18	Waigete	6.60954E-02	6.55908E-02	0.064354261
19	Talibura	6.28799E-02	6.27196E-02	0.065649619
20	Waiblama	2.28981E-02	2.27213E-02	0.025188933
21	Palue	3.46521E-02	3.59845E-02	0.03510932

No	Kecamatan	$(Yi-Y)^2$		
		2007	2008	2009
1	Nita	3.23469E+11	3.63169E+11	4.8471E+11
2	Magepanda	2.10069E+11	2.44463E+11	1.6098E+11
3	Kewapante	2.24129E+12	2.4084E+12	2.601E+12
4	Hewokloang	2.48569E+12	2.6923E+12	3.1022E+12
5	Nelle	7.53107E+12	7.91286E+12	9.419E+12
6	Koting	1.58433E+12	1.61789E+12	1.9454E+12
7	Kangae	1.46998E+12	1.61603E+12	1.7169E+12
8	Bola	78139257156	98045386884	3.6988E+10
9	Doreng	3.58749E+12	3.87343E+12	4.3243E+12
10	Mapitara	1.8758E+12	2.03705E+12	2.0006E+12
11	Alok	3.97922E+13	4.32296E+13	4.3201E+13
12	Alok Timur	1.17945E+12	1.38189E+12	1.7159E+12
13	Alok Barat	1.40055E+12	1.48727E+12	1.5032E+12
14	Paga	1.16524E+12	1.27813E+12	1.212E+12
15	Tanawawo	3.40823E+12	3.67175E+12	4.3276E+12
16	Mego	2.10377E+12	2.26863E+12	2.9459E+12
17	Lela	1.12582E+11	1.32401E+11	1.6285E+10
18	Waigete	1.74718E+12	1.90784E+12	2.0578E+12
19	Talibura	2.57685E+11	2.99797E+11	2.4986E+11
20	Waiblama	1.05831E+12	1.15503E+12	1.2186E+12
21	Palue	1.9536E+12	2.09127E+12	2.7734E+12

No	Kecamatan	Pertumbuhan PDRB Non Migas (%)		PDRB Per Kapita		Ratio PDRB Kec / Kab		Angka Kemiskinan		100 - Angka Miskin		IKE	Kategori IKE
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2009	
1	Alok	-0.15	34.57	100.00	100	100	100.15	24%	21%	100	100	335	Tinggi
2	Nelle	100	100	68.36	67.75	18.27	20.17	35%	33%	86	85	273	Tinggi
3	Koting	1.26	30	53.25	52.66	10.12	10.24	35%	37%	86	80	172	Rendah
4	Alok Timur	-1.99	52	52.48	52.73	45.61	47.38	30%	33%	92	85	237	Sedang
5	Lela	2.69	32	41.81	41.35	13.73	13.93	29%	25%	93	95	182	Rendah
6	Bola	2.08	24	38.92	38.43	13.21	13.28	71%	57%	38	54	131	Rendah
7	Magepanda	3.42	29	37.03	36.58	11.95	12.09	51%	47%	64	67	145	Rendah
8	Talibura	2.41	20	36.14	35.68	20.44	20.45	62%	63%	50	47	123	Rendah
9	Nita	1.26	33	34.37	34.01	20.80	21.13	47%	43%	70	72	160	Rendah
10	Paga	4.18	33	30.71	30.36	13.72	13.92	54%	54%	61	58	135	Rendah
11	Waiblama	2.84	43	30.69	30.37	6.31	6.49	82%	65%	24	44	124	Rendah
12	Alok Barat	9.11	48	29.58	29.42	12.60	13.03	42%	39%	76	77	168	Rendah
13	Kangae	1.57	29	28.82	28.46	12.87	13.01	54%	51%	61	62	133	Rendah
14	Mapitara	1.47	45	27.88	27.57	5.00	5.15	57%	52%	57	61	139	Rendah
15	Waigete	3.73	21	27.70	27.36	15.91	15.92	66%	61%	45	49	113	Rendah
16	Kewapante	1.35	32	26.09	25.86	9.46	9.60	58%	58%	55	53	121	Rendah
17	Palue	1.31	44	25.62	25.43	10.02	10.31	45%	35%	72	82	162	Rendah
18	Mego	1.65	37	25.16	24.92	12.27	12.51	47%	43%	70	72	146	Rendah
19	Hewokloang	6.55	34	24.75	24.47	5.73	5.83	60%	61%	53	49	114	Rendah
20	Doreng	2.58	41	21.88	21.62	6.64	6.81	60%	55%	53	57	126	Rendah
21	Tanawawo	-131.18	36	21.87	21.64	7.26	7.40	62%	59%	50	52	117	Rendah

No	Kecamatan	Pertumbuhan PDRB Non Migas (%)		PDRB Per Kapita		Ratio PDRB Kec / Kab		Angka Kemiskinan		100 - Angka Miskin	
		2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	Alok	-0.06	3.98	11075208	11508956	0.27	0.26	24%	21%	76	79
2	Nelle	37.28	11.50	7571493	7796761	0.05	0.05	35%	33%	65	67
3	Koting	0.47	3.43	5897208	6060380	0.03	0.03	35%	37%	65	63
4	Alok Timur	-0.74	5.96	5812381	6068998	0.12	0.13	30%	33%	70	67
5	Lela	1.00	3.70	4630062	4758751	0.04	0.04	29%	25%	71	75
6	Bola	0.78	2.81	4310126	4422880	0.04	0.04	71%	57%	29	43
7	Magepanda	1.27	3.38	4101227	4210167	0.03	0.03	51%	47%	49	53
8	Talibura	0.90	2.34	4002587	4106550	0.06	0.05	62%	63%	38	37
9	Nita	0.47	3.80	3806239	3914362	0.06	0.06	47%	43%	53	57
10	Paga	1.56	3.75	3401532	3494007	0.04	0.04	54%	54%	46	46
11	Waiblama	1.06	4.90	3398541	3494856	0.02	0.02	82%	65%	18	35
12	Alok Barat	3.39	5.50	3276388	3385423	0.03	0.03	42%	39%	58	61
13	Kangae	0.59	3.38	3192132	3275074	0.03	0.03	54%	51%	46	49
14	Mapitara	0.55	5.18	3088015	3173112	0.01	0.01	57%	52%	43	48
15	Waigete	1.39	2.37	3067940	3149049	0.04	0.04	66%	61%	34	39
16	Kewapante	0.50	3.68	2889681	2976786	0.03	0.03	58%	58%	42	42
17	Palue	0.49	5.08	2837107	2927213	0.03	0.03	45%	35%	55	65
18	Mego	0.62	4.20	2786079	2868459	0.03	0.03	47%	43%	53	57
19	Hewokloang	2.44	3.94	2741150	2816028	0.02	0.02	60%	61%	40	39
20	Doreng	0.96	4.66	2422961	2487683	0.02	0.02	60%	55%	40	45
21	Tanawawo	-48.90	4.14	2422165	2490138	0.02	0.02	62%	59%	38	41

	Ketimpangan Ekonomi	Kinerja Ekonomi Daerah	TOTAL	EV	VP	ƛ	ƛ Max	IK
Ketimpangan Ekonomi	1.00	0.11	**1.11**	0.33	0.10	1.001001001	**2.002**	**0.002**
Kinerja Ekonomi Daerah	9.00	1.00	**10.00**	3.00	0.90	1.001001001		
Jumlah	**10.00**	**1.11**	**11.11**	**3.33**	1.00	**2.002002002**		

	Siswa Per Sekolah	Siswa Per Guru	Fasilitas Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Kualitas Infrastruktur	TOTAL	EV	VP	ƛ	ƛ Max	IK
Siswa Per Sekolah	1.00	0.20	0.33	1.00	0.33	**2.87**	0.467	0.08749	1.04988	**5.09452**	**0.02363**
Siswa Per Guru	5.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**9.00**	1.3797	0.25846	1.08554		
.Fas Kesehatan	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**7.00**	1.2457	0.23336	1.01123		
Tenaga Kesehatan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**5.00**	1	0.18733	0.93664		
Kualitas Infrastruktur	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	**7.00**	1.2457	0.23336	1.01123		
Jumlah	**12.00**	**4.20**	**4.33**	**5.00**	**4.33**	**29.87**	**5.3382**	**1**	**5.09452**		

Sumber : Hasil Analisis

Tabel Rekapan Quisioner AHP (Narasumber : Dimas Wisnu Adrianto, ST. MT. M, Env, Man)

	Kependudukan	Keuangan	Ekonomi	Pelayanan Publik	Total	EV	VP	λ	λ Max	IK
Kependudukan	1.00	0.14	0.20	0.14	**1.49**	0.279056603	0.0276	0.5519	**3.7488**	**0.1428**
Keuangan	7.00	1.00	1.00	0.25	**9.25**	2.0058338	0.1984	1.21844		
Ekonomi	5.00	1.00	1.00	0.33	**7.33**	1.86976723	0.1849	0.96146		
Pelayanan Publik	7.00	4.00	3.00	1.00	**15.00**	5.957892136	0.5892	1.017		
Jumlah	**19.00**	**6.00**	**5.00**	**1.58**	**31.58**	**10.11254977**	1.0000	**3.7488**		

	Kepadatan	Pertumbuhan	Total	EV	VP	λ	λ Max	IK
Kepadatan	1	0.17	**1.17**	0.58	0.13	1.050952878	**2.0631**	**0.06309**
Pertumbuhan	7	1	**8.00**	3.83	0.87	1.012132901		
Jumlah	**8**	**1.17**	**9.17**	**4.41**	1.00	**2.063085779**		

	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan APBD	DOF	RDAU	IKR	RK	TOTAL	EV	VP	λ	λ Max	IK
Pertumbuhan PAD	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	9.00	**22.00**	2.46621	0.29577	1.0385	**6.05825**	**0.01165**
Pertumbuhan APBD	0.20	1.00	0.33	2.00	0.20	2.00	**5.73**	0.61353	0.07358	1.10371		
DOF	1.00	3.00	1.00	5.00	1.00	7.00	**18.00**	2.17203	0.26049	0.95762		
RDAU	0.20	0.50	0.20	1.00	0.20	1.00	**3.10**	0.39842	0.04778	0.90788		
IKR	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	7.00	**20.00**	2.36505	0.28364	1.0049		
RK	0.11	0.50	0.14	1.00	0.14	1.00	**2.90**	0.32292	0.03873	1.04564		
Jumlah	**3.51**	**15.00**	**3.68**	**19.00**	**3.54**	**27.00**	**71.73**	**8.33815**	**1**	**6.05825**		

	Ketimpangan Ekonomi	Kinerja Ekonomi Daerah	TOTAL	EV	VP	λ	λ Max	IK
Ketimpangan Ekonomi	1.00	0.11	**1.11**	0.33	0.10	1.001001	**2.002002**	**0.002**
Kinerja Ekonomi Daerah	9.00	1.00	**10.00**	3.00	0.90	1.001001		
Jumlah	**10.00**	**1.11**	**11.11**	**3.33**	1.00	**2.002002**		

	Siswa Per Sekolah	Siswa Per Guru	Fasilitas Kesehatan	Tenaga esehatanK	Kualitas Infrastruktur	TOTAL	EV	VP	λ	λ Max	IK
Siswa Per Sekolah	1.00	7.00	1.00	1.00	1.00	**11.00**	1.4757732	0.2045	0.84705	**6.6949**	**0.42373**
Siswa Per Guru	0.14	1.00	0.14	0.14	0.14	**1.57**	0.2108247	0.0292	0.84705		
Fasilitas Kesehatan	1.00	7.00	1.00	1.00	9.00	**19.00**	2.290172	0.3173	1.31449		
Tenaga Kesehatan	1.00	7.00	1.00	1.00	9.00	**19.00**	2.290172	0.3173	1.03245		
Kualitas Infrastruktur	1.00	7.00	1.00	0.11	1.00	**10.11**	0.9509794	0.1318	2.65387		
Jumlah	**4.14**	**29.00**	**4.14**	**3.25**	**20.14**	**60.68**	**7.2179214**	**1**	**6.6949**		

Sumber : Hasil Analisis

Tabel Rekapan Quisioner AHP (Narasumber : Dr. Sasongko, MS)

	Kependudukan	Keuangan	Ekonomi	Pelayanan Publik	Total	EV	VP	λ	λ Max	IK
Kependudukan	1.00	0.14	0.11	0.14	**1.40**	0.237233	0.0163	0.3595	**3.87566**	**-0.0414**
Keuangan	7.00	1.00	0.11	1.00	**9.11**	1.631574	0.1124	1.2522		
Ekonomi	7.00	9.00	1.00	9.00	**26.00**	11.01892	0.7589	1.0119		
Pelayanan Publik	7.00	1.00	0.11	1.00	**9.11**	1.631574	0.1124	1.2522		
Jumlah	**22.00**	**11.14**	**1.33**	**11.14**	**45.62**	**14.5193**	**1.0000**	**3.8757**		

	Kepadatan	Pertumbuhan	Total	EV	VP	λ	λ Max	IK
Kepadatan	1	0.14	**1.14**	0.55	0.13	1.000552	**2.0011049**	**0.0011**
Pertumbuhan	7	1	**8.00**	3.83	0.88	1.000552		
Jumlah	**8.00**	**1.14**	**9.14**	**4.37**	1.00	**2.001105**		

	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan APBD	DOF	RDAU	IKR	RK	TOTAL	EV	VP	λ	λ Max	IK
Pertumbuhan PAD	1.00	7.00	0.11	7.00	9.00	7.00	**31.11**	2.6458	0.29207	3.07834	**10.2987**	**0.85975**
Pertumbuhan APBD	0.14	1.00	0.11	7.00	7.00	0.14	**15.40**	0.6934	0.07654	1.85887		
DOF	9.00	9.00	1.00	1.00	7.00	7.00	**34.00**	3.9791	0.43926	1.10163		
RDAU	0.14	0.14	1.00	1.00	7.00	7.00	**16.29**	1	0.11039	1.79782		
IKR	0.11	0.14	0.14	0.14	1.00	7.00	**8.54**	0.3625	0.04001	1.24611		
RK	0.14	7.00	0.14	0.14	0.14	1.00	**8.57**	0.378	0.04172	1.21597		
Jumlah	**10.54**	**24.29**	**2.51**	**16.29**	**31.14**	**29.14**	**113.90**	**9.0586**	**1**	**10.2987**		

	Siswa Per Sekolah	Siswa Per Guru	Fasilitas tanKeseha	Tenaga Kesehatan	Kualitas Infrastruktur	TOTAL	EV	VP	λ	λ Max	IK
Siswa Per Sekolah	1.00	0.17	6.00	1.00	5.00	**13.17**	1.3797297	0.2093	1.7508	**6.1092**	**0.2773**
Siswa Per Guru	6.00	1.00	4.00	0.50	3.00	**14.50**	2.0476725	0.3106	1.1646		
Fasilitas Kesehatan	0.17	0.25	1.00	0.25	4.00	**5.67**	0.5296119	0.0803	1.225		
Tenaga Kesehatan	1.00	2.00	4.00	1.00	9.00	**17.00**	2.352158	0.3567	1.0207		
Kualitas Infrastruktur	0.20	0.33	0.25	0.11	1.00	**1.89**	0.2841327	0.0431	0.9481		
Jumlah	**8.37**	**3.75**	**15.25**	**2.86**	**22.00**	**52.23**	**6.5933049**	**1**	**6.1092**		

	Ketimpangan Ekonomi	Kinerja Ekonomi Daerah	TOTAL	EV	VP	λ	λ Max	IK
Ketimpangan Ekonomi	1.00	0.13	**1.13**	0.35	0.11	1.000623	**2.0012456**	**0.0012**
Kinerja Ekonomi Daerah	8.00	1.00	**9.00**	2.83	0.89	1.000623		
Jumlah	**9.00**	**1.13**	**10.13**	**3.18**	1.00	**2.001246**		

Sumber : Hasil Analisis

NO.	Variabel	Sub Variabel	Data Yang dibutuhkan	Tahun Data	Sumber Data	Jenis Data	Metode Analisis	Output
			Khusus (DAK) c. Dana Bantuan d. APBD					
3.	Kemampuan Ekonomi	1. Ketimpangan Ekonomi antar Kecamatan	a. Pendapatan per kapita Kecamatan b. Pendapatan per kapita Kabupaten c. Jumlah Penduduk Kecamatan d. Jumlah Penduduk Kabupaten	2005-2010	• Badan Pusat Statistik (BPS) • BAPPEDA • Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	• Uraian • Tabel	Analisis Kuantitatif, dan AHP	Kemampuan Ekonomi Daerah dalam mendukung pembentukan Kota otonom
		2. Kinerja Ekonomi Daerah	a. Pertumbuhan PDRB Non-migas b. PDRB per kapita c. Ratio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi d. Jumlah Penduduk miskin	2005-2010	• Badan Pusat Statistik (BPS) • BAPPEDA • Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	• Uraian • Tabel		
4.	Tingkat Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	a. Jumlah Siswa b. Jumlah Sekolah c. Jumlah Guru d. Jumlah Fasilitas Kesehatan e. Jumlah Tenaga Kesehatan f. Kualitas Infrastruktur (Panjang Jalan Aspal)	2005-2010	• Dinasa Pendidikan Pemuda dan Olah raga • Dinas Kesehatan • Badan Pusat Statistik (BPS) • Dinas Pekerjaan Umum (PU)	• Uraian • Tabel		Kemampuan Kauangan Daerah dalam mendukung pembentukan Kota otonom

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Kebutuhan Data Instansi

NO.	Variabel	Sub Variabel	Data Yang dibutuhkan	Tahun Data	Sumber Data	Jenis Data	Metode Analisis	Output
1.	Kependudukan	Kepadatan Penduduk	a. Jumlah Penduduk b. Luas Wilayah	2005-2010	• Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil • Badan Pusat Statistik (BPS)	• Peta • Uraian • Tabel	Analisis Kuantitatif, dan AHP	Kemampuan Kependudukan dalam mendukung pembentukan Kota otonom
2.	Kemampuan Keuangan	1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya	2004-2010	• Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	• Uraian • Tabel		Kemampuan Kauangan Daerah dalam mendukung pembentukan Kota otonom
		2. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya	2004-2010	• Inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	• Uraian • Tabel		
		3. Ratio Dana Alokasi Umum (RDAU)	a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	2005-2010	• Inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	• Uraian • Tabel		
		4. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) b. Dana Alokasi Umum (DAU) c. Dana Bagi Hasil d. Belanja Rutin	2005-2010	• Inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	• Uraian • Tabel		
		5. Ratio Ketergantungan	a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi	2005-2010	• Inas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	• Uraian • Tabel		

NO.	Variabel	Data Yang dibutuhkan	Tahun Data					Sumber Data
			05	06	07	08	09	
		g. Kualitas Infrastruktur (Panjang Jalan Aspal)						

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

NO.	Variabel	Data Yang dibutuhkan	Tahun Data					Sumber Data
			05	06	07	08	09	
		l. Dana Alokasi Khusus (DAK)						Daerah (DPPAKD)
		m. Dana Bantuan						
		n. APBD						
3.	Kemampuan Ekonomi	a. Pendapatan per kapita Kecamatan						• Badan Pusat Statistik (BPS) • BAPPEDA • Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		b. Pendapatan per kapita Kabupaten						
		c. Jumlah Penduduk Kecamatan						
		d. Jumlah Penduduk Kabupaten						
		e. Pertumbuhan PDRB Non-migas						• Badan Pusat Statistik (BPS) • BAPPEDA • Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		f. PDRB per kapita						
		g. Ratio PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi						
		h. Jumlah Penduduk miskin						
4.	Pelayanan Publik	a. Jumlah Siswa						• Dinasa Pendidikan Pemuda dan Olah raga • Dinas Kesehatan • Badan Pusat Statistik (BPS) • Dinas Pekerjaan Umum (PU)
		b. Jumlah Sekolah						
		c. Jumlah Guru d. Jumlah Fasilitas						
		e. Kesehatan						
		f. Jumlah Tenaga Kesehatan						

JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL MALANG

Chek List Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

NO.	Variabel	Data Yang dibutuhkan	Tahun Data					Sumber Data
			05	06	07	08	09	
1.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk						• Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil • Badan Pusat Statistik (BPS)
		b. Luas Wilayah						
2.	Kemampuan Keuangan Daerah	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan						• Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD)
		b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya						
		c. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun berjalan						• Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD)
		d. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya						
		e. Dana Alokasi Umum (DAU)						• Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD)
		f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)						
		g. Pendapatan Asli Daerah (PAD)						• Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPPAKD)
		h. Dana Alokasi Umum (DAU)						
		i. Dana Bagi Hasil						
		j. Belanja Rutin						
		k. Dana Alokasi Umum (DAU)						• Dinas Pendapatan, Pengelolaan Aset dan Keuangan

Khairullah, Malik Cahyadin. 2006. *Evaluasi Pemekaran Wilayah di Indonesia, Studi kasus : Kabupaten Lahat ", Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Hal 261-262*

Rijanta, R. 2006. *Ruang dan Tempat dalam Studi Pemekaran Wilayah : Perspektif Teori dan Pengalaman Empirik Kabupaten Kutai.* Jurnal Perencanaan Pengembangan Wilayah Fakultas Geografi UGM. Yokyakarta

Kebijakan

Sekretariat Negara RI. 2004. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

Sekretariat Negara RI. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Persyarakatan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Internet

http://www.google.com/publicdata?ds=wbwdi&met=sp_pop_grow&idim=country:IDN&dl=id&hl=id&q=pertumbuhan+penduduk *29 November 2009*

Tribun Kaltim Online, 26 Desember 2007,dalam Zuhro-Peneliti LIPI. http://www.acehinstitute.org/id/index.php?view=article&catid=22%3Ademokratisasi-dantransparansi&id=87%3Amemekarkan-aceh-sebuah solusikah&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=34. 17 Juni 2010

Saile, H, M, Said Dr. M.Si. 2008. *Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta : Restu Agun..

Sudantoko , H. Djoko. 2003 . *Dilema Otonomi Daerah.* Yokyakarta : Andi.

Syaukani, Drs, H, HR., Gaftar, Afan, Prof, Dr, MA.,Rasyid, M. Ryaas, Prof, Dr, MA. 2001. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.* Jakarta : Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan

Tarigan, Robinson, Drs., M.R.P. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah.* Yokyakarta : Bumi Aksara

Widjaja, Prof, Drs, H. A. W. 1994. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia.* Jakarta : PT Rineka Cipta.

Widjaja, Prof, Drs, H. A. W. 2003. *Titik Berat Otonomi TK II.* Rajawali Pers

Marbun, Y, M. *Ketimpangan dan Otonomi Daerah. Universitas Sumatra Utara.* 2010

Yudhoyono, SB, Jend.(HOR) MA. 2002. *Good Governance dan Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003).* Prosumen (PKPEK) dengan FORKOMA-MAP, UGM.

Hasil Penelitian

Berti, Emelia. 2006. *"Mengukur Tingkat Kemampuan Keuangan Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2000 2004 di Kabupaten Lampung Timur"*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia Yokyakarta

Building and Reinventing Decentralized Governance Project. *"Studi Evaluasi Pemekaran Daerah"*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bekerjasama dengan United Nation Development Program (UNDP). 2007.

Harmantyo, Djoko. 2007. *Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan – Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia.* Departemen Geografi - FMIPA Universitas Indonesia. Depok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

Adismita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah.* Yokyakarta : Graha Ilmu

Azhari. Idham Ibty. dkk. 2002. *Good Governance dan Otonomi Daerah.* Yokyakarta : PKPEK dan FORKOMA – MAP, UGM

Bowman, M. Hampton, W. 1983. Lokal Democraties : A Study in comparative Lokal Government, Melbourne: Longman.

Bratakusuma, Deddy Supriady, Ph.D. Solihin, Dadang MA. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Kuncoro, Mudrajad, Prof. ,Ph.D. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang.* Jakarta : Erlangga,

Maddick, H. 1963. Democrazy, Decentralitation, and Development. Bombay: Asian Publishing House.

Mardiasmo, Prof, Dr, MBA, Ak, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah.* Yokyakarta : Andi.

Mardiasmo, Prof, Dr, MBA, Ak. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuanga Daerah.* Yokyakarta :Penerbit Andi

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT GramediaWidiasarana Indonesia

Pusat Pengembangan Potensi dan Profesi (P3PRO), 2008. *Pemekaran Kabupaten Sikka – Provinsi Nusa Tenggara Timur*

Rahmawati, Tri, Dr . 2009. *Pemekaran Daerah Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi.* Yokyakarta : PustakaBelajar

Saaty, T.L, 1990. *The Analytical Hierarchy Prosess : Planing, Priority Setting, Resourc Allocation.* Pittsbugh University Pers.

dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah agar pertumbuhannya meningkat, dan berimbas pada pertumbuhan APBD yang positif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pembangunan di Kota Maumere.

Selain itu tingkat pelayanan pelayanan publik melalui peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Sehingga lebih efektif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

4.2.2 Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan aktif dalam setiap sosialisasi dan control terhadap kesiapan pemerintah dalam merealisasikan kebijakan pemekaran. Selain itu aktif dalam memberikan ide, atau gagasan terkait dengan keinginan untuk menjadi satu daerah otonom. Karena masyarakat merupakan objek dari pembangunan.

4.2.3 Bagi Akademisi

Pendekatan dalam penelitian ini hanya mengkaji beberapa aspek dengan menggunakan beberapa pendekatan teori, dengan tidak didominasi oleh regulasi atau aturan. PP Nomor 78 Tahun 2007, hanya dijadikan sebagai dasar, atau patokan pemberian skor, sedangkan untuk pemilihan variabel lebih didomonasi oleh penggunana teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan otonomi daerah. Sehingga diharapkan di penelitian selanjutnya dapat dikembangkan variabel-variabel baru yang lebih komprehensif. Selain itu diharapkan lebih peka dalam menanggapi isu – isu pemekaran daerah di Indonesia yang mulai menjauh dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah serta mencari solusi atau pendekatan lain dalam menentukan perlu tidaknya dilakukan pemekaran

4.1.5 Tingkat Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

Dari semua analisis per indikator, proses akhir penilaian kesiapan Maumere menjadi kota otonom, adalah dengan proses analisis hirarki (AHP).AHP ini digunakan untuk melihat tingkat prioritas setiap indikator dan sub indikator, sesuai dengan masukan para ahli yang telah dinilai konsistensinya.

Tingkat prioritas yang terlihat dari perhitungan vektor prioritas (VP) dalam perhitungan AHP dijadikan patokan dalam pemberian bobot. Selanjutnya didasarkan pada PP nomor 78 tahun 2007, dilakukan pemberian skor. Dengan klasifikasi nilai bobot skor sebagai berikut :

Tabel 4.5. Nilai Kesiapan Daerah Otonom Baru

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator
Sangat Mampu	420 s/d 500
Mampu	340 s/d 419
Kurang Mampu	260 s/d 339
Tidak Mampu	180 s/d 259
Sangat tidak Mampu	100 s/d 179

Sumber : PP 78 Tahun 2007

Dari hasil penilaian kesiapan Maumere menjadi kota otonom di atas total nilai akhir dari kesemua indikator adalah **289,9** sehingga Kota Maumere dinilai **"kurang mampu"** untuk menjadi kota otonom.

4.2 Saran

Bertolak dari kesimpulan yang ada, maka saran yang perlu diperhatikan antara lain :

4.2.1 Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Maumere telah siap untuk menjadi kota otonom, namun pemerintah diharapkan agar bisa berusaha meningkatkan segala kekurangan, khususnya dalam bidang keuangan perlu

menunjukan rendahnya efektifitas daya tampung sekolah. Selanjutnya ratio jumlah siswa terhadap ketersediaan tenaga pengajar, efektifnya adalah semakin sedikit jumlah siswa per guru menunjukan proses belajar mengajar berjalan secara efektif. Dari analisis diketahui bahwa ratio jumlah siswa per guru di calon Kota Maumere memilki ratio yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten induk, sehingga kurang efektif proses belejar mengajar jika di bandingkan dengan kabupaten induk.

Selain pendidikan yang menjadi ukuran pelayanan publik adalah ketersediaan tenaga kesehatan, dan fasilitas kesehatan. Evaluasi terhadap ketersediaan tenaga kesehatan menggunakan rasio tenaga kesehatan termasuk dokter, paramedis dan tenaga non paramedis untuk setiap 10.000 penduduk. Analisis menunjukan bahwa tingkat ketersediaan fasilitas kesehatan di calon Kota lebih tinggi dari Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk. Demikian pun dengan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Selanjutnya untuk kualitas infrastruktur yang ditinjau dari prosentasi jalan dengan kualitas baik, data menunjukan 60 % jalan di calon kota berkondisi baik, artinya kualitasnya baik.

Untuk lebih jelanya dapat kita lihat pada tabel kesimpulan kesiapan tingkat pelayanan publik berikut ini.

Tabel 4.4. Kesiapan Tingkat Pelayanan Publik

No.	Sub Indikator	Nilai Skor	Tingkat Kesiapan
1.	Jumlah Siswa Per Sekolah	2	Kurang Siap
2.	Jumlah Siswa Per Guru	2	Kurang Siap
3.	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	3	Sangat Siap
4.	Ketersediaan Tenaga Kesehatan	1	Kurang Siap
5.	Kualitas Infrastruktur	4	Siap

Sumber : Hasil Analisis

Yang paling terakhir dari analisis kemampuan keuangan adalah ratio ketergantungan (RK) yang merupakan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap lokasi dana bantuan dari pemerintah pusat, memperlihatkan kesiapan daerah dalam menggali sumber dana potensi lokal yang terkandung di dalamnya. Adapun dari analisis dapat diketahui bahwa ratio ketergantungan calon Kota Maumere terhadap pemerintah pusat tinggi sehingga masuk dalam kategori "sangat kurang".

Hasil kajian dalam analisis tingkat kemampuan keuangan daerah bervariasi dan bernilai positif maupun negatif dalam mempengaruhi tingkat kesiapan Maumere menjadi kota otonom, dan dapat disimpulkan sebagai berikut

Tabel 4.3. Kesiapan Faktor Keuangan Daerah

NO.	Sub Indikator	Nilai Skor	Tingkat Kesiapan
1.	Pertumbuhan PAD	2	Kurang Siap
2.	Pertumbuhan APBD	2	Kurang Siap
3.	Derajat Otonomi Fiskal	5	Sangat Siap
4.	Ratio DAU terhadap APBD	1	Sangat Kurang
5.	Indeks Kemampuan Rutin	5	Sangat Siap
6.	Ratio Ketergantungan	1	Sangat Kurang

Sumber : Hasil Analisis

4.1.4 Tingkat Pelayanan Publik

Aspek utama keempat yang menjadi fokus evaluasi ini adalah kinerja pelayanan publik pemerintah daerah. Analisis akan dibagi ke dalam tiga bagian: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Tingkat Pelayanan Publik merupakan faktor yang mempunyai peranan cukup besar dalam mempengaruhi tingkat kesiapan suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah atau pemekaran.

Dari hasil analisis diketahui bahwa tingkat pelayanan publik dari aspek pendidikan yang terdiri dari ratio jumlah siswa terhadap jumlah sekolah diketahui bahwa calon Kota Maumere jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka memiliki ratio siswa terhadap sekolah yang lebih tinggi. Tingginya ratio

Artinya jika ditinjau dari pertumbuhan PAD calon Kota Maumere kurang mampu, atau kurang siap.

Selanjutnya pertumbuhan APBD, dapat kita ketahui bahwa calon Kota Maumere memiliki tingkat pertumbuhan APBD yang sama dengan Kabupaten Sikka, sebagai kabupaten induk, yaitu pada tahun 2006 (61,48 %) masuk kategori "sangat baik", dan turun drastis pada tahun 2007 (14,86 %) masuk kategori " kurang", dan kembali naik pada tahun 2008 (22,86 %) dengan kategori "cukup", dan menurun drastis pada 2009 (5,90 %), dengan kategori "sangat kurang". Artinya dari aspek pertumbuhan APBD, calon Kota kurang siap.

Derajat otonomi fiskal (DOF), adalah besar kecilnya kemampuan keuangan suatu daerah dalam memberikan suatu kontribusi terhadap realisasi penerimaan daerah. Jika dilihat dari analisis DOF calon Kota Maumere dapat kita lihat bahwa Kota Maumere memiliki DOF dari 2005 samapai 2008 dengan kategori "sangat baik" dan pada tahun 2009 sedikit menurun menjadi "baik" tapi dengan rata-rata masih dalam kategori "sangat baik".

Selanjutnya ratio dana alokasi umum terhadap APDB (RDAU), yang adalah tingkat penyaluran dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada suatu daerah guna menunjukan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai urusan pemerintah. Analisis RDAU Kota Maumere selama 5 tahun dari tahun 2005 sampai 2009 menunjukan, bahwa calon kota memiliki RDAU yang masuk dalam kategori "sangat kurang". Namun grafik menunjukan dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini memberi nilai positif terhadap perkembangan tingkat kemandirian calon Kota Maumere ke depan.

Indeks kemampuan rutin (IKR), merupakan suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan dalam potensi suatu daerah dalam membiayai belanja rutin. Di mana IKR ini dipengaruhi oleh PAD, DAU, bagi hasil dan belanja rutin. Untuk Kota Maumere, analisis IKR menunjukan nilai positif dan dari tahun 2005-2009 masuk dalam kategori "sangat baik", walaupun terjadi sedikit penurunan demikianpun jika dibandingkan dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

per kapita (WELFI), ratio PDRB kabupaten terhadap provinsi (ESERI), dan angka kemiskinan (POVEI) sangat mempengaruhi tingkat kinerja ekonomi wilayah. Hasil analisis menunjukan kinerja ekonomi kecamatan di calon Kota Maumere menempati urutan teratas dan masih berada di atas rata-rata kinerja ekonomi Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Sedangkan jika dibandingkan dengan kota/kabupaten dalam satu provinsi, indeks atau tingkat kinerja ekonomi daerah calon Kota Maumere berada pada urutan ke-4 dari 21 kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan berada di atas Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

Tabel 4.2. Kesiapan Faktor Kemampuan Ekonomi

No.	Sub Indikator	Nilai Skor	Tingkat Kesiapan
1.	Ketimpangan Ekonomi	4	Siap
2.	Kinerja Ekonomi Daerah	3	Cukup Siap

Sumber : Hasil Analisis

4.1.3 Kemampuan Keuangan Daerah

Bentuk kemandirian daerah dapat pula dilihat dari kemampuan keuanan daerah dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menggambarkan secara lengkap tentang tingkat kemampuan daerah dari aspek keuangan, baik itu sektor pendapatan, maupun pengeluaran.

Dalam analisis kemampuan keuangan calon Kota Maumere, dilakukan analisis tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (TP PAD), pertumbuhan APBD, Derajat otonomi fiskal (DOF), ratio dana alokasi umum (DAU) terhadap APBD, indeks kemampuan rutin (IKR), dan ratio ketergantungan.

Tingkat pertumbuhan PAD menunjukan sejauh mana kemampuan keuangan suatu daerah dari aspek pendapatan, dan bagaimana peningkatan kemampuan tersebut. Jika meninjau hasil analisis dapat diketahui bahwa bahwa pertumbuhan PAD calon Kota Maumere dari tahun 2006 mengalami peningkatan dan masuk kategori "sangat baik", namun semenjak tahun 2007 sampai 2009, pertumbuhannya relative menurun dan pada tahun terakhir masuk dalam kategori "kurang". Sama halnya dengan Kabupaten Sikka sebagai kabupaten induk.

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kota/kabupaten lain di NTT berada di urutan ke-2 dengan total pertumbuhan positif (3%) dan berada di atas rata-rata pertumbuhan Provinsi NTT (2 %) dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Maka jika ditinjau dari aspek pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere masih berada pada prosentasi 150 % jika dibandingkan dengan kota/kabupaten dalam satu provinsi.

Dari prosentasi tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere diketahui bahwa aspek kependuduk Kota Maumere sangat siap dalam mendukung terbentuknya kota otonom.

Tabel 4.1. Kesiapan Faktor Kependudukan

No.	Sub Indikator	Nilai Skor	Tingkat Kesiapan
1.	Kepadatan Penduduk	5	Sangat Siap
2.	Pertumbuhan Penduduk	5	Sangat Siap

Sumber : Hasil Analisis

4.1.2 Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap arah dan kesuksesan dalam pembangunan daerah. Dalam analisis kemampuan ekonomi dilakukan penilaian terhadap ketimpangan ekonomi dan kinerja ekonomi daerah. Dimana peran PDRB sangat besar. PDRB menjadi tolok ukur ketimpangan maupun kinerja ekonomi suatu wilayah.

Tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Sikka tidak ada ketimpangan yang signifikan, dilihat dari pendapatan per kapita dan penduduk kecamatan, rata-rata setiap kecamatan mempunyai tingkat kemampuan yang sama, demikian pun dengan kecamatan-kecamatan yang masuk dalam calon Kota Maumere. Nilai dari tingkat ketimpangan calon Kota Maumere adalah 0,188, maka dianggap tingkat ketimpangan rendah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, atau pemekaran wilayah.

Selanjutnya kinerja ekonomi daerah yang menjadi salah satu sub indikator dalam mengukur kemampuan ekonomi daerah. PDRB non migas (ECGI), PDRB

BAB IV
PENUTUP

Dalam bab ini, menjelaskan tentang kesimpulan dari proses kegiatan penelitian sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dan memuat usulan menyangkut tema studi berikutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu pemekaran wilayah.

4.1 Kesimpulan

Hasil kajian yang dilakukan yang berkaitan dengan kemampuan calon Kota maumere dari aspek kependudukan, keuangan daerah, kemampuan ekonomi, dan tingkat pelayanan publik maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

4.1.1 Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan, demikianpun berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam analisis sub indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan Maumere menjadi kota otonom adalah tingkat kepadatan penduduk dan pertumbuhan penduduk di mana tingkat kepadatan penduduk calon Kota Maumere dalam kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan dan di tahun 2009 menempati urutan ke-2 jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah Kota Kupang sebagai Kota Administrasi satu-satunya di NTT yang merupakan ibu kota provinsi NTT.

Kepadatan penduduk calon Kota Maumere (jika dibandingkan dengan kota-kota otonom baru yang sejenis di Indonesia (Kota Bima, Kota Palopo, dan Kota Tual) tingkat kepadatan penduduknya berada di atas rata-rata. Berarti jika ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, kepadatan penduduk calon Kota Maumere berada pada posisi 105 % jika dibandingkan dengan rata – rata kota/kabupaten kota – kota otonom baru sejenis.

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek pertumbuhan penduduk, hasil analisis menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk calon Kota Maumere jika

Setelah melakukan pembobotan dan skoring setiap sub indikator, dan dikalikan untuk mendapatkan nilai kesiapan dari setiap indikator, maka dilakukan penjumlahan untuk memperoleh total nilai kesiapan keseluruhan indikator tersebut. Yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi kemampuan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.36. Tabel Kategori Kemampuan Pemekaran

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator
Sangat Mampu	420 s/d 500
Mampu	340 s/d 419
Kurang Mampu	260 s/d 339
Tidak Mampu	180 s/d 259
Sangat tidak Mampu	100 s/d 179

Sumber : PP Nomor 78 Tahun 2007

Dari hasil penilaian kesiapan Maumere menjadi kota otonom di atas total nilai akhir dari kesemua indikator adalah **289,9** sehingga Kota Maumere dinilai "**kurang mampu**" untuk menjadi kota otonom.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3.5.4. Hasil Penilaian Tingkat Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

Setelah melakukan analisis kesiapan setiap indikator, serta pembobotan dengan AHP makan selanjutnya adalah penilaian tingkat kemampuan/kesiapan maumere menjadi kota otonom.

Hasil penilaiannya dapat ditampilakan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.35. Hasil Penilaian Kesiapan Maumere Menjadi Kota Otonom

NO	FAKTOR PENENTU	TINGKATAN		BOBOT	Nilai bobot (x 100)	Score	Bobot x Score
		I	II				
1	**Kependudukan**	**0.028**			**2.8**		
2	Kepadatan Penduduk		0.13	0.004	0.4	5	2.00
3	Pertumbuhan Penduduk		0.87	0.024	2.4	5	12.00
4	**Ekonomi**	**0.185**			18.5		
5	Ketimpangan Ekonomi		0.10	0.019	1.9	4	7.60
6	Kinerja Ekonomi Daerah		0.90	0.167	16.7	3	66.80
7	**Kemampuan Keuangan**	**0.198**			19.8		
8	Pertumbuhan PAD		0.30	0.059	5.9	2	11.80
9	Pertumbuhan APBD		0.07	0.015	1.5	2	3.00
10	Derajat Otonomi Fiskal		0.26	0.052	5.2	5	26.00
11	Ratio Dana Alokasi Umum		0.05	0.009	0.9	1	0.90
12	Indeks Kemampuan Rutin		0.28	0.056	5.6	5	28.00
13	Ratio Ketergantungan		0.04	0.008	0.8	1	0.80
14	**Tingkat Pelayanan Publik**	**0.589**			58.9		
15	Jumlah Siswa Per sekolah		0.09	0.052	5.2	2	10.4
16	Jumlah Siswa Per Guru		0.26	0.152	15.2	2	30.4
17	Jumlah Fasilitas Kesehatan		0.23	0.137	13.7	3	41.1
18	Jumlah Tenaga Kesehatan		0.19	0.110	11.0	1	11.00
19	Kualitas Infrastrukstur		0.23	0.137	13.7	4	54.8
	Jumlah	**1,000**		**1.000**	**100.0**		**289.9**

Sumber : Hasil Analisis

No	Komponen	Kriteria Scoring	Hasil Perhitungan	Score
	- Ketersediaan Tenaga Kesehatan	5 = 51 - 100 % di di bawah pembanding 4 = < 50 % di bawah pembanding 3 = Sama Dengan Pembanding 2 = ≤ 50 % di atas pembanding 1 = > 50% di atas	Ratio calon Kota lebih tinggi Kabupaten induk (29 : 18) = 61,1 %	1
	- Kualitas Infrastruktur	5 = ≥ 80 % 4 = 60 % - 80% 3 = 40% - 60% 2 = 20% - 40% 1 = ≤ 20 %	Prosentasi kualitas jalan calon Kota lebih tinggi Kabupaten induk (60 : 40)	4

Sumber : Hasil analisis

No	Komponen	Kriteria Scoring	Hasil Perhitungan	Score
		3 = 30,1 - 40,00 Sedang 2 = 20,01 - 30,00 Cukup 1 = ≤ 20 % Kurang		
	- Ratio Ketergantungan	5 = ≤ 20,00 Sangat Baik 4 = 20,01 - 30,00 Sedang 3 = 30,01 - 40,00 Cukup 2 = 40,01 - 50,00 Kurang 1 = >50,01 Sangat Kurang	Calon Kota Maumere 140.89	1
5	**Tingkat Pelayanan Publik** - Ratio Siswa Per Sekolah	5 = 51 - 100 % di di bawah pembanding 4 = < 50 % di bawah pembanding 3 = Sama Dengan Pembanding 2 = ≤ 50 % di atas pembanding 1 = > 50% di atas	Ratio calon Kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten induk (221 : 150) = 47,3 % di atas pembanding	2
	- Ratio Siswa Per Guru	5 = 51 - 100 % di di bawah pembanding 4 = < 50 % di bawah pembanding 3 = Sama Dengan Pembanding 2 = ≤ 50 % di atas pembanding 1 = > 50% di atas		2
	- Ketersediaan Fasilitas Kesehatan	5 = 51 - 100 % di di bawah pembanding 4 = < 50 % di bawah pembanding 3 = Sama Dengan Pembanding 2 = ≤ 50 % di atas pembanding 1 = > 50% di atas	Ratio calon Kota sama dengan Kabupaten induk (3 : 3)	3

No	Komponen	Kriteria Scoring	Hasil Perhitungan	Score
		2 = IKE 131 - 172 1 = IKE 88 - 130		
4	**Kemampuan Keuangan Daerah** - Tingkat Pertumbuhan PAD	5 = >50,01 Sangat Baik 4 = 40,01 - 50,00 Baik 3 = 30,1 - 40,00 Sedang 2 = 20,01 - 30,00 Cukup 1 = ≤ 20 % Kurang	Rata - rata TP PAD calon Kota Maumere 29.10	2
	- Tingkat Pertumbuhan APBD	5 = >50,01 Sangat Baik 4 = 40,01 - 50,00 Baik 3 = 30,1 - 40,00 Sedang 2 = 20,01 - 30,00 Cukup 1 = ≤ 20 % Kurang	Calon Kota Maumere 26.28	2
	- Derajat Otonomi Fiskal	5 = >50,01 Sangat Baik 4 = 40,01 - 50,00 Baik 3 = 30,1 - 40,00 Sedang 2 = 20,01 - 30,00 Cukup 1 = ≤ 20 % Kurang	Calon Kota Maumere 62.99	5
	- Ratio DAU terhadap APBD	5 = ≤ 20,00 Sangat Baik 4 = 20,01 - 30,00 Sedang 3 = 30,01 - 40,00 Cukup 2 = 40,01 - 50,00 Kurang 1 = >50,01 Sangat Kurang	Calon Kota Maumere 69.19	1
	- Indeks Kemampuan Rutin	5 = >50,01 Sangat Baik 4 = 40,01 - 50,00 Baik	Calon Kota Maumere 370	5

3.3.5. Faktor-faktor [illegible]

Setiap indikator mempunyai skor dalam skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 masuk dalam kategori mampu, skor 3 masuk dalam kategori kurang mampu, skor 2 masuk dalam kategori tidak mampu dan skor 1 masuk dalam kategori sangat tidak mampu.

Untuk kategori skoring masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.X. Skoring Faktor Penentu

No	Komponen	Kriteria Skoring	Hasil Penelitian	Skor
1	Kependudukan			
	- [illegible]	5 = > 80 % Pendatang 4 = 60 % - 80 % Pendatang 3 = 40 % - 60 % Pendatang 2 = 20 % - 40 % Pendatang 1 = ≤ 20 %	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	5 = ≥ 80 % Pendatang 4 = 60 % - 80 % Pendatang 3 = 40 % - 60 % Pendatang 2 = 20 % - 40 % Pendatang 1 = ≤ 20 %	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	5 = Tidak ada [illegible] 4 = [illegible] 3 = [illegible] 2 = [illegible] 1 = [illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	5 = [illegible] 4 = [illegible] 3 = [illegible]	[illegible]	[illegible]

3.5.3. Skor dari setiap indikator Kesiapan

Setiap indikator mempunyai skor dalam skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 masuk dalam kategori mampu, skor 3 masuk dalam kategori kurang mampu, skor 2 masuk dalam kategori tidak mampu, dan skor 1 masuk dalam kategori sangat tidak mampu.

Untuk kategori sistem skoring masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.34. Skoring Faktor Penentu

No	Komponen	Kriteria Scoring	Hasil Perhitungan	Score
1	**Kependudukan**			
	- Kepadatan Penduduk	5 = ≥ 80 % Pembanding 4 = 60 % - 80% Pembanding 3 = 40% - 60% Pembanding 2 = 20% - 40% Pembanding 1 = ≤ 20 %	Hasil = 450,2 Jiwa / Km² 100.5 % dari pembanding (448 jiwa/km²)	5
	- Pertumbuhan Penduduk	5 = ≥ 80 % Pembanding 4 = 60 % - 80% Pembanding 3 = 40% - 60% Pembanding 2 = 20% - 40% Pembanding 1 = ≤ 20 %	Hasil = 3% pertumbuhan di tahun 2009 150 % dari pembanding (Provinsi 2 %)	5
2	**Kemampuan Ekonomi**			
	- Ketimpangan Ekonomi (IW)	5 = Tidak ada ketimpangan (0) 4 = Ketimpangan Rendah (0.1≤x<0.4) 3 = Ketimpangan Sedang (0.4≤x<0.7) 2 = Ketimpangan tinggi (0.7≤x<1) 1 = Ketimpangan sangat tinggi (1)	Calon Kota Maumere 0,188	4
	- Kinerja Ekonomi Daerah	5 = IKE 257 - 300 4 = IKE 215 - 256 3 = IKE 173 - 214	IKE calon Kota Maumere 178	3